PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA(PERSERO)

Laporan Tahunan 2008 Annual Report

Head Office:
Jl. Yos Sudarso 38 -39 -40 Tanjung Priok, Jakarta - 14320, Indonesia
Phone : (62-21) 4301017, 4301703, 4300993 - Fax : (62-21) 43936175
Website : www.klasifikasiindonesia.com
Email : bki@klasifikasiindonesia.com

**MENGUTAMAKAN MUTU PELAYANAN JASA
BERDASARKAN KOMITMEN YANG TINGGI
TERHADAP ASPEK KESELAMATAN
DAN BERTINDAK PROFESIONAL, INDEPENDEN
SERTA TERPERCAYA DIATAS KEPENTINGAN
SEMUA PIHAK**

**GIVING PRIORITY TO THE QUALITY OF SERVICES
BASED ON HIGH COMMITMENT TO THE SAFETY ASPECT
AND ACT PROFESSIONAL, INDEPENDENT AND TRUSTED
OVER THE INTEREST OF ALL PARTIES**

Daftar Isi
Contents

" Penilaian kondisi kapal dilakukan berdasarkan survey yang profesional dan independen oleh surveyor klasifikasi yang memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian kondisi kapal."

"Judgement of ship condition is done based on professional and independent survey by class surveyor having competence in doing survey of ship condition."

Profil Perusahaan
Company Profiles

Biro Klasifikasi Indonesia, juga dikenal sebagai BKI adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan dengan tujuan mulia untuk mendukung kemandirian industri perkapalan dan pelayaran nasional melalui pelayanan jasa klasifikasi dan jasa-jasa lainnya yang terkait. BKI dalam pelayanan jasanya melakukan riset dan mempublikasikan serta menerapkan standar teknik (Rules & Regulation) dengan melakukan kegiatan desain, konstruksi dan survey maritim terkait dengan fasilitas terapung, termasuk kapal. Standar ini disusun dan dikeluarkan oleh BKI sebagai publikasi teknik. Rules & Regulation yang dikembangkan tidak hanya struktur konstruksi lambung, namun juga meliputi peralatan keselamatan, instalasi permesinan dan kelistrikan.

Lingkup kerja dari BKI adalah melaksanakan survey dan sertifikasi untuk menjamin bahwa Rules & Regulation yang telah dikembangkan, diterapkan pada saat pembangunan kapal baru dan kapal yang sudah jadi. Untuk mempertahankan kondisi kapal tersebut, maka dalam prosesnya kapal diharuskan melakukan perawatan dan perbaikan yang terjadwal, dimana pelaksanaan ini akan dimonitor terus oleh BKI dengan melakukan survey periodik dalam mempertahankan klasifikasinya.

Penilaian kondisi kapal dilakukan berdasarkan survey yang profesional dan independen oleh surveyor klasifikasi yang memiliki kompeten dalam melakukan penilaian kondisi kapal. Hasil dari pemeriksaan dan penilaian ini berupa laporan dan sertifikat yang dijadikan acuan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Pemilik Kapal, Pihak Asuransi, Pemilik Cargo, Pencharter, Galangan Kapal, Pemerintah / Syahbandar / PSC dll.

Kegiatan usaha pada awal berdirinya BKI adalah kegiatan dalam bidang klasifikasi kapal (sebagai bisnis utama) dimana usaha ini dilaksanakan secara nirlaba, namun sejalan dengan perkembangan usaha, maka saat ini selain kegiatan di atas, juga melakukan diversifikasi usaha dengan mengembangkan kegiatan bidang jasa non klasifikasi, yaitu kegiatan usaha jasa konsultansi & supervisi. Sehingga saat ini kegiatan usaha BKI ada 2 (dua) kegiatan usaha, yaitu Kegiatan Usaha Jasa Klasifikasi & Statutoria dan Kegiatan Usaha Jasa Konsultansi & Supervisi.

Indonesian Classification Bureau, also is known as BKI is a State Owned Company established with a purpose to support industrial independence of national shipping industries and sea transportation through classification service and other services related. BKI in its service activities also doing research publicizes and applies technique standard (Rules & Regulation) by doing design activity, construction and maritime survey related to afloat facility, including ship. This standard compiled and released by BKI as technical publication. Rules & Regulation developed not only hull structure, but also covers safety equipments, installation of machinery and electricity.

Scopes of work of BKI is execute survey and certify to ensure that Rules & Regulation which has been developed, applied at the time of construction of new building ship and existing ship.To maintain condition of the ship, hence in process of ship is obliged to does maintenance and repair schedule, where this execution will be monitored always by BKI by doing periodic survey in maintaining its classification.

Judgement of ship condition is done based on professional and independent survey by class surveyor having competence in doing survey of ship condition. Result from this survey and assessment in the form of report and certificate taken as reference by interested parties, for example Ship owner, Insurance Company, Cargo Owner, charterer, Dockyard, The Government / Harbour master / PSC etc.

Business activity upon BKI incorporation is an activity in ship Classification sector (as a core business) where this business is a non profit oriented, but in line with BKI business development as a company, besides the abovementioned activities, BKI also makes a business diversification in developing non classification services, namely consultancy & supervision services. So that, BKI has currently 2 business segments, namely Classification & Statutory Business Activity and Consultancy & Supervision Business Activity.

Kegiatan Usaha Jasa Klasifikasi & Statutoria mencakup:
- Pemeriksaan konstruksi kapal, pengawasan dan pengujian serta penerbitan sertifikat kelas dan registrasi kapal.
- Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung dan fasilitas konstruksi lepas pantai.
- Pengujian dan sertifikasi material dan komponen.
- Pengujian dan penerbitan sertifikat kualifikasi juru las, inspektor las dan ahli las lainnya.
- Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi di bidang statutoria berdasarkan otorisasi dari pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintah negara lain.
- Bertindak sebagai agen dan atau mewakili klasifikasi asing / konsultan asing.
- Melaksanakan sertifikasi sesuai standar internasional.

Sedangkan Kegiatan Usaha Jasa Konsultansi & Supervisi mencakup :
- Jasa konsultansi & supervisi di bidang maritim dan industri serta teknik lainnya.
- Studi kelayakan di bidang teknologi maritim dan industri lainnya.
- Jasa inspeksi dan sertifikasi di bidang minyak, gas dan ketenaga kerjaan.
- Rekayasa teknik dan supervisi di bidang minyak dan gas.
- Pengujian DT dan NDT.
- Konsultansi sesuai standar nasional dan internasional.
- Pelatihan keahlian di bidang teknik.
- Tank cleaning & sludge processing.
- Pencegahan korosi.

Setelah beroperasi selama 44 tahun, BKI telah mencapai keberhasilan dan kondisi sebagai berikut :
- Berkantor pusat di Jakarta dan memiliki 21 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di 1 (satu) cabang di Singapore.
- Telah memiliki kerja sama dengan hampir semua badan klasifikasi asing anggota IACS.
- Menerbitkan Rules & Regulation di bidang klasifikasi kapal dan setiap tahun menerbitkan Register Kapal dan Register ISM Code & ISPS Code
- Telah mendapatkan pelimpahan tugas / wewenang dari Pemerintah Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan untuk melaksanakan survey dan sertifikasi statutoria.
- Telah mendapat penunjukan inspeksi dan sertifikasi dari Pemerintah cq Direktorat Jenderal Migas dan Departemen Tenaga Kerja.
- Telah menerapkan sistim manajemen mutu berdasarkan ISO 9001 : 2000 dan telah mendapatkan sertifikat mutu ISO 9001 : 2000 dari badan sertifikasi internasional.

Classification and Statutory services (core businesses), shall cover :
- *Surveying of ship construction, supervising and testing as well as issuing Class Certificate and Registering Ships;*
- *Inspecting and testing floating objects and off-shore construction facility;*
- *Testing and certifying Materials and Components;*
- *Testing and issuing qualification certificates of welders, welding inspector and any other welders;*
- *Surveying and certifying in Statutory matters based on the Authorization of the Government of the Republic of Indonesia and governments of any other states;*
- *Acting as an agent and/or representing Foreign Classification / Foreign Consultant; and*
- *Certifying in accordance with International standard.*

While, Consultancy & Supervision services shall cover:
- *Consultancy and Supervision services in Marine and industrial as well any other technical sectors;*
- *Feasibility Study in Maritime technology and any other Industrial sectors;*
- *Inspection & Certification services in Oil and Gas and Labour Sectors;*
- *Technical Engineering and Supervision in Oil and Gas sector;*
- *DT & NDT testing;*
- *Consultancy in accordance with National and International Standards;*
- *Technical public training;*
- *Tank Cleaning & slude processing*
- *Corrosion Prevention*

After operating for 44 years, BKI has attained the following:
- *Having its Head Office in Jakarta and 21 branch offices throughout Indonesia, including Singapore;*
- *Already cooperating with almost all foreign classification bodies being members of IACS;*
- *Issuing Rules & Regulation in Ship Classification and annually issuing Ship Register, ISM Code & ISPS Code Register;*
- *Already receiving delegation of authority from the Government of Indonesia cq. Directorate General of Sea Transportation for statutory survey & certification;*
- *Already receiving inspection and certification assignment from the Government cq. Directorate General of Oil and Natural Gas and Ministry of Manpower;*
- *Already applying quality management system based on ISO 9001:2000 and receiving Quality Certificate of ISO 9001:2000 from International Certification Body;*

" Mengutamakan terjaminnya keselamatan jiwa dan benda di laut serta perlindungan lingkungan melalui pengembangan dan pemeriksaan standar kapal serta fasilitas terkait lainnya."

" Giving priority the safety of life and any objects at sea as well as protecting the environment through development and inspection of ship standards and any other relevant facilities."

Visi & Misi Perusahaan
Company Vision & Mission

Visi Perusahaan

Menjadikan BKI sebagai perusahaan jasa teknik yang terpercaya dan terbaik dari segi kualitas produk, kualitas sumber daya manusia dan kinerja perusahaan.

Company Vision

Making BKI as a reliable and the best engineering company both from product quality, human resources quality and company''s performance.

Misi Perusahaan

- Mengutamakan terjaminnya keselamatan jiwa dan benda di laut serta perlindungan lingkungan melalui pengembangan dan pemeriksaan standar kapal serta fasilitas terkait lainnya.
- Pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan dengan Baik.
- Membentuk citra perusahaan bahwa jasa BKI dibutuhkan dan menjadi standar keselamatan dan kualitas.
- Memberikan kesempatan kepada para tenaga ahli kelautan nasional untuk berpartisipasi melalui pengembangan pengetahuan serta penerapannya.
- Membantu peningkatan pendapatan negara baik dalam bentuk Rupiah maupun valuta asing.

Company Mission

- *Giving priority the safety of life and any objects at sea as well as protecting the environment through development and inspection of ship standards and any other relevant facilities;*
- *Managing the company effectively and efficiently by applying a Good Corporate Governance;*
- *Forming corporate image that BKI services are required and serve as safety and quality standard;*
- *Giving opportunity to the national maritime experts to participate in knowledge development and application thereof; and*
- *Assisting in increasing state's revenues both in the form of Rupiah and foreign exchange.*

Kebijakan Mutu Perusahaan
Company Quality Policy

Sebagai perusahaan yang menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001:2000, BKI memiliki komitmen untuk memberikan kepuasan kepada pemakai jasa (customer satisfaction) dan terus melakukan penyempurnaan (continuous improvement). Kebijakan Mutu Perusahaan adalah **"mengutamakan pelayanan jasa bagi para pengguna jasa berdasarkan kepedulian yang tinggi terhadap masalah Keselamatan dan Mutu".**

*As a company applying quality management system based on ISO 9001:2000, BKI is committed to satisfy the customers and make a continuous improvement. Company's Quality Policy is **"giving priority to serve the customers with a high attention to Safety and Quality aspects"**.*

Dalam mewujudkan komitmen tersebut, BKI memiliki Nilai - nilai Perusahaan yang diterapkan pada seluruh jajaran organisasi, meliputi :

- Moto perusahaan "TERPERCAYA", yang berarti jasa yang diberikan adalah berkualitas, dapat diandalkan, efisien, tepat waktu dan memiliki reputasi.
- Nilai - nilai perusahaan yaitu Integritas, Profesionalisme, Kepuasan Pengguna Jasa, Kepemimpinan dan Penghargaan pada Karya / Prestasi Karyawan.
- Budaya Perusahaan "TERTIB" (Taqwa kepada Tuhan YME; Etos kerja yang tinggi; Reputasi yang senantiasa ditingkatkan; Tertib dalam menerapkan kebijakan manajemen dan sikap pribadi; Ilmu pengetahuan dan Teknologi yang dikuasai; Baik dalam pelayanan dan hasil kerja).

In realizing the commitment, BKI has Company's values applied to all organizational staff, covering:

- *Company's motto is "RELIABLE", means services given are quality, reliable, efficient, timely and reputable.*
- *Company's values are Integrity, Professionalism, Customer Satisfaction, Leadership and Reward to Employee's Performance.*
- *Company's culture is "TERTIB" (Devotion to the God; High work ethic; Improved reputation; being orderly in applying management's policy and personal attitude; Mastered science and technology; Good in service and work result).*

Manajemen BKI menjamin :

- Persyaratan mutu berorientasi kepada standar mutu Internasional sesuai dengan ISO 9001:2000 dan pemenuhan pencapaian sasaran mutu perusahaan serta senantiasa melakukan penyempurnaan yang menerus terhadap mutu.
- Penerapan Sistem Mutu dan nilai-nilai perusahaan tersebut dalam seluruh kegiatan jasa.
- Tanggap terhadap kebutuhan pemakai jasa / masyarakat umum dan mengutamakan kepuasan pelanggan dan aspek keselamatan.
- Semua personil selalu diberi pemahaman tentang sistem mutu melalui pelatihan yang berkesinambungan serta penerapan sistem mutu di dalam semua jajaran organisasi.

BKI management shall committed that:

- *Being oriented to international quality standard in accordance with ISO 9001:2000 requirements and fulfilling the attainment of company's quality objective as well as always continuously improving the quality.*
- *Applying quality system and the company's values in all service activities.*
- *Being responsive to the customers/public need and giving priority to the customer satisfaction and safety aspect.*
- *All personnel are always given understanding on quality system through a continuous training as well as quality system application to all organizational staff.*

Pemenuhan terhadap kebijakan, prosedur dan petunjuk kerja adalah hal yang mutlak dan mengikat bagi semua karyawan. Mutu adalah tanggung jawab semua karyawan yang bekerja di jajaran BKI.

Fulfillment of quality policy, procedures and instruction shall be imperative and bind all employees. Quality is responsible of all employees joining BKI.

" Perusahaan tetap mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan terpercaya, melaksanakan peningkatan kompetensi SDM secara berkesinambungan serta turut menyumbangkan dividen bagi Negara."

" The Company was still able to provide quality and reliable services, improve Human Resource (HR) competency continuously, and participate in contributing dividend to our Country."

Sambutan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Message

Dewan Komisaris memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita diberikan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas korporasi dalam melaksanakan visi dan misi perusahaan dengan baik di tahun 2008. Terlebih di tengah-tengah perekonomian yang mulai mengalami perlambatan sebagai dampak krisis finansial global di penghujung tahun 2008, perusahaan tetap mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan terpercaya, melaksanakan peningkatan kompetensi SDM secara berkesinambungan serta turut menyumbangkan dividen bagi Negara.

Dewan Komisaris mencatat beberapa kondisieksternal dan internal yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi jalannya pengelolaan perusahaan di tahun 2008. Dampak dari Inpres No.5 tahun 2005 dan Permenhub No. KM. 20 Tahun 2006 dan sosialisasi peraturan serta tatap muka dengan *stakeholders* yang terus dilaksanakan oleh manajemen, dirasakan mampu meningkatkan pangsa pasar dan bermanfaat untuk mencapai kualitas layanan yang lebih prima. Kondisi perekonomian di tahun 2008 terutama inflasi menjadi salah satu pertimbangan manajemen untuk melaksanakan penyesuaian tarif jasa klasifikasi di dalam negeri yang belum pernah mengalami kenaikan sejak tahun 2003. Kebijakan penyesuaian tarif tersebut juga menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari untuk dapat mendukung kesinambungan pengembangan kompetensi SDM dan inovasi layanan yang dilakukan seperti layanan informasi survey maupun *drawing approval* secara on line. Tentunya masih banyak lagi hal-hal penting yang telah dilalui di tahun 2008, dan Dewan Komisaris sangat meyakini kesemuanya itu telah mendorong kita dalam proses pembelajaran menuju ke arah yang lebih baik. Penerapan budaya pembelajaran di setiap lini perusahaan akan sangat menentukan bagi perkembangan usaha dan peningkatan nilai tambah perusahaan.

Board of Commissioners should extend gratitude to God the Almighty, Who has endowed His blessing to us, so that we are able to perform corporate duties in implementing the Company's vision and mission in a well manner in 2008. Furthermore, amid the economics that begins to slow down due to the impact global financial crisis at the end of 2008, the Company was still able to provide quality and reliable services, improve Human Resource (HR) competency continuously, and participate in contributing dividend to our Country.

Board of Commissioners noted several internal and external conditions that significantly affected the course of management of the Company in 2008. The impact of Inpres (Presidential Instruction) No. 5 Year 2005 and Permenhub (Regulation of Minister of Transportation) No. KM. 20 Year 2006 and regulation socialization as well as face-to-face meeting with stakeholders conducted continuously by the management are considered as being able to increase market share and are useful to achieve a better first-rate services. Economic condition in 2008, especially that relating to inflation, has been one of the management's considerations to conduct adjustment to domestic classification service tariff, which has never been increased since 2003. Such policy on tariff adjustment also becomes an unavoidable choice in order to back the continuity of development of Human Resource (HR) competency and innovation of services, such as on line survey information service and drawing approval. Of course there still many other important things conducted in 2008, and Board of Commissioners highly believes that all have encouraged us in the learning process towards betterness. The application of learning culture in every front of the Company will be very critical for business progress and improvement of the Company's added value.

Atas upaya seluruh jajaran PT Biro Klasifikasi Indonesia di tahun 2008 dan dukungan kepercayaan dari seluruh *stakeholders*, perusahaan telah berhasil meningkatkan produksi, laba usaha, dan laba sebelum pajak dibanding prestasi kinerja yang sama pada tahun 2007, dengan hasil audit laporan keuangan yang menyatakan wajar dalam semua hal yang material. Secara umum, rencana kerja yang telah ditetapkan dalam RKAP dapat terlaksana dengan baik, dan target kinerja produksi dan kinerja keuangan yang ditetapkan Pemegang Saham dapat terlampaui di tahun 2008. Pencapaian kinerja ini tentunya tidak harus membuat kita untuk cepat berpuas diri, melainkan seharusnya menumbuhkan keyakinan bagi kita bahwa sebenarnya masih banyak peluang yang terbuka untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan karyawan dan laba bersih di masa-masa mendatang. Untuk itu, kita harus saling bahu membahu, melakukan langkah-langkah yang tepat dan perhitungan yang cermat dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada, terutama peluang yang sangat luas di bidang konsultansi dan supervisi.

Dalam kesempatan ini, Dewan Komisaris menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh jajaran Direksi beserta segenap karyawan PT Biro Klasifikasi Indonesia atas peran serta dan upayanya dalam merealisasikan kinerja di tahun 2008. Kepada Pemegang Saham yang telah memberikan kepercayaan dan senantiasa memberikan saran dan arahan dalam pengelolaan perusahaan, Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih. Hubungan dan komunikasi baik yang telah tercipta dengan Pemegang Saham dan seluruh jajaran manajemen, dirasakan sangat mendukung Dewan Komisaris untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Akhirnya sebagai penutup, Dewan Komisaris berharap agar di tahun-tahun mendatang meskipun prediksi lingkungan ekonomi domestik kurang menguntungkan akibat dampak krisis ekonomi global yang belum kunjung pulih, kinerja perusahaan yang sangat baik yang telah kita capai selama ini tetap dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan sebagai tantangan untuk menjadikan tahun yang lebih baik lagi bagi kita semua. Komitmen dan kerja keras manajemen dan seluruh jajaran PT Biro Klasifikasi Indonesia dalam memenuhi kebijakan, prosedur dan petunjuk kerja serta pelayanan prima kepada pelanggan dan *concern* kepada semua pihak yang berkepentingan, mutlak perlu untuk terus kita laksanakan guna mencapai keberhasilan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua.Amin.

a.n. Dewan Komisaris
PT Biro Klasifikasi Indonesia

Komisaris Utama

Capt.Albert Lapian

Due to the efforts made by all personnel within PT Biro Klasifikasi Indonesia in 2008 and support of trust from all stakeholders, the Company has successfully increased production, operating revenue, and profit before tax compared with the same achievement performance in 2007, with the financial statement audit result stating it was reasonable in all material things. In general, the work plan stipulated in RKAP can be well implemented, and the target of production performance and financial performance stipulated by Shareholders could be surpassed in 2008. This performance achievement should not of course make us satisfied soon, but it should grow our confidence that indeed many opportunities are still open to improve productivity, employees' welfare and net profit in the future. In view of that, we must help each other, take appropriate steps, and make careful calculation in utilizing every existing opportunity, especially the very wide opportunity in the field of consultation and supervision.

In this occasion, Board of Commissioners expresses gratitude and high appreciation to all members of Board of Directors together with all employees of PT Biro Klasifikasi Indonesia for their role and efforts of realizing the performance in 2008. To Shareholders that have given trust and always given advice and direction in the management of the Company, Board of Commissioners should also be grateful. Good relation and communication with Shareholders and all members of the management, is considered as having been a support for Board of Commissioners to be able to perform its duties and responsibility in a well manner.

To conclude, Board of Commissioners hopes that in the coming years, in spite of the prediction that the domestic economic environment will not be very favorable due to the impact of global economic crisis that has not recovered, the Company's very good performance we have attained so far can be retained and even increased as a challenge to make a better year for all of us. Commitment and hard work of the management and all personnel of PT. Indonesian Classification Bureau in complying with the policy, procedure and work direction as well as first-rate service to customers and the concern to all stakeholders, are unconditionally necessary for us to perform continuously in order to achieve a success. May God the Almighty always bless us. Amen.

on Behalf on Board of Commissioners of
PT. Biro Klasifikasi Indonesia

President Commissioners

Capt. Albert Lapian

" Secara umum, rencana kerja yang telah ditetapkan dalam RKAP dapat terlaksana dengan baik dan target kinerja produksi dan kinerja keuangan yang ditetapkan Pemegang Saham dapat terlampaui di tahun 2008."

" In general, the work plan stipulated in RKAP can be well implemented, and the target of production performance and financial performance stipulated by Shareholders could be surpassed in 2008."

Profil Komisaris
Commissioners Profile

Susunan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP.20/MBU/2004 tanggal 3 Maret 2004, adalah sebagai berikut :

Composition of Board of Commissioners by virtue of Decree of the Minister of State-Owned Corporations No. KEP.20/MBU/2004 dated March 3, 2004 shall be as folows:

Capt. Albert Lapian

Komisaris Utama;
Usia 63 tahun, Pendidikan : Mualim I Pelayaran Besar (1970), ANT I (2001), Master Mariner (2005);
Pengalaman : Pertamina Perkapalan (1971-1975), National Bulk Carrier (1975-1976), PT.KS Kallog (1976-1978), PT.Sumber Mas Indah Plywood (1978-1979), Departemen Perhubungan (1980-2005).

President Commissioner;
63 years old, Education : Ocean Going Shipping 1st Navigator (1970), ANT I (2001), Master Mariner (2005); Experience : Pertamina Perkapalan (1971-1975), National Bulk Carrier (1975-1976), PT.KS Kallog (1976-1978), PT.Sumber Mas Indah Plywood (1978-1979), Ministry of Communication (1980-2005).

Drs. Boediarso Teguh Widodo, MSi

Komisaris;
Usia 50 tahun; Pendidikan : S1 Ekonomi Undip Semarang (1982), Magister Perencanaan & Kebijakan Publik FE UI (2005);
Pengalaman : Departemen Keuangan, terakhir menjabat Direktur Penyusunan APBN sejak 2004.

Commissioner;
50 years old; Education : S1 Ekonomi Undip Semarang (1982), Master of Public Planning & Policy of FE UI (2005); Experience : Ministry of Finance, recently occupying the position of the Director of National Budget Planning as of 2004.

Drs. Achmad Chotibudin, MM

Komisaris;
Usia 60 tahun; Pendidikan : S1 STIA LAN Jakarta (1982), MM Univ. Setiagama (1995),
Pengalaman : Departemen Keuangan (1973-2005).

Commissioner;
60 years old; Education : S1 STIA LAN Jakarta (1982), MM Univ. Setiagama (1995), Experience : Ministry of Finance (1973-2005).

" Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari kerja keras seluruh jajaran BKI dan dukungan para pemangku kepentingan terkait seperti INSA, GAPASDAP, dan IPERINDO yang secara konsisten memberikan aspirasi positif dan suasana kondusif untuk mendorong kemajuan BKI."

" This success is certainly not separable from the hard work of all members of BKI and support from stakeholders such as INSA, GAPASDAP, and IPERINDO, which have consistently given positive hope and favorable atmosphere to encourage the progress of BKI."

Sambutan Direktur Utama
President Director Massage

BKI menyambut tahun 2008 sebagai tahun yang penuh optimisme dan harapan, khususnya bagi kalangan industri perkapalan dan pelayaran Nasional. Tiga tahun sudah Inpres Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional berjalan, industri perkapalan dan pelayaran Nasional pun perlahan mulai bangkit walaupun belum secepat yang diharapkan. Bukan itu saja, di tahun 2008 ini Undang-undang Pelayaran yang baru, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 juga disahkan, dan babak baru percaturan bidang maritim pun dimulai. Jauh hari BKI telah menyiapkan diri menyongsong perubahan yang akan datang seiring waktu berlakunya Inpres No. 5/2005 dan Undang-undang Pelayaran yang baru ini. SDM, perangkat lunak dan perangkat keras, serta sistem operasi berbasis Teknologi Informasi pun disiapkan mengantisipasi peningkatan permintaan survey dan audit maupun jasa bidang konsultansi dan supervisi.

Tidak berlebihan rasanya bila kita menyebut tahun 2008 sebagai tahun peluang dan kemajuan. Beberapa kemajuan penting baik eksternal maupun internal berhasil dicapai BKI. Dalam kancah internasional BKI memperbarui Perjanjian Kerjasama dengan Korean Register of Shipping (KR), Korsel dan Nippon Kaiji Kyokai (NK), Jepang. Nilai tambah yang didapat dari Pembaruan Perjanjian Kerjasama ini adalah baik KR maupun NK setuju untuk memberlakukan tarif dual class 100 % dengan BKI, artinya keluhan sebagian pemakai jasa bahwa dual class BKI memunculkan biaya ekstra tidak terjadi lagi. Di sisi lain ini juga menjadikan semakin bertambahnya badan klasifikasi partner anggota IACS yang memberlakukan tarif dual class 100 % menyusul Germanischer Lloyd (GL), China Classification Society (CCS), dan Registro Italiano Navale (RINA). Di tahun 2008 ini pula walaupun tanpa revisi Perjanjian Kerjasama, American Bureau of Shipping (ABS) juga menyatakan persetujuannya untuk memberikan tarif 100 % dual class BKI-ABS.

Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari kerja keras seluruh jajaran BKI dan dukungan para pemangku kepentingan terkait seperti INSA, GAPASDAP, dan IPERINDO yang secara konsisten memberikan aspirasi positif dan suasana kondusif untuk mendorong kemajuan BKI.

BKI welcomes the year 2008 as a year that is full of optimism and hope, especially for realm of National shipping and shipment industry. Three years have passed since the Presidential Instruction (Inpres) Number 5 Year 2005 regarding Empowerment of National Shipping Industry was imposed, the National shipping and shipment industry has also begun to awake although it is not as swiftly as expected. Not only that, in this 2008, a new Law on Shipping, Law Number 17 Year 2008 was also enacted, and a new era in the discussion on maritime field has commenced. Long before, BKI has prepared itself to welcome changes that will come in line with the imposition of the Presidential Instruction (Inpres) No. 5/2005 and this new Law on Shipping. Human Resource (HR), software and hardware, and Information Technology-based operation system has been prepared to anticipate the increase in demand for survey and audit as well as services in the field of Consultation and supervision.

It is not an overstatement if we name year 2008 as a year of opportunity and advancement. Several important internal and external advancements have been successfully attained by BKI. In the international arena, BKI has renewed Cooperation Agreement with Korean Register of Shipping (KR), South Korea and Nippon Kaiji Kyokai (NK), Japan. The added value obtained from the Renewal of this Cooperation Agreement is that both KR and NK have agreed to impose 100% dual class tariff with BKI, meaning that complaints from some service users that the BKI dual class gives rise to extra cost will no longer occur. On the other hand, this has also increased the number of partner classification agencies of IACS members that impose 100% dual class tariff following Germanischer Lloyd (GL), China Classification Society (CCS), and Registro Italiano Navale (RINA). Also in this 2008, even though without revision to Cooperation Agreement, American Bureau of Shipping (ABS) also expressed its approval to give 100% dual class tariff of BKI-ABS.

This success is certainly not separable from the hard work of all members of BKI and support from stakeholders such as INSA, GAPASDAP, and IPERINDO, which have consistently given positive hope and favorable atmosphere to encourage the progress of BKI.

Kemajuan dalam lingkup internasional lain yang juga patut dicatat adalah BKI diakui sebagai anggota penuh dalam Asian Classification Society Executive Meeting (ACS), suatu forum bergengsi tempat berkumpul dan berdiskusinya para pimpinan badan klasifikasi di Asia, NK, CCS, KR, dan IRS. Ini merupakan suatu prestasi tersendiri karena dengan pengakuan badan-badan klasifikasi internasional di kawasan Asia bukan saja mengakui eksistensi tetapi juga profesionalisme dan dedikasi BKI di bidang klasifikasi.

Ke dalam BKI juga mengimplementasikan berbagai program pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan in-house training antara lain untuk sosialisasi penerapan Financial Operation System (FinOps), refreshing dan up grading course bidang Statutoria, serta serangkaian program training Surveyor dari level Asisten hingga Senior Surveyor. Di samping itu BKI juga mengirimkan kandidat terbaiknya untuk tugas belajar ke Maritime University di Malmo, Swedia dan ke KR maupun NK dalam kerangka kerjasama diklat diantara kedua badan klasifikasi. Dari sisi usaha klasifikasi, jumlah kapal yang tercatat dalam Register kapal BKI pada akhir tahun 2008 sebanyak 11.281 unit dengan total 11.561.461 GT dibandingkan tahun 2007 yang berjumlah 10.601 unit atau 10.524.808 GT.

Pada bidang Riset dan Pengembangan, BKI melakukan penyempurnaan Instruction to Surveyor Part A untuk bidang Klasifikasi dan Instruction to Surveyor Part B untuk bidang Statutoria, menerbitkan Rules for Hull (Volume II), Rules for Classification and Survey (Volume I) edisi Bahasa Indoneneia, dan Rules for Industrial Services. Kesemuanya dipublikasikan dan dapat di-down load melalui website BKI www.klasifikasiindonesia.com. Satlitbang BKI juga menjalin kerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya dan Universitas Hasanuddin Makassar dalam rangka pengembangan Rules dan aplikasi perhitungan stabilitas, kekuatan konstruksi, dan lain-lain.

Dalam bidang Konsultansi dan Supervisi, BKI terus mengembangkan bidang Migas dengan meningkatkan kepercayaan inspeksi dan sertifikasi proyek untuk pekerjan-pekerjaan SKKP Pressure Vessel, Crane, Rotating Equipment, Electrical Equipment, Pipeline, Storage Tank, dan SKPI.

Kondisi sosial dan perekonomian nasional selama 2008 yang relatif stabil dan cukup kondusif menjadikan BKI mampu mempertahankan tingkat kesehatan kinerja keuangannya. Realisasi pendapatan kotor meningkat dari Rp 163.281.553,- milyar pada tahun 2007 menjadi Rp 196.991.080,- milyar, yang berasal dari sektor jasa klasifikasi sebesar Rp 119.625.912,- milyar atau naik 17,17% dan sektor jasa konsultansi dan supervisi sebesar Rp 77.365.168,- milyar atau naik 26,45%. Sementara untuk realisasi laba setelah pajak mencapai Rp 17.157.737,- milyar atau sedikit di atas tahun sebelumnya yang sebesar Rp 16.670.155,- milyar. Kecilnya angka peningkatan laba bersih ini tidak terlepas dari akibat kenaikan biaya operasional Perusahaan yang terimbas kenaikan harga BBM yang dilakukan Pemerintah.

Other progress within international scope that is also worth noted is that BKI was admitted as a full member of Asian Classification Society Executive Meeting (ACS), a prestigious forum where the leaders of classification agencies in Asia, NK, CCS, KR, and IRS gather and have discussion. This is a special achievement because by this acknowledgement, the international classification agencies within Asian territory not only acknowledge the existence but also professionalism and dedication of BKI in the field of classification.

Internally, BKI also implement various programs of advancement and improvement of Human Resource (HR) competency through the organization of in-house training for, among others, socialization of Financial Operation System (FinOps) application, refreshing, and up grading course in the field of Statutory, and a series of training programs for Surveyor from the level Assistant to Senior Surveyor. In addition, BKI also sends its best candidate for study assignment to Maritime University in Malmo, Sweden and to KR or NK in the framework of education and training cooperation between both classification agencies. From the aspect of classification business, the number of ships recorded in Register of ships of BKI at the end of 2008 is as many as 11,281 units at a total of 11,561,461 GT compared with that of 2007 totaling to 10,601 units or 10,524,808 GT.

In the field of Research and Development, BKI conducts improvement of Instruction to Surveyor Part A for the field of Classification and Instruction to Surveyor Part B for the field of Statutory, issuing Rules for Hull (Volume II), Rules for Classification and Survey (Volume I) Bahasa Indonesia edition, and Rules for Industrial Services. All are published and can be downloaded through BKI's website www.classificationindonesia.com. Research and Development Unit (Satlitbang) of BKI also conducts cooperation with Sepuluh November Institute of Technology Surabaya and Hasanuddin University Makassar in the framework of developing Rules and application of stability calculation, construction strength, and so on.

In the field of Consultation and Supervision, BKI continuously develops the field of Oil and Gas (Migas) by improving inspection reliability and project certification for the works of SKKP Pressure Vessel, Crane, Rotating Equipment, Electrical Equipment, Pipeline, Storage Tank, and SKPI.

Relatively stable and favorable national socio-economic condition during 2008 has made it possible for BKI to be able to retain the level its financial performance. Realization of gross revenue increased from Rp 163,281,553 billion in 2007 to Rp 196,991,080 billion, generated from the sector of Classification service amounting to Rp 119,625,912 billion or an increase of 17.17% and sector of Consultation and Supervision service amoutnign to Rp 77,365,168 billion or an increase of 26.45%. Meanwhile, the realization of profit after tax reached Rp 17,157,737 billion or a little bit above that of the previous year, amounting to Rp 16,670,155 billion. This little increase in net profit is due to the increase in operating cost of the Company, which was affected by the increase in fuel (BBM) price made by the Government.

Berdasarkan standard penilaian Kementerian BUMN dan hasil audit Kantor Akuntan Publik, BKI kembali dapat mempertahankan tingkat kinerja manajemen "Sehat AAA" untuk keempat kalianya secara berturut-turut. Keberhasilan ini tidak terlepas dari angka Net Return on Equity (Net ROE) yang mencapai 30,04 % dan Net Return on Asset (ROA) yang mencapai 23,30 %. Bila dibandingkan suku bunga bank yang berlaku pada akhir 2008 sebesar 8 – 11% per tahun, angka-angka ini menunjukkan kinerja manajemen dalam memaksimalkan keuntungan untuk pemegang saham atau terhadap total asset secara umum cukup baik.

Melihat apa yang berhasil kita raih, sudah sepantasnyalah kita mengucap syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kasih-sayang, pentunjuk, lindungan, dan restuNya sehingga BKI dapat merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2008 dengan hasil yang baik.

Mewakili manajemen, staf, dan karyawan BKI pertama-tama kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Menteri Negara BUMN c.q. Deputi Menteri bidang Logistik dan Pariwisata beserta jajarannya serta kepada Menteri Perhubungan c.q. Dirjen Perhubungan Laut beserta jajarannya atas segala bantuan, dukungan, dan arahan yang diberikan.

Penghargaan dan terima kasih kami sampaikan juga kepada Dewan Komisaris yang selalu siap memberikan masukan, arahan, dan koreksi serta berperan sebagai mitra kerja yang konstruktif sehingga Perusahaan dapat merealisasikan program kerjanya dan memberikan kontribusi positif kepada Bangsa dan Negara.

Kepada seluruh karyawan dan karyawati BKI di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang, Direksi juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala sumbangsih, loyalitas, dan pengabdian yang diberikan melalui darma baktinya masing-masing dalam ikut mensukseskan realisasi program kerja Perusahaan.

Mengakhiri pesan ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para stakeholders / pemangku kepentingan atas segala dukungan, bantuan, dan partisipasinya dalam ikut memberdayakan dan memajukan BKI.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi niat baik dan usaha kita.

A.n Direksi
Direktur Utama

Muchtar Ali

Based on assessment standard of Ministry of BUMN (State-owned Enterprise) and audit result by Office of Public Accountant,BKI was again able to retain the level of management performance of "Favorable AAA" for four consecutive times. This success is inseparable from the Net Return on Equity (Net ROE) reaching 30.04% and Net Return On Asset (ROA) reaching 23.30%. Compared with the bank interest rate valid at the end of 2008 at 8–11% per annum, these figures show that the management performance in maximizing the profit for Shareholders or to the total asset is generally satisfactorily.

Seeing what we have successfully reached, naturally, we should extend gratitude to God the Almighty for His blessing, affection, guidance, and protection so that BKI can realize the Company's Work Plan and Budget of 2008 with good result.

Representing the management, staff, and employees of BKI, first of all we would like to express appreciation and gratitude to Minister of State for BUMN (State-owned Enterprise) c.q. Deputy Minister of Logistic and Tourism field together with its circle and to Minister of Transportation c.q. Director General of Sea Transportation together with its circle for all assistances, support, and direction they have provided.

We also extend appreciation and gratitude to Board of Commissioners, who is always prepared to give input, direction, and correction, and play the role as a constructive work partner, so the Company is able to realize its work program and give positive contribution to the State and Nation.

To all employees of BKI at the Head Office or Branch Office, Board of Directors also wishes to extend gratitude and appreciation for all contribution, loyalty, and dedication given through their respective services rendered in getting involved in making the Company's work program realization a success.

To end this message, we would also like to extend gratitude and appreciation to stakeholders for all support, assistance, and participation in getting involved in empowering and advancing BKI.

May Allah SWT always bless out good faith and effort.

On Behalf of Board of Directors
President Director

Muchtar Ali

" Ini merupakan suatu prestasi tersendiri karena dengan pengakuan badan-badan klasifikasi internasional di kawasan Asia bukan saja mengakui eksistensi tetapi juga profesionalisme dan dedikasi BKI di bidang klasifikasi."

" This is a special achievement because by this acknowledgement, the international classification agencies within Asian territory not only acknowledge the existence but also professionalism and dedication of BKI in the field of classification."

Profil Direksi
Board of Directors Profile

Ir. Muchtar Ali

Direktur Utama;
Usia 66 tahun, Pendidikan : S1 Teknik Perkapalan Unhas Makassar (1965), S2 Manajemen/SDM STIE-ISM Jakarta; Pengalaman : PT.Trihasta (1965-1966), PT.Biro Klasifikasi Indonesia (1966-sekarang), Direktur Teknik (1999-2004), Direktur Utama (2004-sekarang).

President Director;
66 years old, Education: Master of Shipping Engineering Unhas Makassar (1965), S2 of Management/Human Resources STIE-ISM Jakarta; Experience : PT.Trihasta (1965-1966), PT.Biro Klasifikasi Indonesia (1966-now), Director of Technique (1999-2004), President Director (2004-now).

Ir. Haryanto

Direktur Teknik;
Usia 62 tahun; Pendidikan : S1 Teknik Perkapalan ITS Surabaya (1974); Pengalaman : PT.Biro Klasifikasi Indonesia (1974-sekarang), Direktur Teknik (2004-sekarang).

Director of Engineering;
62 years old; Education : Master of Shipping Engineering ITS Surabaya (1974); Experience : PT.Biro Klasifikasi Indonesia (1974-now), Director of Engineering (2004-now).

Ir. Wibisono

Direktur Usaha;
Usia 54 tahun; Pendidikan : S1 Teknik Perkapalan ITS Surabaya (1977), S2 Manajemen STIE IPWI; Pengalaman : PT.Biro Klasifikasi Indonesia (1982-sekarang), Direktur Usaha (2004-sekarang).

Director of Business;
54 years old; Education : Master of Shipping Engineering ITS Surabaya (1977), S2 of Management STIE IPWI; Experience : PT.Biro Klasifikasi Indonesia (1982-now), Director of Business (2004-now).

Drs. Donny S. Purba

Direktur Keuangan & Personalia;
Usia 63 tahun, Pendidikan : S1 Ekonomi UI (1979), Diplome Program in Financial Studies, Stratchclyde University (1985); Pengalaman : Departemen Keuangan (1981-1998), Kantor Menteri Negara BUMN (1998-1999), Direktur Keuangan & Personalia (1999-sekarang).

Director of Finance & Personnel,;
63 years old, Education : Master of Economy UI (1979), Diploma Program in Financial Studies, Stratchclyde University (1985); Experience : Ministry of Finance (1981-1998), Office of the State Minister for State-Owned Corporations (1998-1999), Director of Finance & Personnel (1999-now).

" Aktifitas Manajemen dilakukan sesuai dengan arah pengembangan perusahaan, antara lain melakukan komunikasi dan edukasi para stakeholder/asosiasi/pemakai jasa, meningkatkan kerjasama (baik Domestik maupun Internasional) dan koordinasi internal dalam rangka meningkatkan eksistensi perusahaan."

" Management Activities undertaken in accordance with the direction of the company, among others, communication and education to stakeholders/ associations/customers,increased cooperation (both Domestic and International) and internal coordination in order to increase th company's existence."

Aktifitas Manajemen
Management Activity

Kunjungan Tim Expert Bidang Pengelasan dari Jepang & Departemen Perindustrian
Perhatian instansi Pemerintah bidang industri terhadap BKI cukup besar, ini terlihat dari kunjungan tim ahli pengelasan Departemen Perindustrian bersama delegasi dari Jepang untuk meninjau fasilitas laboratorium pengelasan BKI. Dalam kunjungan itu disepakat bahwa BKI perlu memiliki fasilitas laboratorium pengelasan yang representative untuk mendukung kegiatan bidang klasifikasi dan jasa teknik lainnya

Visit of Expert Team of Welding Field from Japan & Ministry of Industry
The attention of Government agency of industry field on BKI is sufficiently substantial. This can be seen from the visit made by welding expert team of Ministry of Industry together with delegates from Japan to reconnoiter the facility of welding laboratory of BKI. During the visit, it was agreed that BKI needs to maintain a representative facility of welding laboratory to support the activity in the field of Classification and other engineering services.

Kerjasama Diklat Bidang Marine dengan Bank Mandiri dan Bank BRI
Dalam rangka mensukseskan implementasi INPRES Nomor 5 Tahun 2005 tentang Permberdayaan Industri Pelayaran Nasional, BKI berinisiatif menjalin kerjasama dengan Bank Mandiri dan Bank BRI sebagai institusi pembiayaan yang berperan penting mendorong bangkitnya industri pelayaran nasional. Melalui kerjasama diklat seperti ini diharapkan kalangan perbankan akan lebih mamahami tugas dan peranan badan klasifikasi serta aspek teknis yang diperlukan dalam menilai kelaikan pembiayaan kapal.

Cooperation with Bank Mandiri and Bank BRI on Education and Training in the Field of Marine
In the framework of making a success of the implementation of Presidential Instruction (INPRES) Number 5 of 2005 regarding Empowerment of National Shipping Industry, BKI has the initiative to cooperate with Bank Mandiri and Bank BRI as financing institutions having important role in encouraging the awakening of the national shipping industry. Through this education and training cooperation, it is expected that bank circle will have better understanding about the duties and role of classification agencies as well as technical aspects required for assessing feasibility of ship financing.

Kerjasama Diklat Owner Surveyor dengan ASDP Indonesia Ferry
Dalam kerangka sinergi antar BUMN, BKI bekerjasama dengan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyelenggarakan In-house Training Owner Surveyor di Hotel NAM Center, Kemayoran, Jakarta.

Education and Training Cooperation between Owner Surveyor and ASDP Indonesia Ferry
In the framework of making a synergy among BUMN (State-owned Enterprises), BKI in cooperation with PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) held an In-house Training Owner Surveyor at Hotel NAM Center, Kemayoran, Jakarta.


Kerjasama Diklat Perbengkelan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran BKI – Direktorat Kenavigasian Ditjen Hubla
Selain dengan sektor swasta, Manajemen BKI juga mengembangkan kerjasama diklat dengan instansi Pemerintah seperti Diklat Perbengkelan SBNP Direktorat Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut. Di samping itu dalam bidant Litbang BKI juga menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi terkemuka seperti ITS Surabaya, Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Dharma Persada, Jakarta dan lain-lain.

Education and Training Cooperation on Repair Shop of Shipping Navigation Auxiliary Facility between BKI and Directorate of Navigation of Directorate General of Sea Transportation
In addition to cooperation with private sector, the Management of BKI also develops education and training cooperation with Government agencies, like Education and Training on Repair Shop of SBNP (Shipping Navigation Auxiliary Facility) Directorate of Navigation, Directorate General of Sea Transportation. In addition, in the field of Research and Development, BKI cooperates with a number of prominent universities like ITS Surabaya, Hasanuddin University Makassar, Dharma Persada University Jakarta, and so on.


Site Visit Peserta Marine Underwriter Course
Manajemen BKI terus membina hubungan baik dengan para mitra kerja dan pemakai jasa, diantaranya adalah dengan menerima kunjungan dan berdialog dengan para peserta Kursus Marine Underwriter Specialist yang mengunjungi BKI dalam bulan November 2008. BKI mengadakan pertemuan secara berkala untuk mensosialisasikan tugas dan peranan BKI dalam bidang Klasifikasi dan Konsultansi dan Supervisi serta menyerap berbagai masukan dan aspirasi yang konstruktif dari para pemangku kepentingannya.

Site Visit by Participants of Marine Underwriter Course
The Management of BKI continuously develops good relation with work partners and service users by, among others, accepting the visit and having a dialog with Marine Underwriter Specialist Course participants visiting BKI in November 2008. BKI holds a periodic meeting to socialize the duties and roles of BKI in the field of Classification and Consultation and Supervision and take various constructive inputs and desires of its stakeholders.


Pembaruan Kerjasama BKI – Korean Register dan Seminar Teknik BKI - KR
Hal penting yang perlu dicatat adalah dalam bulan Maret 2008 BKI melakukan pembaruan Perjanjian Kerjasama Mutual Representatives dengan Korean Register of Shipping (KR) bertempat di Kantor Pusat BKI, Jakarta. Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani ini merupakan pembaruan dari perjanjian sebelumnya yang antara lain berisi kesepakatan tariff Dual Class 100 persen dan dukungan KR untuk pengembangan diklat SDM BKI dan bidang Konsultansi dan Supervisi. Selain melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama, delegasi KR yang dipimpin oleh Chairman dan CEO-nya itu juga memberikan Seminar Teknik untuk memaparkan perkembangan terkini dalam teknologi dan peraturan bidang klasifikasi.

Renewal of Cooperation BKI - Korean Register, and Engineering Seminar BKI - KR
An important thing worth noted is that in March 2008 BKI renewed the Cooperation Agreement on Mutual Representatives with Korean Register of Shipping (KR) taking place at Head Office of BKI, Jakarta. This signed Cooperation Agreement is a renewal of the previous agreement, which contains, among others, agreement on 100% Dual Class tariff and support of KR for the development of education and training of Human Resource (HR) of BKI and the field of Consultation and Supervision. In addition to signing a Cooperation Agreement, delegates of KR led by its Chairman and CEO also provided an Engineering Seminar to expose the latest development in technology and regulation in the field of Classification.



Kunjungan ke Kantor Pusat Germanischer Lloyd dan galangan Jos L. Meyer
Berkaitan dengan kerjasama yang telah terjalin sejak awal berdirinya BKI dengan Germanischer Lloyd (GL)—badan klasifikasi nasional Jerman, Direksi BKI juga melakukan kunjungan ke Kantor Pusat GL di Hamburg. Issu penting yang dibahas dalam pertemuan itu selain kerjasama bilateral kedua badan klasifikasi, juga mengenai program diklat SDM BKI di Training Center GL. Dalam kesempatan perjalanan dinas ke Jerman itu Direksi BKI juga meninjau penyelesaian pembangunan Kapal ke 24 milik Pemerintah RI yang tengah dibangun di Galangan Jos L. Meyer, Pepenburg, Jerman. Dalam pembagunan Kapal ke 24 yang kemudian diberi nama KM Gunung Dempo itu BKI bertindak sebagai Konsultan Pengawas Pembangunan dan Badan Klasifikasi.

Visit to Head Office of Germanischer Lloyd and shipyard of Jos L. Meyer
Relating to the cooperation with German national Germanischer Lloyd (GL)—classification agencies since early incorporation of BKI, Board of Directors of BKI also visited the Head Office of GL in Hamburg. An important issue discussed in the meeting was, in addition to bilateral cooperation of both classification agencies, about education and training program for Human Resource (HR) of BKI at GL's Training Center. In that occasion of official trip to Germany, the Board of Directors of BKI also reconnoiter the completion of construction of the 24th Ship owned by the Government of the Republic of Indonesia, which was underconstruction at Shipyard of Jos L. Meyer, Pepenburg, Germany. In the construction of that 24th Ship which was then named KM Gunung Dempo, BKI acted as Consultant of Supervisor of Construction and Classification Agency.


Pembaruan Perjanjian Kerjasama BKI – Nippon Kaiji Kyokai
Saat penting lain dalam kaitan kerjasama dengan badan klasifikasi internasional yang terjadi dalam tahun 2008 adalah pembaruan Perjanjian Kerjasama antara BKI dengan Nippon Kaiji Kyokai (NK), badan klasifikasi nasional Jepang di Tokyo. Dalam Perjanjian Kerjasama yang baru itu kedua pihak penyepakati pemberlakuan tariff Dual Class 100 persen, disamping itu pihak NK juga sepakat untuk terus memberikan dukungan pengembangan SDM BKI melalui training di NK Training Center.

Renewal of Cooperation Agreement of BKI – Nippon Kaiji Kyokai
Another important moment in relation to cooperation with international classification agencies occurred in 2008 was renewal of Cooperation Agreement between BKI and Nippon Kaiji Kyokai (NK), a Japan national classification agency, in Tokyo. In that new Cooperation Agreement, both parties agreed on the imposition of 100% Dual Class tariff. In addition, NK also agreed to continue providing support of Human Resource development (HR) of BKI through training at NK Training Center.

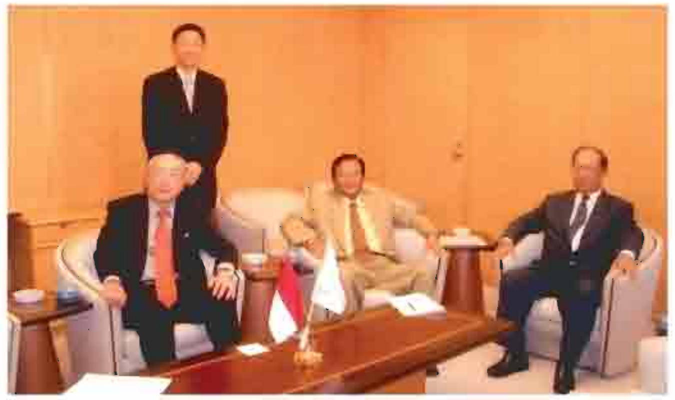

Penandatanganan Kerjasama Perwakilan Pemasaran BKI di Syria
Dalam upaya menjajagi pengembangan pasar di luar negeri khususnya kawasan Timur Tengah, BKI menjalin kerjasama dengan Syrindo Maritime Shipping Services, Syria untuk pembukaan kantor perwakilan pemasaran di kota pelabuhan Tartous, Syria.

The Signing of Cooperation of BKI Marketing Representative in Syria
In the effort of probing the development of foreign market especially in Middle East area, BKI has cooperated with Syrindo Maritime Shipping Services, Syria to open a marketing representative office in the port city of Tartous, Syria.

ACS Meeting ke 16 di New Delhi
Salah satu prestasi penting yang dapat dicatat di tahun 2008 ini adalah BKI diakui sebagai anggota penuh forum Asian Classification Society (ACS) Meeting ke 16 di New Delhi, India. Forum ACS Meeting merupakan tempat berkumpul dan berdiskusi para pemimpin badan klasifikasi di kawasan Asia, dan dengan pengakuan ini maka kini BKI berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan badan-badan klasifikasi internasional yang ada di Asia seperti Nippon Kaiji Kyokai (NK) Jepang, Korean Register (KR), Korea Selatan, China Classification Society (CCS), China, Indian Register of Shipping (IRS), India, dan Vietnam Register (VR), Vietnam. Selain itu pengakuan ini juga merupakan bentuk apresiasi badan-badan klasifikasi di Asia terhadap kemajuan dan konsistensi BKI dalam bidan klasifikasi.

16th ACS Meeting in New Delhi
One of the important achievements recorded in this 2008, is that BKI has been admitted as a full member of forum of 16th Asian Classification Society (ACS) Meeting in New Delhi, India. Forum of ACS Meeting is a media for leaders of classification agencies in Asian territory to gather and have discussion. And by this acknowledgement, BKI presently has equal right to the international classification agencies in Asia such as Nippon Kaiji Kyokai (NK) Japan, Korean Register (KR), South Korea, China Classification Society (CCS), China, Indian Register of Shipping (IRS), India, and Vietnam Register (VR), Vietnam. In addition, this acknowledgement also constitutes an appreciation by classification agencies in Asia to the progress and consistency of BKI in the field of Classification.

Rapat Pembasahan Assessment GCG
Sebagaimana telah diawali dengan pembuatan GCG Manual di tahun sebelumnya, maka dalam bulan Februari 2008 ini Manajemen BKI merealisasikan suatu langkah penting dalam pengelolaan Perusahaan dengan melakukan Assessment penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance. Assessment ini merupakan suatu hal yang penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan GCG di Perusahaan, sekaligus menjadi input untuk penyempurnaan penerapannya di tahun-tahun berikutnya.

Meeting to Discuss GCG Assessment
As initiated by the making of GCG Manual in the previou year, the in this February 2008, the Management of BKI realized an important step in managing the Company by conducting Assessment to the application of Good Corporate Governance Principles. This assessment is an important thing to find out to what extent the effectiveness of GCG application is in the Company, and at the same time serves as input for the improvement of application in the subsequent years.

Customer Meeting
Manajemen BKI mengawali tahun 2008 ini dengan mengadakan Customer Meeting dengan para pemakai jasa dan mitra kerja terkait di wilayah kerja BKI Sorong. Customer Meeting ini adalah salah satu cara yang dilakukan Manajemen BKI untuk menjalin komunikasi langsung dengan para pemangku kepentinganya sekaligus melakukan diskusi dan tukar pikiran dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan BKI. Direksi BKI menutup rangkaian kegiatan ini dengan mengadakan Customer Meeting di BKI Banjarmasin dama bulan Desember 2008.

Customer Meeting
The Management of BKI commenced its work in this 2008 by holding a Customer Meeting with service users and the related work partners in the work area of BKI in Sorong. This Customer Meeting is one of the methods conducted by the Management of BKI to communicate directly with its stakeholders and at the same time have discussion and share ideas in the framework of improving service quality of BKI. Board of Directors of BKI closed the series of these activities by holding a Customer Meeting at BKI Banjarmasin in December 2008.

Pertemuan Komite Konsultasi Klasifikasi Indonesia
BKI juga secara teratur menyelenggarakan pertemuan Komite Konsultasi Klasifikasi Indonesia (K3I) suatu komite yang bertugas memberikan masukan dan saran bagi pengembangan teknis dan operasional BKI. Pertemuan K3I yang kali ini mengambil tema "Dengan Semangat Undang-undang Pelayaran yang Baru Kita Tingkatkan Peranan dan Kontribusi K3I dalam Memberdayakan dan Mamajukan BKI" itu selain diisi dengan presentasi dan diskusi juga menyerap berbagi masukan dan saran bidang teknis dan operasional dari para anggotanya yang merupakan perwakilan para pemangku kepentingan BKI.

Meeting of Indonesian Classification Consultation Committee
BKI also organizes a meeting of Indonesian Classification Consultation Committee on a regular basis. The Indonesian Classification Consultation Committee (K3I) is a committee with duty to give input and advice for technical and operational development of BKI. K3I meeting of this time under the theme of "By the spirit of the New Law of Shipping, We Improve the Role and Contribution of K3I in Empowering and Advancing BKI" was filled up with presentation and discussion in addition to absorbing various inputs and advices of technical and operational field from its members, who are representatives of stakeholders of BKI.

Roundtable Discussion Badan Litbang Perhubungan
Eksistensi dan kredibilitas BKI dalam bidang keselamatan terus mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Dalam berbagai kesempatan seperti acara Roundtable Discussion "Pola Pembinaan Perusahaan Bongkat-Muat" dan "Ship Financing" yang diadakan oleh Badan Litbang Perhubungan Direksi BKI selalu tampil sebagai pembicara ataupun pembahas.

Roundtable Discussion of Transportation Research and Development Agency
The existence and credibility of BKI in the field of safety continues obtaining acknowledgement from a number of parties. In a number of occasions like Roundtable Discussion on "Pattern of Development of Loading-Unloading Company and "Ship Financing" held by Transportation Research and Development Agency of Board of Directors, BKI always appear as speaker or discussant.

Rapat Evaluasi Kinerja Semester I
Manajemen BKI secara berkala mengadakan rapat evaluasi realisasi kinerja usaha dan keuangan Perusahaan dalam mencapai target yang dibebankan dalam RKAP. Rapat Evaluasi Kinerja biasa diadakan pada akhir Semester I tahun anggaran sementara rapat-rapat staf diadakan sesuai kebutuhan. Melalui kegiatan rapat evaluasi secara berkala ini Manajemen berupaya mendapatkan masukan dari para kepala unit produksi dan unit kerja terkait yang untuk mengambil langkah-langkah kebijakan maupun penyesuaian strategi yang diperlukan dalam menghadapi dinamika dan persaingan usaha.

Semester I Performance Evaluation Meeting
On a periodic basis, the Management of BKI holds evaluation meeting of business and financial performance realization of the Company in achieving the target charged in RKAP. Performance Evaluation Meeting is usually held at the end of Semester I of the fiscal year, while meetings of staff are held according to the necessity. Through this activity of periodic evaluation meeting, the Management makes effort to obtain input from heads of production units and the related work units in order to take steps of policy or to adjust strategy required in facing the business dynamic and competition.

Raker & TOMSI 2008
Dalam rangka mengevaluasi realisasi RKAP 2008 sekaligus menetapkan strategi dan kebijakan untuk penyusunan RKAP 2009, Manajemen BKI menyelenggarakan acara Rapat Kerja dan Technical and Operational Meeting Surveyor-Inspector (TOMSI) BKI di Lombok, NTB. Selain membahas berbagai aspek yang terkait dengan kinerja usaha dan keuangan acara ini juga membahas berbagai permasalahan teknis yang penting bagi kelancaran operasional dan pelayanan bidan Klas maupun Konsultansi dan Supervisi.

Work Meeting & TOMSI 2008
In the framework of evaluating the realization of RKAP of 2008 and at the same time stipulating strategy and policy for preparing RKAP of 2009, the Management of BKI held a Working Meeting and Technical and Operational Meeting Surveyor -Inspector (TOMSI) of BKI in Lombok, NTB (West Nusa Tenggara). In addition to discussing various aspects relating to business and financial performance, this program also discussed various technical matters, which are important for the smooth run of operation and service ofClass field as well as Consultation and Supervision.

Pelantikan Pejabat BKI
Untuk menjaga dinamika organisasi dan sebagai wujud pengembangan pola karier pegawai, pada pertengahan 2008 ini BKI kembali mengadakan pelantikan pejabat baru baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.

Inauguration of BKI's Officials
In order to maintain the dynamics of the organization and as a realization of development of officials' career pattern, in this mid 2008, BKI again held inauguration of new officials either in Head Office of Branch Office.

Peresmian Gedung Kantor Baru BKI Semarang
Manajemen BKI memiliki perhatian besar pada aspek penyediaan sarana-prasarana kerja yang memadai untuk menunjang peningkatan produktivitas karyawan dan efektivitas pelaksanaan tugas. Berkaitan dengan hal tersebut dalam tahun 2008 ini Manajemen BKI membangun dan meresmikan penggunaan gedung kantor baru Cabang Madya Semarang di daerah Semarang Barat untuk menggantikan bangunan lama di Kompleks Pelabuhan Tanjung Emas yang sudah kurang memadai.

Launching of New Office of BKI Semarang
The Management of BKI has big concern to provide sufficient work facility and infrastructure to support improvement of employees' productivity and effectiveness of duty implementation. Relating to that matter, in 2008 the Management of BKI finished constructing and launched the use of new office building of Mid Branch of Semarang in West Semarang to replace the old building at the Complex of Tanjung Emas Port, which is no longer sufficient.

Mengadakan Pameran di Jakarta dan Batam
Dalam rangka mempromosikan jasa BKI kepada para pengguna jasa, BKI juga aktif mengikuti pameran Riset dan Teknologi Expo 2008 yang diselenggarakan bulan Agustus 2008 di Jakarta dan Batam Marine Expo yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kepulauan Riau pada bulan Maret 2008.

Organizing an Expo in Jakarta and Batam
In the framework of promoting BKI's services to service users, BKI also actively join Research and Technology Expo 2008 held in August 2008 in Jakarta and Batam Marine Expo organized by Local Government of Riau Islands in March 2008.

" Jumlah kapal yang diregister pada akhir Desember 2008 berjumlah 11.281 unit atau 106 % lebih besar dibandingkan tahun 2007."

" Total ships registered at the end of December 2008 are 11.281 units or 106 % higher than that in 2007."

Klasifikasi Kapal
Ship Classification

Dampak diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia No 5 tahun 2005 tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional dan Permenhub KM. 20 tahun 2006 tentang kewajiban kapal bendera Indonesia memiliki klasifikasi dari BKI menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan register kapal kelas BKI, meskipun masih didominasi penerimaan kelas bangunan sudah jadi dibandingkan dengan penerimaan kelas bangunan baru.

Jumlah kapal yang diregister pada akhir Desember 2008 berjumlah 11.281 unit atau 106 % lebih besar dibandingkan tahun 2007 dengan total Gross Tonnage mencapai 11.561.461 GT. Jumlah penambahan kapal yang diregister pada tahun 2008 adalah 680 unit atau 1.036.653 GT.

Kapal yang dicabut kelasnya sampai dengan tahun 2008 adalah 4.635 unit atau 3.594.859 GT. Pencabutan kelas ini dengan alasan tidak memenuhi persyaratan Rules & Regulation dengan mulai diterapkannya Automatic Class Suspension, pindah ke badan klasifikasi lain, tenggelam, discrapp atau permintaan dari pemilik kapal. Sehingga kapal kelas BKI dengan status klas berlaku (valid class), meningkat dari tahun 2007 yang sebesar 5.966 dengan tonase total 6.929.949 GT menjadi 6.340 unit dengan tonase total 7.585.111 GT.

Impact of issuing of Directive of the President of Republic of Indonesia No 5 of 2005 regarding empowering of national shipping industry and Permenhub no. KM. 20 of 2006 regarding obligation of Indonesia flag ship has classification from BKI, increasingly the number of ships regeistered to BKI Class, even the admission of class are still dominated by existing ship than new building.

Total ships registered at the end of December 2008 are 11.281 units or 106 % higher than that in 2007 at a total Gross Tonnage of 11.561.461 GT. Total addition of ships registered in 2008 are 680 units or 1.036.653 GT.

Ships of which the class is withdrawn until 2008 are 4.635 units or 3.594.859 GT. The reason of this class withdrawn are failure to fulfill Rules & Regulations as starting of implementation of Automatic Class Suspension, change to another classification body, sinking, scrapping or request from ships' owners. So that, BKI class ships with the valid class status increase from 5.966 units at a total tonnage of 6.929.949 GT in 2007 to 6.340 units in this year at a total tonnage of 7.585.111 GT.

Kapal Register tahun 2000-2008
Ships Registered from 2000 to 2008

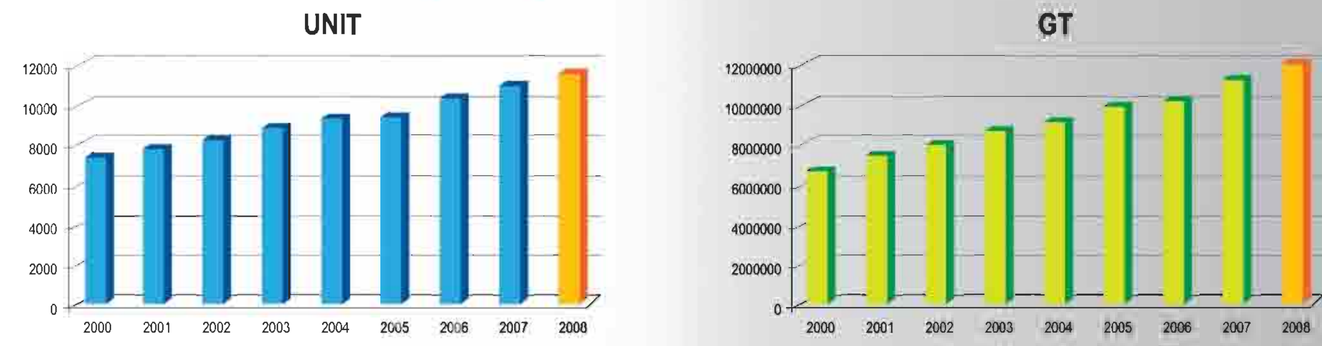

Kapal Kelas Valid sesuai umur
Valid Class Ships by ship age

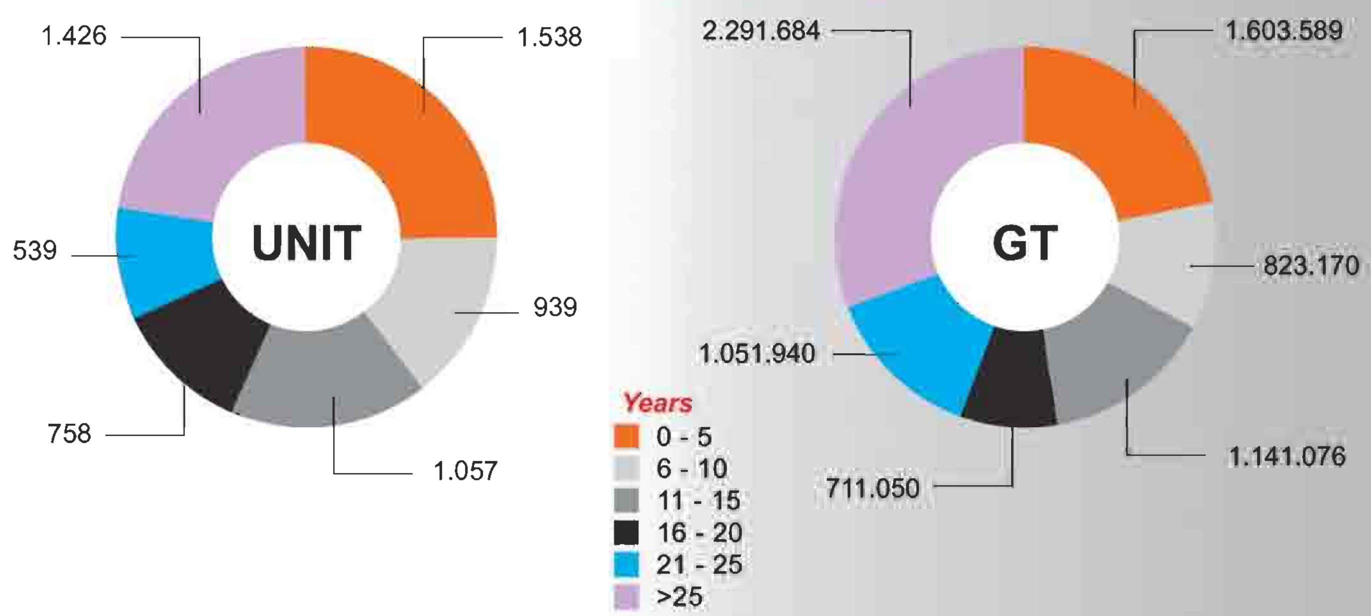

Rincian Tipe Kapal yang diregister
Breakdown of type of ships

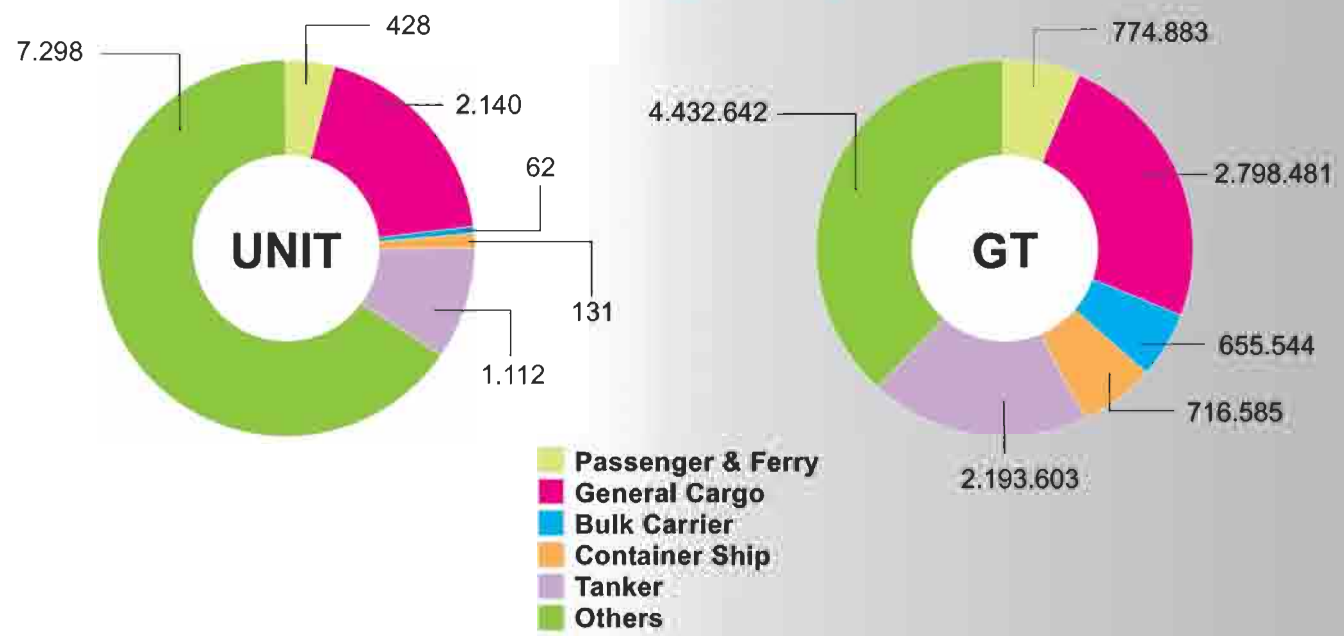

" Lingkup kerja dari BKI adalah melaksanakan survey dan sertifikasi untuk menjamin bahwa Rules & Regulation yang telah dikembangkan, diterapkan pada saat pembangunan kapal baru dan kapal yang sudah jadi."

" Scopes of work of BKI is execute survey and certify to ensure that Rules & Regulation which has been developed, applied at the time of construction of new building ship and existing ship."

Daftar Penerimaan Kelas Bangunan Baru Tahun 2008 :
List of Admission of New Building 2008 :

No.	Ship Name Type of Ship	Dimension (m) GT (Ton)	Shipyard	Ship's Owner
1.	**Pulo Tello** Ro-Ro Ferry	47.25 x 14 x 34 686	PT. Daya Radar Utama	Dinas Perhubungan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2.	**Johan Jaya-108** Tug Boat	29 x 8 x 3.7 204	PT. Mercusuar Mandiri Shipyard	PT. Kapuas Jaya Samudera, d/a PT. Bayu Bahari Santosa
3.	**Permata Jaya 1** Tug Boat	25 x 7 x 3.6 141	PT. Sumber Sarana Makmur	PT. Sumber Sarana Elektrindo
4.	**Oranges** Tug Boat	28 x 7.8 x 3.5 197	PT. Alima Usaha Samudera Shipyard	David Cang
5.	**Prima 3** Tug Boat	27 x 8.2 x 4 222	PT. Karya Tekhnik Utama	PT. Maritim Prima Mandiri
6.	**Prima 5** Tug Boat	27.5 x 8.2 x 4 222	PT. Karya Tekhnik Utama	PT. Maritim Prima Mandiri
7.	**Biwin 8** Tug Boat	24 x 7.2 x 3.5 146	PT. Tri Karya Alam Shipyard Industrial Engineering	PT. Biwin Indah Lestari
8.	**Johan Jaya 109** Tug Boat	29 x 8 x 3.7 216	PT. Galangan Mercusuar	PT. Kapuas Jaya Samudera d/a PT.Bayu Bahari Santosa
9.	**Bahari Perdana XVI** Tug Boat	27 x 8.2 x 4 210	PT. Daya Radar Utama	PT. Bahari Perdana (Pelayaran)
10.	**Johan Jaya 110** Tug Boat	29 x 8 x 3.7 216	PT. Galangan Mercusuar	PT. Kapuas Jaya Samudera d/a PT.Bayu Bahari Santosa
11.	**Waropen Satu** Oil Tanker	32 x 8 x 2.8 200	PT. Mariana Bahagia	Dinas Perhubungan Prop Papua
12.	**Puma 8** Tug Boat	27 x 8.2 x 4 234	PT. Karya Tekhnik Utama	PT. Putra Utama Mandiri Lines
13.	**Marina 12** Tug Boat	29 x 8 x 3.7 211	PT. Mercusuar Mandiri	PT. Bahtera Bestari Shipping
14.	**Marina 14** Tug Boat	29 x 8 x 3.7 211	CV. Mercusuar Mandiri	PT. Bahtera Bestari Shipping
15.	**Cakalang** Ferry	55.5 x 13 x 3.45 1483	PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
16.	**Padma Sari** Coal Barge	95 x 32 x 6 5782	Teraoka Shoji Inc	PT. Tanjungriau Servis
17.	**Liputan Pendingin-02** Tug Boat	23.5 x 7.32 x 3.2 144	PT. Karya Tekhnik Utama	PT. Multi Agung Sarana Ananda
18.	**Maju Daya 9** Tug Boat	26 x 7.92 x 3.65 185	PT. Bandar Abadi	PT. Sinar Gratia Nusantara (Pelayaran)
19.	**Selat Legundi-I-212** Tug Boat	29 x 9.5 x 4.58 291	PT. Daya Radar Utama	PT. Pelabuhan Indonesia II Panjang
20.	**SMS Tangguh** Landing Craft	52.42 x 12 x 4.1 785	PT. Bumi Laut Perkasa	PT. Swakarya Mulia Shipping
21.	**Oasis 5** Tug Boat	27.5 x 8.5 x 3.9 233	PT. Cahaya Samudra Shipyard	PT. Armada Sumber Rezeki
22.	**Kasuari Pasifik II** Cargo Passenger	51 x 9 x 4.5 745	PT. Daya Radar Utama	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
23.	**Sms Frontier** Tug Boat	25 x 7.6 x 3.5 159	PT. Mariana Bahagia	PT. Sentosa Mulia Shipyard
24.	**Bintang Natuna** Supply Vessel	49.8 x 12.6 x 5.3 855	PT. Mariana Bahagia	PT. Sentosa Segara Mulia Shipping
25.	**Sds 50** Tug Boat	25 x 7.6 x 3.5 183	PT. Mariana Bahagia	PT. Wintermar
26.	**Biwin 9** Tug Boat	24 x 7.2 x 3.5 145	PT. Trikarya Alam	PT. Biwin Indah Lestari
27.	**Virgo Power – 3** Tug Boat	28.05 x 8.6 x 4.3 278	PT. Karya Tekhnik Utama	PT. Virgo Samudera Jaya
28.	**Yahukimo Satu** Oil Tanker	32 x 8 x 2.8 200	PT. Mariana Bahagia	Dinas Perhubungan Prop Papua
29.	**Mitra Bahari** Tug Boat	27 x 8.2 x 4 244	PT. Karya Tekhnik Utama	PT. Mitra Setia Bahari
30.	**Teluk Sinabang** Passanger Ferry	54.5 x 14 x 3.4 750	PT. Daya Radar Utama	Dit Gamat Ditjen Hubla
31.	**Hamota Berau** Landing Craft	54.1 x 11 x 3.75 555	PT. Galangan Balikpapan Utama	PT. Multitrans Raya
32.	**Bawal** Ferry	45.5 x 12 x 3.2 560	PT. Daya Radar Utama	Departemen Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat
33.	**Camar 5** Tug Boat	23.5 x 7.32 x 3.2 167	PT. Karya Tekhnik Utama	PT. Camar Laut
34.	**Mbs-88** Tug Boat	28.05 x 8.6 x 4.3 208	PT. Karya Tekhnik Utama	PT. Mitra Bahari Sentosa (Pelayaran)
35.	**Kasuari Pasifik – III** Cargo Passenger	51 x 9 x 4.5 745	PT. Daya Radar Utama	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
36.	**Bobara** Ferry	40 x 10.5 x 2.8 475	PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
37.	**Camar 8** Tug Boat	29 x 8.6 x 4.1 259	PT. Bandar Victory Shipyard	PT. Camar Laut
38.	**Nelly 35** Tug Boat	27 x 8.2 x 4 184	PT. Karya Tekhnik Utama	PT. Nelly Dwi Putri
39.	**Nasyda** Landing Craft	67 x 14 x 3.65 931	PT. Karya Tekhnik Utama	Duta Bahari Menara Line, PT.
40.	**Mandiri Berau** Tug Boat	29 x 9 x 4.25 247	PT. Pal Indonesia	PT. Saranakelola Investa
41.	**Prima 4** Tug Boat	27 x 8.2 x 4 222	PT. Karya Tekhnik Utama	PT. Maritim Prima Mandiri
42.	**Prima 2** Tug Boat	27 x 8.2 x 4 222	PT. Karya Tekhnik Utama	PT. Maritim Prima Mandiri
43.	**J N W** Landing Craft	68 x 18.28 x 3.66 998	PT. Bandar Victory Shipyard	PT. Bandar Niaga Raya
44.	**Papua Empat** Cargo Passenger	36.6 x 8 x 5.2 304	PT. Industri Kapal Indonesia (Persero)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
45.	**Sindo Ocean – I** Tug Boat	30 x 9 x 3.4 227	PT. Usda Seroja Jaya	PT. Usda Seroja Jaya
46.	**Tirta Niaga X** Tug Boat	30 x 9 x 3.4 227	PT. Usda Seroja Jaya	PT. Sinar Alam Permai
47.	**Julung-Julung** Passanger Ferry	46.2 x 12 x 3 600	PT. Daya Radar Utam	Departemen Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat

" Setiap penerimaan Kelas dan modifikasi kapal, gambar rencana dan perhitungan teknis harus diverifikasi untuk mendapatkan persetujuan dan hasilnya sebagai dasar surveyor lapangan dalam memberikan keputusan teknis."

" All admission of Class and modification of ship, the drawing and technical calculation should be verified for getting the approval and the the result of approval used as a reference of field surveyor for technical judgement."

Persetujuan Gambar
Drawing Approval

Pada tahun 2008, BKI menerima permintaan untuk drawing / plan approval yang terdiri dari 1.885 kontrak dan 23.975 gambar / perhitungan. Diantaranya adalah 11.392 gambar kontruksi lambung, 9.580 gambar permesinan / listrik serta 3.003 gambar / perhitungan statutoria.

In 2008, BKI received request for drawing approval consisting of 1,885 contracts and 23,975 drawings / calculations, among others 11,392 hull construction drawings, 9,580 machinery / electrical drawings as well as 3,003 statutory drawings/calculations.

Division	2004	2005	2006	2007	2008
Hull & Material	7.124	8.812	9.420	10.702	11.392
Machinery & Electrical	4.952	6.513	7.759	8.935	9.580
Statutory	1.074	1.339	1.812	2.817	3.003
Total	**13.150**	**16.664**	**18.991**	**22.454**	**23.975**

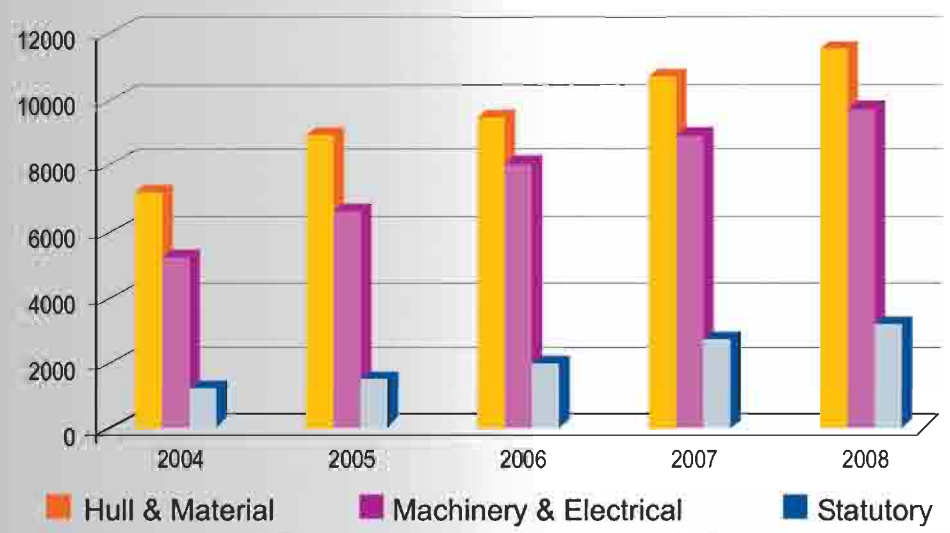

" Survey dilaksanakan berdasarkan Rules & Regulasi BKI dan dilaporkan dalam laporan survey secara on-line dan hasil survey status dapat diakses dalam website BKI - www.klasifikasiindonesia.com."

" The Survey conducted based on BKI Rules & Regulation and Reported on survey report in on-line basis and survey status could be accessed on BKI Website - www.klasifikasiindonesia.com."

Aktifitas Survey Klasifikasi
Class Survey Activities

Dalam pelaksanaan survey di lapangan, BKI menerima 15.705 permintaan survey yang terdiri dari 1.031 survey dalam rangka penerimaan kelas dan 13.973 survey dalam rangka mempertahankan kelas. Perincian jenis survey yang dilakukan adalah sbb :

In implementing its field surveys, BKI receives 15,705 application for survey consisting of 1,031 surveys for admission to class and 13,973 surveys in for class m aintaining. The breakdown of kind of survey carried out, as follows:

Kind Survey	2004	2005	2006	2007	2008
Renewal Survey	573	649	738	921	882
Annual Survey	2.807	3.035	3.110	3.619	3.576
Intermediate Survey	494	569	538	618	579
Docking Survey	1.815	2.029	2.207	2.514	2.300
Shaft Propeller Survey	614	984	1.162	1.114	1.155
Boiler Survey	129	122	164	208	181
Automation Survey	17	17	21	25	20
Continuous Survey	258	166	335	489	354
Class Extension Survey	175	150	97	238	227
Condition Survey	3.328	3.316	4.342	4.227	5.484
New Building Admission Class Survey	86	11	126	178	258
Existing Ship Admission Class Survey	383	396	599	753	621
Re-class Survey	18	49	70	100	68
TOTAL	**10.697**	**11.493**	**13.509**	**15.004**	**15.705**

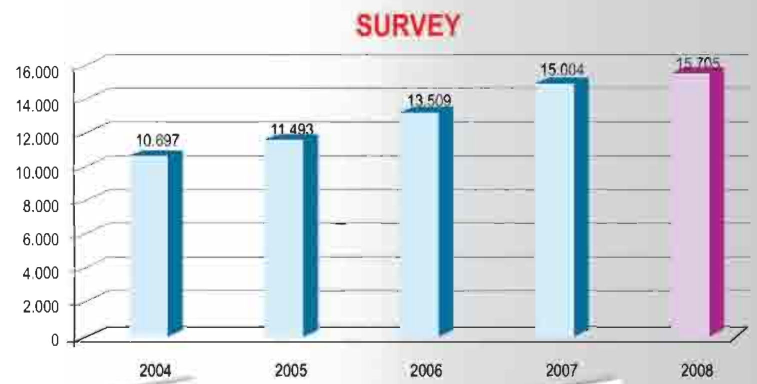

" Dalam mempertahankan kepercayaan tersebut, BKI terus melakukan peningkatan kemampuannya terhadap peraturan statutoria, antara lain mengirimkan personilnya untuk belajar S2 di WMU - Malmo,Swedia, In house Training tentang Statutoria dan penyempurnaan Instruction to Surveyor Part B (Survey Statutoria)."

" For maintaining this authorization, BKI has enhance its competence of the statutory regulation continuously, by sending its personnels to study Master degree at WMU - Malmo, Sweden, holding in house Statutory Surveys training and improving Instruction to Surveyor Part B (Statutory Survey)."

Survey Statutoria
Statutory Survey

BKI sebagai Badan Klasifikasi telah memenuhi persyaratan teknis dan kriteria sesuai dengan IMO Resolusi A.739(18) dan A.789(19) sebagai Recognized Organization (RO) untuk ditunjuk melaksanakan survey kapal-kapal berbendera Indonesia atas nama Pemerintah Indonesia cq Ditjen Perhubungan Laut.

Dalam mempertahankan kepercayaan tersebut, BKI terus melakukan peningkatan kemampuannya terhadap peraturan statutoria, antara lain mengirimkan 4 personil BKI untuk belajar tentang "Ship Safety & Marine Environment Protection" dengan program belajar S2 di World Maritime University (WMU), Malmo-Swedia; Melakukan penyempurnaan Instruction to Surveyor Part B tentang Survey Statutoria; Melakukan program diklat para surveyor terhadap survey Statutoria.

Sebagai bagian dari strategi BKI dalam mengembangkan kompetensinya, BKI secara serius berpartisipasi dalam pengembangan regulasi maritim. Berbicara mengenai regulasi maritim, tidak ada yang menyangsikan bahwa IMO adalah salah satu centerpoint terpenting dimana ide, usulan, gagasan dalam bidang maritime safety, environment, security didiskusikan, didebat dan dirumuskan ke dalam bentuk regulasi, code, guidelines, guidance, circular, dan lainnya. Oleh karena itu BKI mengirimkan wakilnya dalam IMO Maritime Safety Committee MSC session 84 dan 85 di London - Inggris, sebagai bagian dari delegasi Republik Indonesia. Dalam sidang tersebut wakil BKI terlibat dalam sidang plenary, working group drafting of amendments to IMO instruments, antara lain SOLAS, LSA Code, IMSBC Code. Selain itu dalam working group on human element yang membahas usulan terkait ISM Code.

As a Classification Society, BKI has comply with technical requirements and criteria as a Recognized Organization (RO) according with IMO Resolution A.739(18) and A.789 (19) for authorized to conduct Statutory Survey on behalf of the Government of Indonesia cq Directorate General of Sea Transportation for Indonesian flagged ships.

For maintaining this authorization, BKI has enhance its competence of the statutory regulation continuously, by sending 4 (four) personnels to study the Ship Safety & Marine Environment Protection in Master degree program at World Maritime Organization (WMU), Malmo Sweden; improving Instruction to Surveyor Part B for Statutory Survey; Holding in-house 'Statutory Survey' training for all surveyors.

As part of BKI's strategy in extending its competencies, the society commits to participate in the development of maritime regulations. It is unarguable that IMO is one of the most prominent centerpoint where ideas, submissions, proposals on issues of maritime safety, environment, security are discussed, debated, and formulated into regulations, codes, guidelines, guidance, circulars, etc. For that purpose, BKI assigned its technical staff to attend on IMO Maritime Safety Committee MSC session 84 and 85 which held in London - UK as member to delegation to Republic of Indonesia. On those sessions BKI participated in plenary session, working group drafting of amendments to IMO instruments, i.e. SOLAS, LSA Code, IMSBC Code. Moreover, in working group on human element that discussed submissions on ISM Code.

Audit Activity	2005	2006	2007	2008
ISM Code – Initial Audit	129	165	109	94
ISM Code – Annual Audit	102	104	85	90
ISM Code – Intermediate Audit	176	162	153	66
ISM Code – Renewal Audit	35	63	193	182
ISM Code – DOC issued	82	50	45	37
ISM Code – SMC Issued	265	178	251	342
ISPS Code – Initial Audit	38	30	34	32
ISPS Code – Intermediate Audit	0	7	91	34
ISPS Code – ISSC issued	78	27	41	39

Otorisasi Statutoria
Statutory Authorization

Hingga tahun 2008, otorisasi yang telah dipercayakan kepada BKI dibidang klasifikasi kapal dan statutoria adalah :

Until 2008, ship classification and statutory authorization trusted to BKI are:

- *Obligation of Indonesian flagged ships to have classification certificate from BKI.*
- *Survey Authorization to survey of loadline marks and issue loadline certificates (IPLT & PGMI) for Indonesian flagged ships.*
- *Survey Authorization and Certification for Container.*
- *Survey Authorization and Certification of Safety Construction, Marpol Annex I & II and Fitness of Chemical Carrier & Gas Carrier in Bulk for Indonesian flagged ships at a tonnage more than 500 GT.*
- *Audit Authorization and Certification of ISM Code for Indonesian flagged ships.*
- *As a Recognized Security Organization (RSO), conducting audit and certification of ISPS Code for Indonesian flagged ships.*
- *Survey Authorization and Certification of Annex VI Marpol 73/78 for Indonesian flagged ships.*
- *Survey Authorization and Certification of Condition Assessment Scheme (CAS) in accordance with Annex I Marpol 73/78 for Indonesian flagged ships.*

Sedangkan otorisasi yang telah dipercayakan kepada BKI dibidang minyak & gas dan ketenaga-kerjaan adalah :

While, authorizations trusted to BKI in oil & gas and manpower sectors are:

- *Technical Inspection of Feasibility of Combined FacilityCertificate from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Crane from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Pressure Vessel from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Pipeline from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Platform Construction from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Electrical Equipment from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Rotating Equipment from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Storage Tank from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Inspection and Testing of Crane from Ministry of Manpower and Transmigration.*
- *Inspection and Testing of Boiler and Pressure Vessel from Ministry of Manpower and Transmigration.*
- *Inspection and Testing of Electric Equipment from Ministry of Manpower and Transmigration.*
- *BKI Laboratory for NDT and DT of material, equipment relating to boiler and pressure vessel from Ministry of Manpower and Transmigration.*
- *Inspection and Testing of Crane, Pressure Vessel and Boiler onboard ship and at Harbour from Directorate General of Sea Transportation.*
- *Inspection of Helideck from Directorate General of Air Transportation.*

Aktifitas Jasa Industri
Industrial Service Activities

Sebagai bagian dari survey klasifikasi kapal, BKI melaksanakan pengawasan pada sistem mutu dari perusahaan manufacture dan jasa yang berhubungan dengan pembangunan kapal. Pengawasan pada sistem mutu tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa produk maupun jasa yang disuplai oleh perusahaan yang terlibat dalam klasifikasi kapal memiliki konsistensi mutu sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan Rules.

Perusahaan yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan pesetujuan sebagai pembuat atau pelaksana jasa akan di periksa berdasarkan peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dan peraturan standart mutu. Assessment dilakukan pada Sistem Manajemen Mutu, Standar Mutu, Kontrol Mutu, Rencana Mutu dan Prosedur Kerja yang dirancang oleh perusahaan pemohon. Bila dari hasil assessment dinyatakan bahwa perusahaan pemohon telah mampu untuk mempertahankan mutu secara konsisten sesuai dengan peraturan Biro Klasifikasi Indonesia maka akan diterbitkan Sertifikat Persetujuan.

Untuk mengawasi konsistensi standar mutu perusahaan yang telah mendapatkan Sertifikat Persetujuan, dilakukan pemeriksaan secara periodik pada sistem mutu dan dokumentasi catatan mutu perusahaan.

As part of ship classification survey, BKI conducts supervision to quality system of manufacture and service company relating to ship construction. Such supervision to such quality system is conducted to ensure that the product and service supplied by the Company involved in ship classification maintains quality consistency in accordance with the specification required by the Rules.

Any company having submitted a request to obtain approval as service maker or implementer will be assessed based on regulation of the Indonesian Classification Bureau and regulation on quality standard. Assessment is conducted to Quality Management System, Quality Standard, Quality Control, Quality Plan, and Work Procedure designed by the applicant company. In case the result of assessment shows that the applicant company has been able to retain the quality consistently in accordance with the regulation of the Indonesian Classification Bureau, Certificate of Approval will be issued.

To supervise consistency of Quality Standard of a company that has obtained a Certificate of Approval, periodic assessment is conducted to the quality system and quality record documentation of the Company.

" BKI juga mengembangkan usaha dalam kegiatan Konsultansi & Supervisi, meliputi usaha inspeksi, pengujian & laboratorium, konsultansi, rekayasa teknik dan pelatihan publik di sektor industri, minyak & gas, tenaga kerja kelautan dan perhubungan."

" BKI also developed its business in Consultancy & Supervision activities, including inspection, testing & laboratory, consultancy, technical engineering and public training in the fields of industrial, oil & gas, manpower, marine and transportation."

Konsultansi & Supervisi
Consultancy & Supervision

Inspeksi & Sertifikasi
Inspection & Certification

BKI juga memberikan jasa inspeksi dan sertifikasi terhadap industri dilingkungan minyak dan gas serta ketenaga-kerjaan. BKI dipercaya untuk melakukan inspeksi dan sertifikasi berbagai proyek / pekerjaan, meliputi inspeksi dan sertifikasi atas nama Ditjen Migas, meliputi SKPP Pressure Vessel, Crane, Rotating Equipment, Electrical Equipment, Pipeline, Storage Tank, SKPI.

BKI also provides oil and gas, marine as well as man power sector with inspection and certification services. BKI is trusted to inspect and certify in various projects, covering inspection and certification of SKPP Pressure Vessel, Crane, Rotating Equipment, Electrical Equipment, Pipeline, Storage Tank, and SKPI on behalf of Directorate General of Oil and Gas.

OIL & GAS	ACTIVITY
- Installation Use Feasibility PJIT	51
- Lifting Device PJIT	190
- Rigging Equipment/Lifting Device Testing Service	19
- Pressure Vessel PJIT	21
- Pressure Safety Valve (PSV) Testing Service	20
- Distribution Pipe PJIT	11
- Platform Construction PJIT	7
- Electric Equipment PJIT	21
- Pump, Compressor and Driver PJIT	11
- Landfill Tank PJIT	21
- Rig PJIT	1
- SIMOM	2

LABOR AFFAIRS	ACTIVITY
- Steam Instrument & Pressure Vessel Inspection & Testing	20
- Wind Bottle Checking & Testing	105
- Lifting & Transport Devices Inspection & Testing	36
- PSV Calibration	1
- Lighting Rod	2
- Generator Set	3

TRANSPORATION	ACTIVITY
- Helicopter deck inspection	3
- Lifting & Transport Devices Inspection & Testing	3

CERTIFICATOIN SERVICES	ACTIVITY
- SIO Crane	9
- Welding Procedure Specification	2

TECHNICAL INSPECTION SERVICES	ACTIVITY
- Container Metal Box	59
- Protection Cathodic Testing	3
- Lighting Rod	1
- Telkom Tower Inspection	3
- TKDN Attainment Verification	1
- Casing Tube Inspection	3
- Busket Inspection	42
- Welding Machine Inspection	14
- Skid and Spreader Bar Inspection	28
- Rental Water Bag	8
- Initial Inspection of Box Crossover Thread	1
- Periodical Inspection of Pressure Gauge	42
- Initial Inspection of 8-3/4" ACME Bowen Box	1
- Load Test Service/ Load Cell Lease	61
- Wire Rope Test Survey Service	22
- Repair Tank Supervision	11
- Transport Tank Certification	17
- Lifting & Transport Devices Certification	145
- Rigging Equipment & Lifting Device Certification	275
- Pressure Safety Valve & Pressure Control Certification	26
- Pressure Vessel Certification	6
- Pump, Compressor & Driver Certification	31
- Refinery Equipment Inspection Service	27
- Rental Holiday Detector & Operator	5

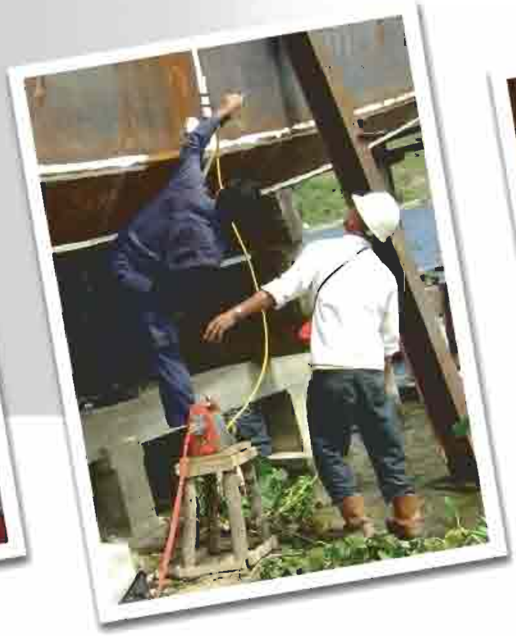

Pengujian & Laboratorium
Testing & Laboratory

Dibidang pengujian BKI telah melaksanakan Destructive Test (DT) dan Non Destructive Test (NDT) dengan kegiatan, meliputi Radiography, Ultrasonic Test, Magnetic Particle Inspection, Dye Penetrant, Uji Tarik dan Uji Takik.

In case of testing, BKI has implemented Destructive Test (DT) and Non Destructive Test (NDT) by Radiography, Ultrasonic Test, Magnetic Particle Inspection, Dye Penetrant Test, Pull Test and Notch Test.

TYPES OF PRODUCTION ACTIVITIES	ACTIVITY
- Non Destructive Test (NDT)	1687
- Destructive Test (DT)	499

Rekayasa Teknik
Engineering Design

Untuk kegiatan rekayasa teknik, BKI melakukan perhitungan teknik dan desain apraisal. Proyek yang ditangani adalah :

In case of engineering design, BKI conduct technical calculation and design appraisal.

TYPES OF PRODUCTION ACTIVITIES	ACTIVITY
- Design appraisal and Supervision Morning System	3

Inspeksi & Supervisi Maritim
Maritime Inspection & Supervision

Untuk kegiatan inspeksi dan supervisi marine, BKI telah menangani Survey Kondisi (pemeriksaan propeler, inventarisasi sistem perawatan kapal, evaluasi hasil pekerjaan perbaikan kapal), Perhitungan stabilitas & trim kapal, Megger Test, Bollard Pull Test, Vibration & Noise Level Test, Kalibrasi tangki, On/Off Hire Survey, Pembuatan gambar teknik, Penyusunan Hatch Cover Plan, Penyusunan Cargo Securing Manual dan Penyusunan Manual ISM Code.

In marine inspection and supervision sector, BKI handles Condition Surveys (propeller inspection, marine maintenance system, marine repair result evaluation), Marine stability & trim calculation, Megger Test, Bollard Pull Test, Vibration & Noise Level Test, Tank Calibration, On/Off Hire Survey, Technical drawings making, Hatch Cover Plan Preparation, Cargo Securing Manual Preparation and ISM Code Manual Preparation.

" Jasa survey dan inspeksi marine sangat diperlukan sesuai dengan permintaan pemakai jasa dan juga menunjang kegiatan jasa klasifikasi kapal."

" Survey and inspection marine services was needed according with customer request and also support to ship classification services."

TYPES OF PRODUCTION ACTIVITIES	ACTIVITY
- Ship Survey Condition	238
- Bollard Pull Test	27
- Inclining Test	10
- Merger Test	225
- On Hire Survey / Off Hire Survey	52
- Towing Tank	47
- Gas Free Inspection	10
- Ship Loading Tank Calibration	20
- Ship Speed Trial	9
- Supervision of Ship Fabrication	28
- Drawing of Ship	15
- Stability of Ship	36
- Ship Particulars	9

MARINE CONSULTANT SERVICE	ACTIVITY
- ISM Manual System (DOC & SOC)	2
- Standard Operating Procedure (SOP)	5
- ISPS Code	3

Pelatihan Publik
Public Training

Disamping itu, BKI juga melakukan pelatihan teknik yang secara rutin diselenggarakan, baik dalam public training maupun in-house. Pelatihan yang diselenggarakan adalah :

In addition, BKI also holds routine technical trainings both in public trainings and in-house trainings. The trainings are:

TYPES OF TRAININGS	ACTIVITY
- Internal Safety Auditor Course for ISM Code	8
- Marine Suveyor Course	11
- Internal Security Auditor Course for ISPS Code	8
- Welding Inspections Course	5
- Crane Operator Course	1

" Sesuai dengan misi yang diemban, BKI juga melakukan riset dan pengembangan Rules & Regulation sebagai standar teknis kapal."

" In accordance with its mission, BKI also conduct research and development, particularly Rules & Regulation development as ship technical standards."

Penelitian & Pengembangan
Research & Development

Di 2008 selain penambahan untuk penerbitan serta pembaharuan peraturan-peraturan teknik klasifikasi kapal, regulasi-regulasi dan juga standar-standar teknik berkaitan dengan kapal BKI juga fokus dalam melakukan penelitian tentang konstruksi kapal. Aktifitas-aktifitas penelitian tersebut meliputi ;

At 2008 beside in addition to publishing and up dating of ship classification rules, regulations and also technical standards related to ship BKI is also in focus to carry out research on ship structure. These research activities include;

Kekuatan Lambung untuk Kapal-Kapal Tanker Berumur

Tujuan dalam analisa ini berdasarkan jumlah kapal-kapal tanker yang telah berumur lebih dari 25 tahun yang masih beroperasi di Indonesia. Resiko kegagalan konstruksi secara serius akan dapat menyebabkan kegagalan secara potensial untuk lingkungan laut. Evaluasi konstruksi tentang kemampuan konstruksi sisa dilakukan berdasarkan pemeriksaan kondisi luluh dan tekuk dari anggota-anggota konstruksi utama. dalam kasus ini, laju korosi yang dipergunakan dalam bentuk pendekatan semi peluang.

Hull girder strength of aging oil tanker ships

Goal in this analysis based on the number of ships tankers aged over 25 years that are still operating in Indonesia. Domestic regulations still allow for this vessel operation. Risk of failure of the structure can cause potential damage to the marine environment very seriously. Structural Evaluation of the remaining capacity is carried out on yielding and buckling check of the primary members. In this case, the corrosion rate is used in semi-probabilistic approach.

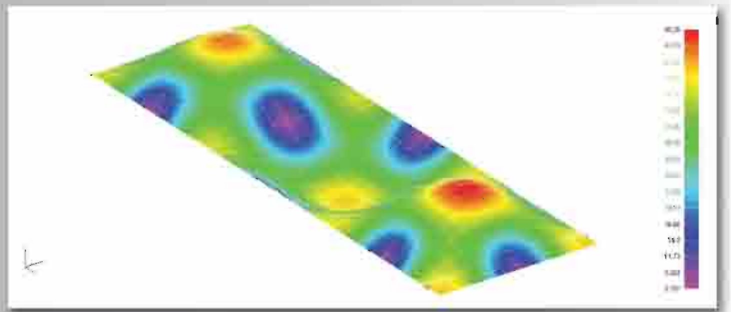

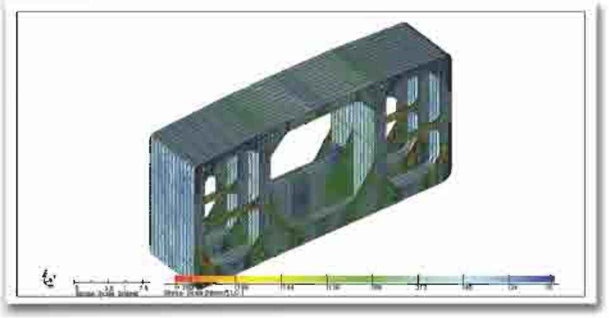

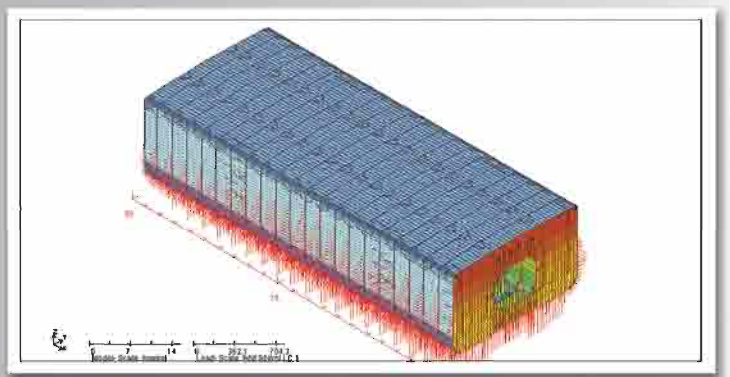

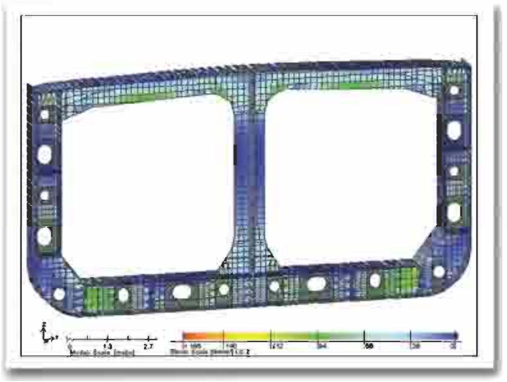

Penerapan metode fatigue crack propagation untuk mengevaluasi umur struktur kapal

Dalam evaluasi kelelahan anggota-anggota konstruksi kapal ada banyak variabel yang mempengaruhi seperti bahan-bahan statik dan dinamik, kondisi pengelasan yang dipengaruhi oleh dampak dari cacat-cacat produksi, ukuran pengelasan, dan lain-lain. Banyak peneliti menyarankan metode baru untuk mengevaluasi konstruksi kapal didasarkan pada penjalaran kelelahan retak dengan pertimbangan variabel-variabel tersebut. Bagaimanapun beberapa kekurangan seperti waktu perhitungan yang lama dan juga sejumlah parameter yang harus diketahui menyebabkan metode inibelum dapat diterapkan secara langsung dikonstruksi kapal. Untuk itu perlu dipikirkan pengembangan metode baru yang lebih mudah sehingga dapat mengurangi waktu perhitungan dan juga dapat diterapkan dalam pemeriksaan kapal.

On application of fatigue crack propagation method to evaluate ship structural lifetime

In evaluation of fatigue of ship structural members there are many variables that influence such as the static and dynamic loads, welding condition that is affected by the effects of production defects, welding dimension, etc. Many researchers have suggested new method to evaluate ship structure based on the fatigue crack propagation with consider those variables. However some weaknesses such as the huge calculation time and the number of parameters that must be known to cause this method can not be applied directly to ship structure members. For that need to be thought a development of new method more simple so that it can reduce the calculation time and can be applied in inspection of ship.

Sesuai dengan misi yang diemban, BKI juga melakukan riset dan pengembangan terutama untuk pengembangan Rules & Regulation sebagai standar teknis kapal serta mempublikasikannya. Kegiatan penelitian dan pengembangan Rules & Regulation yang telah dilaksanakan tahun 2008 menghasilkan publikasi sebagai berikut :

In accordance with its mission, BKI also makes research and development, particularly Rules & Regulation development as ship technical standards. R&D activities during 2008 produce the publications as follows :

- *Instruction to Surveyor Part A : Classification;*
- *Instruction to Surveyor Part B : Statutory;*
- *Rules for Hull (Volume II – 2008);*
- *Rules for Classification & Survey Volume I – 2007 (Bahasa Indonesia);*
- *Rules for Industrial Services.*

Hingga posisi akhir Desember 2008, BKI telah menerbitkan sejumlah Rules & Regulation, yaitu :

In Until at the end of December 2008, BKI has issued some Rules, namely:

List of BKI's Rules:

1. *Rules for Classification and Surveys (Volume I- 2007);*
2. *Rules for Hull (Volume II- edition 2006);*
3. *Rules for Machinery Installation (Volume III-Edition 2007);*
4. *Rules for Electrical Installations (Volume IV-Edition 2007);*
5. *Rules for Materials (Volume V-Edition 2006);*
6. *Rules for Welding (Volume VI-Edition 2004);*
7. *Rules for Automation (Volume VII-Edition 2007);*
8. *Rules for Refrigerating Installations (Volume VIII-Edition 2001);*
9. *Rules for Ships Carrying Liquefied Gases In Bulk (Volume IX-Edition 2005);*
10. *Rules for Ships Carrying Dangerous Chemicals In Bulk (Volume X-Edition 2002);*
11. *Rules for Inland Waterway vessels Chapter 1-Hull Construction (Edition 1996);*
12. *Rules for Inland Waterway vessels Chapter 2-Machinery Installations (Edition 1996);*
13. *Rules for Inland Waterway vessels Chapter 3-Electrical Installation (Edition 1996);*
14. *Rules for High Speed Vessels (Edition 1996);*
15. *Rules for Fibreglass Reinforced Plastic Vessels (Edition 1996);*
16. *Rules for Wooden Ship (Edition 1996);*
17. *Rules for Mobile Offshore Drilling Units and Special Purpose Units (Edition 1999);*
18. *Rules for Stowage and Lashing of Containers (Edition 1999);*
19. *Rules for Classification and Construction of High Speed Craft (Edition 2000);*
20. *Rules for Offshore Mooring Chains (Edition 2000);*
21. *Rules for Mooring and Loading Installations (Edition 2002);*
22. *Rules for The Classification and Construction of Offshore Installations (Volume 1 : Rules For Classification and Survey- Edition 2002);*
23. *Rules for The Classification and Construction of Offshore Installations (Volume 2 : Rules For Structures Machinery Installations - Edition 2002);*
24. *Rules for The Classification and Construction of Offshore Installations (Volume 3 : Rules For Specific Type of Units and Equipment - Edition 2002);*
25. *Rules for The Classification and Construction of Offshore Installations (Volume 4 : Rules For Machinery Installations - Edition 2002);*
26. *Rules for The Classification and Construction of Offshore Installations (Volume 5 : Rules For Electrical Installations -Edition 2002);*
27. *Rules for Floating Docks (Edition 2002);*
28. *Rules for Fishing Vessels (Edition 2003);*
29. *Rules for Oil Recovery Vessel (Edition 2005);*
30. *Rules for Non Metalic Material (Edition 2006);*
31. *Common Structural Rules for Tanker;*
32. *Common Structural Rules for Bulk Carrier;*
33. *Rules for Approval of Manufacturers and Service Suppliers.*

List of BKI's Regulation:

1. Regulation for The Testing of Engines Produced in Series (Edition of 1996);
2. Regulation for The Calculation of Diesel Engines Crankshaft (Edition of 1996);
3. Regulation for The Seating of Diesel Engines Installations (Edition of 1996);
4. Regulation for The Design, Construction and Testing of Pumps (Edition of 1996);
5. Regulation for Equipment on The Fire Fighting Ships (Edition of 1996);
6. Regulation for Construction, Equipment and Testing of Closed Fuel Overflow System (Edition of 1996);
7. Regulation for The Installation and Ventilation of Storage Batteries and The Construction of Battery Chargers (Edition of 1996);
8. Regulation for Electromagnetic Compatibility of Electrical Equipment (Edition of 1996);
9. Regulation for Lighting (Edition of 1996);
10. Regulation for Variable Frequency Ships Mains Operation (Variable Frequency Operation (Edition of 1996);
11. Regulation for The Use of Computer and Computer Systems (Edition of 1996);
12. Regulation for The Performance of Type Test, Part 1 : Procedure (Edition of 2002);
13. Regulation for The Performance of Type Test, Part 2 : Test Requirements For Electrical / Electronic Equipment, Computer and Peripheral (Edition of 2002);
14. Regulation for The Performance of Type Test, Part 3 : Test Requirements For Sealing Systems of Bulkhead and Deck Penetrations (Edition of 2002);
15. Regulation for The Performance of Type Tests, Part 4 : Test Requirements for Electrical Machinery (Edition of 2002);
16. Regulation for The Performance of Type Tests, Part 5 : Test Requirements for Mechanical Components and Equipment (Edition of 2004);
17. Regulation for Mass Produced Engines (Edition of 1996);
18. Regulation for The Construction and Survey of Lifting Appliances (Edition of 1998);
19. Regulation for Construction, Repair and Testing of Freight Containers (Edition of 1999);
20. Regulation for Assessment and Repairs of Defects on Propellers (Edition of 2000);
21. Regulation for Constructions and Testing of Towing Gears (Edition of 2000);
22. Procedure & Guidelines for The ISM-Code (Edition 2002)
23. Regulation for The Life Saving Launching Appliances (Edition of 2001);
24. Guidelines for Ocean Towage (Edition of 2001);
25. Guidelines for The Explosion Protection of Electrical Equipment (Edition of 2001);
26. Guidelines for Sea Trials of Motor Vessels (Edition of 2002 - English & Indonesian);
27. Regulation for The Inspection of Anchor Chain Cables (Edition of 2002);
28. Regulations for Redundant Propulsion and Steering Systems (Edition 2002);
29. Guidelines for Inclining Test of Ships (Edition 2003);
30. Regulation for The Classification and Construstion of Fibre Reinforced Plastic Workboat (Edition 2003);
31. Regulation for Ventilation Systems on Beard Seagoing Ships (Edition 2004);
32. Regulation for The Corrosion Protection and Coating Systems (Edition 2004);
33. Regulation for The Bridge Design on Seagoing Ships One Man Console (Edition 2004);
34. Guidelines for The Carriage of Refrigerated Containers on Board Ships (Edition 2004);
35. Regulation for Analysis Technique, Strength and Stability (Edition of 2005);
36. Guidelines for The Preparation of Damage Stability Calculation and Damage Control Documentation On Board (Edition of 2005);
37. Procedure & Guideline for ISPS Code (Edition of 2004);
38. Guidelines for Thickness Measurements of ship's plate (Edition of 2005);
39. Guidelines for Condition Assessment Scheme (CAS)(Edition of 2006);
40. Guidelines for Classification & Construction of Wing-In Ground Craft (WIG-Craft) (Edition 2006);
41. Guidance for Implementation Marpol 73/78 Annex VI (Edition 2006).

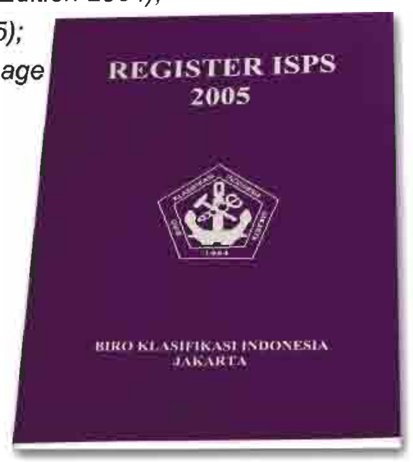

" BKI menyadari sepenuhnya bahwa Human Resources adalah bagian paling penting yang harus dimaintain dan ditingkatkan kompetensinya "

" BKI fully realizes that Human Resources is the most important part of which the competence should be maintained and improved "

Pengembangan Sumber Daya Manusia
Human Resources Development

Sumber Daya manusia (SDM) yang handal dan kompeten merupakan tulang punggung BKI dalam menghadapi persaingan bisnis dan upaya meningkatkan kepercayaan. Prestasi perusahaan yang telah dicapai sangat ditunjang oleh kompetensi dan profesionalisme SDM,yang merupakan hasil dari program pengembangan SDM selama tahun 2008. Peningkatan prestasi tersebut antara lain dapat ditunjukkan dengan adanya peningkatan produktivitas, sehingga Man Power Productivity (MPP) meningkat 12,2% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp 406 juta per personil. Sampai dengan 31 Desember 2008, BKI memiliki personil sebanyak 537 orang.

BKI menyadari sepenuhnya bahwa Human Resources adalah bagian paling penting yang harus dimaintain dan ditingkatkan kompetensinya. Dalam tahun 2008, biaya training yang dipergunakan mencapai 12,5% dari total biaya karyawan. Khusus untuk training bagi Surveyor, BKI telah memiliki Program Diklat Surveyor Terpadu sesuai dengan ketentuan IACS-QSCS. Sampai dengan Desember 2008, kompetensi personil yang dimiliki adalah:

The reliable and competent of human resources are highly required by BKI to encounter business competition and improve the trust.The company performance is highly supported by competence and professionalism of human resources, being the result of human resources development program during 2008. The improvement of the performance are among others indicated in the improvement of productivity, so that Man Power Productivity (MPP) increases 12.2% than that in the last year to Rp 406 million per employee. Until December 31, 2008, BKI has 537 employees.

BKI fully realizes that Human Resources is the most important part of which the competence should be maintained and improved. In 2008, training expense was 12,5% of total employee expense. For Surveyor training, BKI has implemented Integrated Surveyor Training Programme pursuant to IACS-QSCS. Until December 2008, personnel competence are:

Principal Surveyor (Class)	15	Crane Inspector (Depnaker)	53
Senior Surveyor (Class)	54	Crane Inspector (Migas)	26
Surveyor (Class)	58	Pipeline Inspector	15
Assistant Surveyor (Class)	17	Offshore Pipeline Inspector	9
Inspector	146	Casing & Tubing Inspector	10
Radiography Expert Level I	10	Tank Storage Inspector	19
Radiography Expert Level II	5	Radiation Protection Officer	4
NDT Level I	6	Cathodic/Corrosion Inspector	14
NDT Level II	49	Safety Auditor	128
Welding Inspector	149	Quality Auditor	46
Welding Inspector – AWS	3	Security Auditor	89
Boiler/PV Inspector (Depnaker)	15	Information Technology Specialist	7
Boiler/PV Inspector (Migas)	19		

POSISI TENAGA TEKNIK
TECHNICAL STAFF COMPOSITION

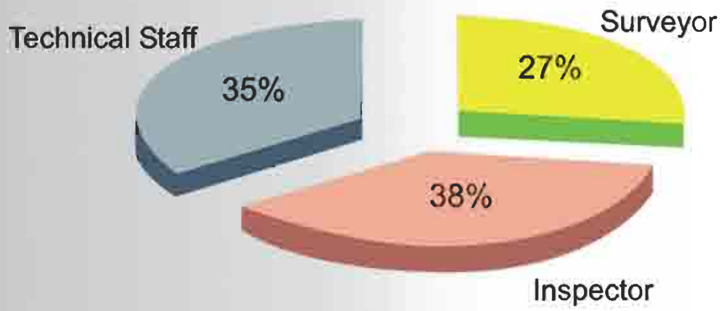

POSISI SDM SESUAI USIA
MANPOWER BASED ON AGE COMPOSITION

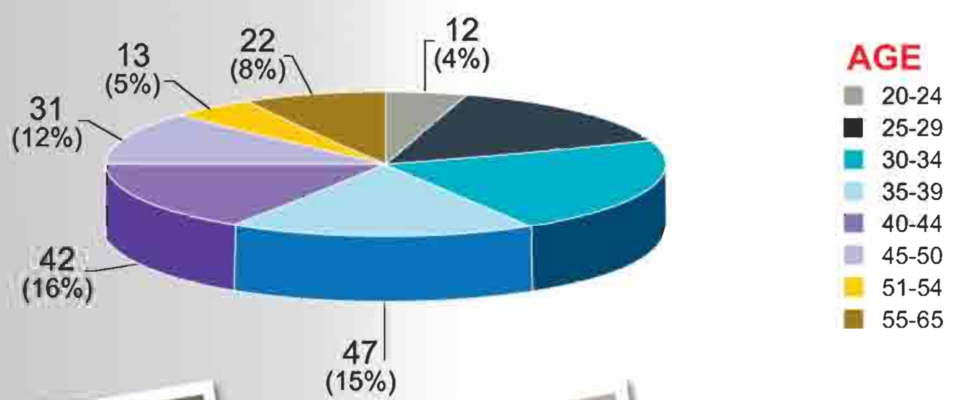

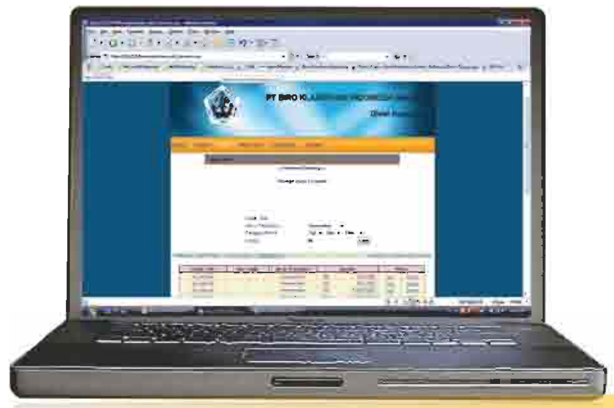

" Seluruh aplikasi COpS, CSOpS, PersoSys, FinOpS, EFS dan Website BKI sepenuhnya dikembangkan sendiri oleh ahli-ahli teknologi informasi yang dimiliki BKI. "

" All of BKI's applications (COpS, CSOpS, PersoSys, FinOp, EFS and Website) are fully developed by BKI's IT expert. "

Teknologi Informasi
Information Technology

Dalam meningkatan pelayanan jasa dan percepatan proses reporting, BKI telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen dengan mengembangkan beberapa aplikasi baik untuk perkantoran maupun aplikasi perhitungan teknik. Desain pemanfaatan Teknologi Informasi terilustrasi dalam diagram berikut :

In improving the services and acceleration of report processing, BKI has developed Management Information System by developing some applications both for offices and also for technical calculation. The design of Information Technology applications illustrated on diagram as follows:

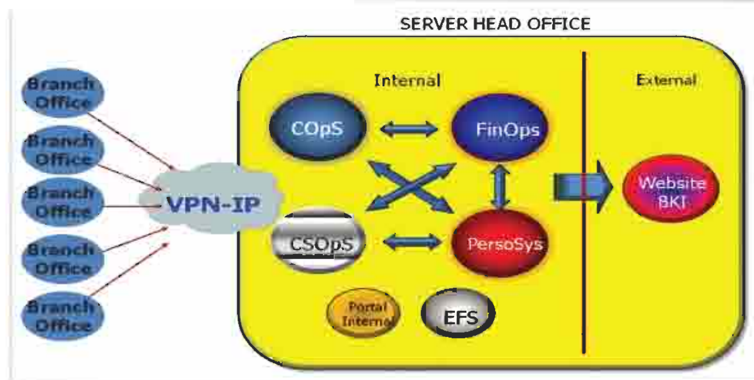

Visi dalam pengembangan teknologi informasi ini adalah mengurangi pekerjaan dengan menggunakan kertas, informasi yang disajikan selalu terkini, integrasi data antara kantor pusat dan kantor cabang, memberikan akses informasi yang akurat kepada pelanggan melalui website BKI. Seluruh aplikasi COpS, CSOpS, PersoSys, FinOpS, EFS dan Website BKI sepenuhnya dikembangkan sendiri oleh ahli-ahli teknologi informasi yang dimiliki BKI.

Vision of the Information Technology development are to reduce paperwork to be paperless work, up to date information based on real time process, data integrity between head office and branch office and accessability to BKI's Customer to get accuracy information via BKI's website. All of BKI's applications (COpS, CSOpS, PersoSys, FinOp, EFS and Website) are fully developed by BKI's IT expert.

Classification Operation System (COpS)

BKI telah mengembangkan sistem komputerisasi terpadu untuk penanganan survey klasifikasi dan statutoria, mulai dari permohonan survey hingga penerbitan sertifikat. Aplikasi ini disebut Classification Operation System (COpS). Dengan penerapan aplikasi COpS ini memberikan benefit dalam mempercepat proses permohonan survey, aktivitas survey, survey report, proses sertifikasi hingga invoicing. Berdasarkan proses layanan jasa, beberapa informasi dapat diakses langsung oleh pelanggan melalui website BKI meliputi informasi status survey / audit, status persetujuan gambar / rencana, status penerbitan sertifikat, status tagihan dan informasi data register kapal. Hal ini menunjukkan komitmen BKI untuk terus melakukan improvement yang fokus kepada pemakai jasa dalam rangka mewujudkan kepuasan pelanggan, khususnya pelanggan jasa klasifikasi dan statutoria.

BKI has developed an integrated computerization system to handle survey classifications, starting from request for survey through issue of certificate. This application is called Classification Operation System (COpS). The benefit of the COpS application are to accelerate survey request process, survey activities, survey report process, certification process through invoicing process. Based on actual services process , some informations may accessed by customer via BKI's website, including information of survey / audit status, drawing / plan approval status, certification process status, statement of account and ship's register data. It indicates BKI has commitment to continuously making an improvement focusing on the customers in the framework of satisfying of the customer, especially classification and statutory customer.

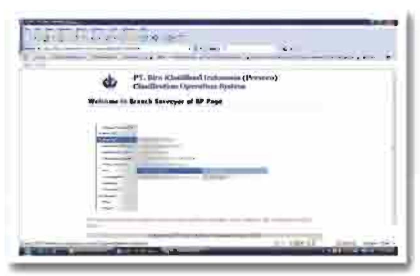

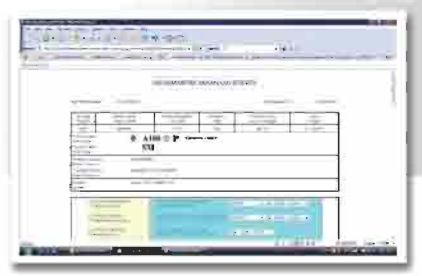

Consultation & Supervision Operation System (CSOpS)

BKI telah mengembangkan sistem komputerisasi terpadu untuk penanganan jasa konsultansi dan supervisi, mulai dari disetujuinya kontrak / permintaan hingga proses pelaporan dan sertifikasi. Aplikasi ini disebut Consultation & Supervision Operation System (CSOpS). Dengan penerapan aplikasi CSOpS ini memberikan benefit dalam mengendalikan setiap order yang diterima, meliputi informasi yang berkaitan dengan detail order, jangka waktu pekerjaan, kemajuan fisik, personil yang bertanggung jawab, peralatan pengujian yang dipergunakan, transaksi pendapatan dan biaya untuk setiap order hingga informasi pelaporan dan sertifikasi. Aplikasi ini juga mempunyai kemampuan dalam informasi Risk Assessment, Early Warning System (EWS), Cost Control System (CCS) untuk mengendalikan pengeluaran biaya setiap order yang dikerjakan. Akhir dari proses ini, beberapa informasi dapat diakses langsung oleh pelanggan melalui website BKI meliputi informasi status sertifikasi dan informasi tagihan.

BKI has developed an integrated computerization system to handle consultation and supervision services, starting from approval of contract / request through process of reporting and certification. This application is called Consultation and Supervision Operation System (CSOpS). The benefit of the CSOpS application are to easily handling of every single order approved, including informations related with order detail, time schedule, phisical progress of order, personnel involved, testing equipments used, all financial transaction (revenue & cost) per order through reporting and certification information. This application also has ability to give information of Risk Assessment, Early Warning System and Cost Control System to controlling every single cost expense for each order received. Based on actual services process, some informations may accessed by customer via BKI's website, including certification status and statement of account.


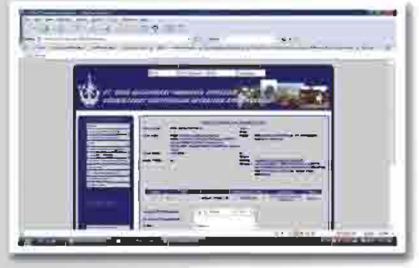


Financial Operation System (FinOpS)

BKI juga terus mengembangkan sistem komputerisasi terpadu untuk penanganan sistem finansial dan akuntansi yang dapat diakses secara on-line antara Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Aplikasi ini disebut Financial Operation System (FinOpS) dan telah efektif diterapkan sejak tahun 2008. Dengan penerapan aplikasi ini memberikan benefit dalam mempercepat proses pencatatan transaksi keuangan dan pendapatan, mempercepat penyajian laporan keuangan dan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Aplikasi ini melibatkan personil administrasi keuangan, baik di kantor cabang maupun kantor pusat, meliputi transaksi harian kas / bank, perpajakan, invoicing & piutang hingga buku besar. Aplikasi ini juga membantu mempercepat proses audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik.

BKI has also developing an integrated computerization system to handle financial and accounting system that able to access between Head Office and Branch Office in on-line basis. This application is called Financial Operating System (FinOpS) and fully implemented in year 2008. The benefits of implemetation of this application to accelerate financial and revenue transaction recording, financial reports and financial information for decision makers. This application involving all financial admin personnel both in the branch office and head office, including daily cash and bank transaction, taxation, account payable and account receivable through general ledger.This apllication also assist to accelerate financial audit process by public / independent accountant office.


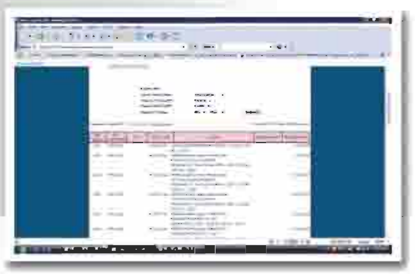
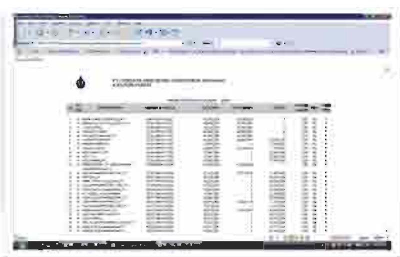

PersoSys (Personnel Data System)

BKI juga terus mengembangkan sistem komputerisasi terpadu untuk penanganan sistem administrasi personalia yang disebut Personnel Data System (PersoSys). Aplikasi ini berisi data-data personil BKI meliputi data pribadi, data pengalaman, data pendidikan, data penggajian, data kinerja dsb. Dengan penerapan aplikasi ini memberikan benefit dalam mempercepat proses pencatatan administrasi personalia dan mempercepat penyajian informasi personalia sebagai dasar pengambilan keputusan.

BKI has also developing an integrated computerization system to handle personnel administration system which is called Personnel Data System (PersoSys). The application consist of all of BKI's personnel data, including personnel data, experience data, training data, payroll data, performance data etc. The benefits of implemetation of this application to accelerate personnel recording and personnel information for decision makers.



Electronic Filing System (EFS)

Secara bertahap seluruh laporan survey dalam bentuk kertas dirubah dalam bentuk elektronik dan terintegrasi dalam aplikasi Electronic Filing System (EFS) yang mudah diidentifikasi dan mudah dalam pencarian data Laporan Survey. Aplikasi EFS ini dapat diakses oleh Staf teknik di Kantor Pusat maupun para surveyor BKI.

All of Survey Report on papers (hard copies) are converted to electronic format step by step and integrated on Electronic Filling System (EFS) Application which is easy to identifiy and easy for traceability the data of Survey Report. The EFS Application accessable by technical staff on Head Office and also all of BKI surveyors.



BKI Website

BKI telah meluncurkan Website tampilan baru sebagai bagian integral dari pelayanan prima bagi pemakai jasa dengan akses informasi 24 jam secara on-line. Pemakai jasa dengan otorisasi yang diberikan dapat mengakses status survey / audit armada kapalnya. Demikian pula dapat di download semua Rules & Regulation, publikasi BKI, form aplikasi, termasuk Owner's Guide.

BKI has launched new format of BKI website as an integral part of its prime services to our customers with information access for 24 hours on-line. With the authorization, the customers can access survey / audit status of their ship fleet. All Rules & Regulation, BKI publications, application forms, including Owner's Guide can also be downloaded.



Prioritas pembinaan tahun 2008 kepada usaha kecil baik perorangan maupun badan dan Koperasi (KUD) terutama KUD calon mandiri.

Priority of development in 2008 is given to small-scale enterprises, both managed by individuals and body, and Cooperatives (KUD) especially independent-to-be KUD.

Tanggung-jawab Sosial
Social Responsibility

Perusahaan pada tahun 2008 telah menyalurkan pinjaman dana sebesar Rp 1.215 juta untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dana tersebut berasal dari penyisihan laba, sebagaimana telah disebutkan dalam keputusan RUPS dan dari pengembalian pinjaman.

Tujuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah mengembangkan dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan menjaga tata hubungan yang mendorong tumbuhnya kondisi saling menunjang antara BUMN, koperasi dan swasta khususnya pengusaha kecil dan koperasi serta mendorong koperasi dan usaha kecil sebagai lembaga ekonomi rakyat yang mampu melaksanakan, meningkatkan dan mengembangkan usahanya secara lebih efektif dan efisien serta dapat memberi nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi para anggotanya maupun masyarakat di sekitar.

Adapun sasarannya adalah terciptanya kesempatan usaha dan lapangan kerja yang lebih luas bagi usaha kecil dan koperasi sampai ke masyarakat pedesaan, serta terselenggaranya sistim manajemen yang lebih rasional dan efisien yang diikuti dengan peningkatan kemampuan baik permodalan, personil, administrasi, keuangan maupun kemandirian wirausaha. Prioritas pembinaan tahun 2008 kepada usaha kecil baik perorangan maupun badan dan Koperasi (KUD) terutama KUD calon mandiri.

Jumlah realisasi dana yang terdistribusi pada tahun 2008 sebesar Rp 1.215 juta yang disalurkan kepada 3 wilayah binaan, yaitu :

In 2008, the Company distributed fund loan amounting to Rp 1,215 million for Partnership and Environmental Development Program. The fund is generated from capital separation as mentioned in resolutions of General Meeting of Shareholders (GMS) and from loan return.

The objective of Partnership and Environmental Development Program is to develop and create a favorable business climate and maintain relation order that stimulates the growing of a condition that supports each other among State-owned Enterprises (BUMN), cooperatives and private enterprises especially small-scale enterprises and cooperatives, and encourage cooperatives and small-scale enterprises as people's economic institutions that are able to carry out, improve and develop their businesses more effectively and efficiently and can give value added and more benefit to their members as well as the surrounding community.

Whereas the target is the creation of wider business opportunity and employment for small-scale enterprises and cooperatives up to village community, and the organization of management system that is more rational and efficient followed by the increase of capacity in terms of capital, personnel, administration, finance and entrepreneurship independence. Priority of development in 2008 is given to small-scale enterprises, both managed by individuals and body, and Cooperatives (KUD) especially independent-to-be KUD.

Fund realization distributed in 2008 amounts to Rp 1,215 million, distributed to 3 development areas, namely:

Wilayah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Jumlah
DKI Jakarta	500	545	27
DI Yogyakarta	250	310	25
Jawa Timur	320	360	17
TOTAL	1.070	1.215	69

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik memberikan manfaat besar bagi kinerja Perusahaan secara keseluruhan. Tata Kelola Perusahaan yang baik juga menjadi sarana perusahaan mengembangkan aset, akuntabilitas kepada para stakeholder dan menjaga nilai jangka panjang stakeholder.

Panduan Dewan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
RUPS merupakan Organ Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. RUPS berhak memperoleh seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan dan meminta pertanggungjawaban Komisaris dan Direksi yang berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan. Pada tahun 2008, Perusahaan telah mengadakan RUPS pengesahan RKAP pada tanggal 27 Januari 2009 di Jakarta dan RUPS pertanggung jawaban Laporan Manajemen tahun 2007 pada tanggal 24 Juni 2008 di Jakarta.

Komisaris
Komisaris bertugas mengawasi tindakan dan memberikan masukan kepada Direksi demi kepentingan Perusahaan, Pemegang Saham, serta pihak yang berkepentingan pada umumnya. Komisaris telah memastikan agar Direksi dalam kondisi apapun mempunyai kemampuan menjalankan tugasnya. Komisaris secara teratur memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi agar selalu sesuai dengan tujuan Perusahaan dan arahan Pemegang Saham. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris telah mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris
Pada tahun 2008, Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya yang antara lain adalah membahas dan memberi pengesahan RKAP dan RKA Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, memberi saran-saran kepada Direksi dalam melaksanakan RKAP 2008. Tugas Komisaris lain yang juga telah dilakukan adalah meminta penjelasan dari Direksi mengenai perkembangan kinerja korporasi pada setiap periode triwulanan, membahas penyusunan dan memberi persetujuan GCG Manual, membentuk Komite Audit, memberi persetujuan atas perubahan anggaran dan investasi yang diajukan Direksi, mengusulkan dalam RUPS dalam penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Buku 2008, membahas laporan Komite Audit serta mengadakan rapat koordinasi dengan Direksi terhadap pengelolaan perusahaan.

The application of Good Corporate Governance gives substantial benefit to the Company's performance as a whole. Good Corporate Governance also becomes a facility for the Company to develop assets, accountability to stakeholders and maintain long-term value of stakeholders.

Board Manual

General Meeting of Shareholders (GMS)
GMS is an Organ of the Company that holds the highest power in the Company and holds all authorities not assigned to Board of Directors or Board of Commissioners. GMS reserves the right to obtain all relevant information on the Company and demand accountability of Board of Commissioners and Board of Directors with respect to the management of the Company. In 2008, the Company held GMS to authenticate RKAP on January 27, 2009 in Jakarta and GMS for accountability of Management Report of 2007 on June 24, 2008 in Jakarta.

Board of Commissioners
Board of Commissioners has the duty to supervise the action of and give input to Board of Directors for the sake of the interest of the Company, Shareholders, and the stakeholders in general. Board of Commissioners has ensured that Board of Directors is in any condition whatsoever able to perform its duties. Board of Commissioners regularly monitors the effectiveness of policy implementation and decision making process conducted by Board of Directors in order that it is always in line with the objectives of the Company and direction of Shareholders. In performing its duties, Board of Commissioners has complied with Articles of Association and the applicable Laws and Regulations.

Implementation of Duties and Responsibilities of Board of Commissioners
In 2008, Board of Commissioners performed its duties and responsibilities, among others, discussing and giving authentication to RKAP and RKA of Partnership and Environmental Development Program, giving advices to Board of Directors in implementing RKAP of 2008. Other duties of Board of Commissioners that have also been conducted are requesting explanation from the Board of Directors concerning the development of corporate performance in every quarter, discussing the preparation and giving approval of GCG Manual, establishing Audit Committee, giving approval to change in budget and investment proposed by Board of Directors, proposing in GMS for the appointment of KAP (Office of Public Accountant) that will audit Consolidated Financial Statement Fiscal Year of 2008, discussing report of Audit Committee as well as holding coordinating meeting with Board of Directors on the management of the Company.

Remunerasi Komisaris

Remunerasi yang diberikan kepada Komisaris atas peran yang diberikan untuk pengurusan dan pengawasan Perusahaan. Sesuai dengan Keputusan RUPS tanggal 27 Januari 2009 di Jakarta, besarnya remunerasi Komisaris adalah sbb :

Remuneration of Board of Commissioners

Remuneration is provided to Board of Commissioners for its role played in the management and supervision to the Company. In accordance with Resolutions of GMS held on January 27, 2009 in Jakarta, the amount of remuneration for Board of Commissioners is:

No.	Nama	Remunerasi / bulan		Tantiem
		Honorarium	Tunjangan Transport	
1.	Capt Albert Lapian	8.800.000	1.760.000	10.560.000
2.	Drs.Budiarso Teguh Widodo	7.920.000	1.584.000	9.504.000
3.	Drs.Achmad Chotibudin, MM	7.920.000	1.584.000	9.504.000

Efektifitas Kerja Komisaris

Komisaris mengadakan rapat 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu untuk membicarakan berbagai permasalahan dan bisnis Perusahaan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja. Panggilan rapat Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Dalam panggilan rapat tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

Semua rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Semua keputusan dalam rapat Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan rapat komisaris diambil dengan suara terbanyak. Setiap anggota Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Komisaris yang diwakilinya.

Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang menggambarkan situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan, argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil serta pernyataan keberatan terhadap kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat. Risalah rapat yang dibuat ditanda-tangani ketua rapat dan oleh salah seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir. Setiap anggota Komisaris telah menerima salinan risalah rapat Komisaris, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut.

Pada tahun 2008, Komisaris melakukan rapat sebanyak 19 kali dengan prosentase kehadiran sbb :

- Capt Albert Lapian (Komisaris Utama) : 100%
- Drs. Budiarso Teguh Widodo (Komisaris) : 88%
- Drs. Achmad Chotibudin, MM (Komisaris) : 100%

Disamping rapat internal tersebut, Komisaris juga melakukan rapat koordinasi dengan Direksi sebanyak 6 kali.

Effectiveness of Work of Board of Commissioners

Board of Commissioners holds meeting 1 (one) time a month and at any time if deemed necessary to discuss various matters and business of the Company as well as conduct evaluation to the performance. Summon to meeting of Board of Commissioners is made in writing by President Commissioner or by a member of Board of Commissioners appointed by President Commissioner. Such summon to meeting must specify the agenda, date, time and venue of the meeting.

All meetings of Board of Commissioners are chaired by President Commissioner. All resolutions made in a meeting of Board of Commissioners are adopted through mutual consensus. In the event that resolutions cannot be adopted through mutual consensus, resolutions of meeting of Board of Commissioners are adopted by majority votes. Every member of Board of Commissioners is entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for a member Board of Commissioners it represents.

Every meeting of Board of Commissioners is made into minutes of meeting that describes the situation that develops, decision making process, argumentation presented, conclusion drawn, and statement of objection to the meeting conclusion in case of non unanimity. Minutes of meeting is signed by meeting chairman and by one of the members of Board of Commissioners appointed by and from among those present. Every member of Board of Commissioners has received a copy of minutes of meeting of Board of Commissioners even though the relevant person is absent in the meeting.

In 2008, Board of Commissioners held as many as 19 meetings with percentage of presence as follows:

- *Capt Albert Lapian (President Commissioner) : 100%*
- *Drs. Budiarso Teguh Widodo (Commissioner) : 88%*
- *Drs. Achmad Chotibudin, MM (Commissioner) : 100%*

In addition to such internal meeting, Board of Commissioners also held as many as 6 coordinating meetings with Board of Directors.

Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit yang ditetapkan dengan SK Komisaris Utama No: DU.105/LT.101/KI-07 tanggal 31 Juli 2008 menyebutkan, Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Komisaris.

Audit Committee

Duties and responsibilities of Audit Committee is that as set out in Charter of Audit Committee stipulated under the Decree of President Commissioner No.: DU.105/LT.101/KI-07 dated July 31, 2008, which mentions that Audit Committee's duty is to give opinion to Board of Commissioners for report or matters submitted by Board of Directors to Board of Commissioners, identify matters requiring attention of Board of Commissioners and perform other duties relating to the duties of Board of Commissioners.

Susunan Komite Audit adalah :

Ketua : Drs. Achmad Chotibudin, MM
Anggota : H.M Masrie Simatupang
Supono

Ketua Komite Audit adalah juga Komisaris, sedangkan anggota Komite Audit adalah independen sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomer Per-05/MBU/2006. Sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Komite Audit bahwa Komite Audit mengadakan rapat internal minimal 1 bulan sekali dan hasil pembahasan dituangkan dalam risalah rapat. Selama tahun 2008, Komite Audit telah mengadakan rapat internal sebanyak 31 kali dengan topik pembahasan yang bervariasi sesuai kebutuhan perusahaan.

Composition of Audit Committee is as follows:

Chairman : Drs. Achmad Chotibudin, MM
Members : H.M. Masrie Simatupang
Supono

Chairman of Audit Committee is also a Commissioner, while members of Audit Committee are independent in accordance with the criteria in Regulation of Minister of State for State owned Enterprises (BUMN) Number Per-05/MBU/2006. In accordance with the provisions in Audit Committee Charter, Audit Committee holds internal meeting at least 1 time a month and the result of discussion is set out in minutes of meeting. During 2008, Audit Committee held as many as 31 internal meetings with different topics in accordance with the need of the Company.

Direksi

Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, telah mengurus dan mengelola bisnis untuk kepentingan Perusahaan yang sebesar-besarnya. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang terkait dengan aktivitas Perusahaan. Direksi telah bertindak secara transparan, berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi telah menggunakan wewenang dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan semata-mata hanya untuk kepentingan Perusahaan.

Board of Directors

Board of Directors has in good faith and fully responsible arranged and managed the business for the best interest of the Company. In performing its duties, Board of Directors still considers the balance of interest for all parties related to the Company's activity. Board of Directors has performed transparently, carefully and considered various important aspects relevant with the implementation of its duties. Board of Directors has used the authority and resources owned by the Company solely for the interest of the Company.

Direksi mempunyai tugas utama :

- Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan.
- Menerapkan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang sehat dalam perusahaan.
- Bertugas sesuai anggaran dasar Perusahaan keputusan RUPS serta peraturan lainnya.
- Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Board of Directors has its main duties as follows:

- *To lead and manage the Company in accordance with the purpose and objectives of the Company.*
- *To improve efficiency and effectiveness of the Company.*
- *To apply the principles good corporate governance in the Company.*
- *To conduct its duties in accordance with the Articles of Association of the Company, resolutions of GMS as well as the other regulations.*
- *Board of Directors reports to Shareholders through a General Meeting of Shareholders.*

Remunerasi Direksi

Remunerasi yang diberikan kepada Direksi atas peran yang diberikan untuk pengurusan dan pengawasan Perusahaan. Sesuai dengan Keputusan RUPS yang dilaksanakan tanggal 27 Januari 2009 di Jakarta, adalah sebagai berikut :

Remuneration for Board of Directors

Remuneration provided to members of Board of Directors for its role played in the management and supervision over the Company in accordance with Resolutions of GMS held on January 27, 2009 in Jakarta is as follows:

No.	Nama	Remunerasi / bulan		Tantiem
		Honorarium	Tunjangan Transport	
1.	Ir. Muchtar Ali	22.000.000	6.600.000	28.600.000
2.	Drs. Donny S. Purba	19.800.000	5.940.000	25.740.000
3.	Ir. Haryanto	19.800.000	5.940.000	25.740.000
4.	Ir. Wibisono	19.800.000	5.940.000	25.740.000

Selain remunerasi diatas kepada Direksi juga diberikan fasilitas kendaraan dinas operasional masing-masing 1 (satu) unit sesuai dengan azas kepantasan dan kemampuan perusahaan.

Efektifitas Kerja Direksi
Secara umum efektifitas dan kinerja Direksi berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham. Pencapaian kinerja perusahaan telah melampaui target yang ditetapkan Pemegang Saham dalam Key Performance Indicator (KPI).

Direksi telah mengadakan rapat 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan. Dalam panggilan rapat tersebut telah mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Pada tahun 2008, Direksi melakukan rapat internal sebanyak 14 kali dan melakukan rapat koordinasi dengan Komisaris sebanyak 6 kali, dengan prosentase kehadiran sbb:

- Ir. Muchtar Ali : 100 %
- Drs. Donny S.Purba : 100 %
- Ir. Haryanto : 100 %
- Ir. R. Wibisono, MM : 100 %

Hubungan Kerja antara Komisaris dan Direksi
Komisaris dan Direksi telah mengadakan rapat koordinasi untuk membicarakan masalah perusahaan yang relevan. Dalam setiap pertemuan, informasi dan data yang penting untuk pemahaman Komisaris telah diberikan secara tertulis sebelum pertemuan untuk menjamin tersedianya waktu bagi Komisaris memahami permasalahan yang akan dibahas.

Dalam setiap Rapat tersebut telah dibuat risalah rapat yang menggambarkan situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan, argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil, serta pernyataan keberatan terhadap kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat. Selama tahun 2008, Direksi dan Komisaris telah melakukan rapat koordinasi sebanyak 6 kali.

Dalam hal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Satuan Pengawasan Intern (SPI), setiap pemeriksaan dilaporkan kepada Direktur Utama dan selanjutnya disampaikan kepada Komisaris sebagai bahan evaluasi dan kajian Komisaris dan Komite Audit.

In addition to the remuneration above, each member of Board of Directors is also given 1 (one) unit of operational official vehicles in accordance with the principle of appropriateness and the Company's ability.

Effectiveness of Work of Board of Directors
In general, effectiveness and performance of Board of Directors based on the duties and obligations set out in the applicable Laws and Regulations and Articles of Association of the Company and mandate of Shareholders. The Company's performance achievement has surpassed the target stipulated by the Shareholders in the Key Performance Indicator (KPI).

Board of Directors has convened meeting 1 (one) time a month and at any time if deemed necessary by one or more members of Board of Directors. Summon to meeting of Board of Directors is made in writing by a member of Board of Directors having the right to represent the Company. Such summon at least specifies the agenda, date, time and venue of the meeting. In 2008, Board of Directors held as many as 14 internal meetings and 6 coordinating meetings with Board of Commissioners, with percentage of attendance as follows:

- *Ir. Muchtar Ali : 100 %*
- *Drs. Donny S. Purba : 100 %*
- *Ir. Haryanto : 100 %*
- *Ir. R. Wibisono, MM : 100 %*

Work Relation between Board of Commissioners and Board of Directors
Board of Commissioners and Board of Directors have held coordinating meeting to discuss the Company's relevant problems. In every meeting, important information and data for understanding by Board of Commissioners have been provided in writing prior to the meeting in order to guarantee sufficiency of time for Board of Commissioners to understand the problems that will be discussed.

Each of the Meetings is made into minutes of meeting that describes the situation that develops, decision making process, argumentation presented, conclusion drawn, and statement of objection to the meeting conclusion in case of non unanimity. During 2008, Board of Directors and Board of Commissioners held as many as 6 coordinating meetings.

With respect to Report of Investigation Result (LHP) and Report of Specific Investigation Result from Internal Supervisory Unit (ICU), every investigation is reported to President Director and is further submitted to Board of Commissioners as materials of evaluation and study for Board of Commissioners and Audit Committee.

" Perusahaan telah menerapkan standar etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip GCG."

" The Company has applied standard of ethics in all of its business activities based on the principles of GCG."

Pedoman Kebijakan Perusahaan
Corporate Policy Manual

Sistem Pengendalian Internal
Perusahaan telah memiliki sistem pengendalian internal yang menjamin keandalan sistem akuntansi. Sistem pengendalian internal diberlakukan untuk memberikan jaminan yang wajar dalam hubungannya menjaga asset dari penyalah-gunaan dan peralihan kepemilikan secara tidak sah, menjaga keabsahan catatan akuntasi dan keandalan informasi keuangan yang dapat dipercaya yang digunakan Perusahaan maupun yang dipublikasikan.

Pelaksanaan tugas pengendalian internal merupakan tanggung jawab seluruh unit/ satuan kerja. Perusahaan telah menetapkan Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai unit yang bertanggung jawab atas efektivitas sistem pengendalian internal. Selain itu perusahaan juga membentuk Satuan Jaminan Mutu (Satjamtu) sebagai penanggung jawab diterapkan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan persyaratan standar ISO 9001:2000 sebagai wujud komitmen menajemen dalam meningkatkan kepuasan pemakai jasa (Customer satisfaction) dan penyempurnaan yang berkesinambungan (Continuous Improvement).

Dalam mendukung aktivitas pengendalian internal, Perusahaan senantiasa menjamin independensi SPI dan Satjamtu dalam melaksanakan internal audit serta meningkatkan kompetensi para auditornya. SPI selama tahun 2008 telah melakukan audit keuangan dan operasional terhadap 19 (sembilan belas) unit kerja, sedangkan Satjamtu telah melakukan audit pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu terhadap 32 Unit kerja, meliputi Kantor Pusat dan Unit Produksi.

Auditor Eksternal
Dalam rangka penunjukan auditor eksternal, Perusahaan telah melakukan mekanisme dimana Direksi mengusulkan calon auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik) kepada Komisaris dan selanjutnya Komisaris mengajukan calon auditor eksternal terpilih kepada Pemegang Saham untuk disyahkan dalam RUPS.

Auditor eksternal yang ditunjuk adalah bebas dari pengaruh Komisaris, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Perusahaan, serta perusahaan telahmenyediakan semua catatan akuntasi dan data penunjang yang diperlukan auditoreksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatazasan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Auditor Eksternal telah melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan dan memberikan pendapat secara independen terhadap kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standard Akuntansi Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Internal Control System
The Company has maintained Internal Control System that guarantees the reliability of accounting system. Internal Control System is imposed to give reasonable guarantee with respect to maintaining the assets from abuse and illegal transfer of ownership, maintaining the validity of accounting records and reliability of financial information used by the Company as well as that published.

The implementation of duty of internal control is the responsibility of all work units. The Company has stipulated a Internal Control Unit (ICU) as the unit that is responsible for the effectiveness of Internal Control System. In addition, the Company also established Quality Assurance Unit (QAU) which is responsible for the application of Quality Management System based on the requirements of standard of ISO 9001:2000 as a realization of commitment of the management in improving Customer Satisfaction and Continuous Improvement.

In supporting the internal control activity, the Company always guarantees the independency of ICU and QAU in performing internal audit and improving the competency of its auditors. During 2008, ICU has conducted financial and operational audit to 19 (nineteen) work units, while QAU has conducted audit to the performance of Quality Management System to 32 Work units covering Head Office and Production Unit.

External Auditor
In the framework of appointing external auditor, the Company has prepared a mechanism in which the Board of Directors proposes prospective external auditor (Office of Public Accountant) to Board of Commissioners and further Board of Commissioners submits the elected external auditor to Shareholders to be authenticated in a GMS.

The appointed external auditor is free from the influence of Board of Commissioners, Board of Directors and stakeholders in the Company, and the Company has provided all accounting records and supporting data required by external auditor, so it enables external auditor to give its opinion about the reasonableness, consistency and c ompliance of all financial statements of the Company with all Indonesian Financial Accounting Standards. External auditor has conducted audit to financial statement of the Company and given opinion independently to the reasonableness and compliance of the financial statement of the Company with Financial Accounting Standard and the applicable Laws and Regulations.

Keputusan RUPS tahunan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Rama Wendra & Rekan untuk melakukan audit atas laporan keuangan tahun 2008. Besarnya jasa audit yang dibayarkan Perusahaan untuk laporan keuangan tahun 2008 yaitu Rp 93.956.500,- termasuk PPN 10%. Kantor Akuntan Rama Wendra & Rekan tidak memberikan jasa konsultasi lainnya kepada perusahaan.

Integritas dalam berusaha
Perusahaan telah menerapkan standar etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip GCG. Perusahaan telah mensosialiasikan GCG Code kepada seluruh karyawan untuk mempertahankan kejujuran, integritas, pertanggung-jawaban, independensi dan keadilan dalam proses kerja dan transaksi di lingkungan masing-masing.

Perusahaan juga telah menerapkan fungsi pengawasan berdasarkan prinsip yang benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar tindakan ilegal, tidak fair dan pelanggaran atas norma dan peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi, baik administrasi, perdata atau pidana. Menjadi kewajiban setiap unit kerja untuk sanantiasa menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang disampaikan oleh fungsi pengawasan.

Perusahaan telah menetapkan kebijakan melarang Komisaris, Direksi, Manajemen dan seluruh karyawan dan pihak terkait melakukan transaksi yang bertentangan dengan perundang-undangan dan prinsip GCG. Apabila transaksi tersebut terbukti terjadi, maka setiap pihak yang terlibat langsung dikenai sanksi administratif dan tuntutan sesuai hukum yang berlaku.

Hubungan dengan Pemegang Saham
Perusahaan telah melakukan hubungan dengan Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan telah berusaha memberikan kontribusi yang optimal dan berkesinambungan bagi Pemegang Saham. Perusahaan telah melakukan usaha terjadinya pertumbuhan yang berkesinambungan sesuai dengan sasaran Key Performance Indicator (KPI) yang ditetapkan oleh Pemegang Saham.

Hubungan dengan Pejabat Negara
Adalah kebijakan Perusahaan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap jajaran Pejabat Negara yang memiliki wewenang pada bidang operasi Perusahaan dalam batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan
Perusahaan telah mengambil tindakan preventif untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja. Perusahaan telah menyediakan fasilitas kerja yang memadai agar karyawan memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk maksud tersebut Perusahaan telah memastikan bahwa asset, lokasi kerja serta fasilitas lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestariaan ingkungan.

Perusahaan juga telah melengkapi alat, sarana dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja agar seluruh surveyor dan inspektor dapat bekerja aman dan selamat. Dalam prakteknya, Perusahaan memiliki HSE (Health, Safety & Environment) Manual sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian aspek Kesehatan, Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan Kerja. Dalam tahun 2008 tercatat zero accident terhadap pekerjaan yang dilakukan surveyor atau inspektor BKI.

Annual GMS have appointed Office of Public Accountant Rama Wendra & Rekan to conduct audit to the financial statement of 2008. The amount of cost of audit service paid by the Company for financial statement of 2008 is Rp 93,956,500 including 10% VAT. Office of Public Accountant Rama Wendra & Rekan does not provide other consultation service to the Company.

Integrity in business
The Company has applied standard of ethics in all of its business activities based on the principles of GCG. The Company has socialized GCG Code to all of its employees to retain honesty, integrity, accountability, independence and fairness in work process and transaction within their respective environment.

The Company has also applied control function based on true and generally-acceptable principles and always made effort in order that illegal and unfair acts as well as violations against the applicable norms and regulations can be charged with penalty, whether administrative, civil or criminal penalty. It is the obligation of every work unit to always follow up every finding of audit presented by the supervision function.

The Company has stipulated a policy to ban Board of Commissioners, Board of Directors, Management and all employees as well as the related parties from conducting any transaction that is in breach of the laws and regulations and the principles of GCG. If such transaction proves to have occurred, every party that is involved directly is charged with administrative penalty and claim in accordance with the applicable law.

Relation with Shareholders
The Company has made relation with Shareholders in accordance with the applicable laws and regulations. The Company has made effort to give optimum and continuous contribution to Shareholders. The Company has endeavored to encourage continuous growth in accordance with the target of Key Performance Indicator (KPI) stipulated by Shareholders.

Relation with State Officials
It is the objective of the Company to develop and maintain good relation and effective communication with every all State Officials that have the authority in the Company's field of operation within the limits of tolerance permitted by the law.

Employment Safety and Health and Environmental Conservation
The Company has taken preventive action to avoid the occurrence of accident and health disturbance at work place. The Company has provided sufficient work facility so that employees have work place that is safe and healthy. For such purpose, the Company has made certain that the assets, work location, and other facility comply with the applicable laws and regulations regarding requirements of employment health and safety and environmental conservation.

The Company has also completed tools, facility and equipment of Employment Safety and Health in order that all surveyors and inspectors can work safely and securely. In practice, the Company maintains HSE (Health, Safety & Environment) Manual as a reference in the implementation and controlling the aspects of Health, Safety and Protection to Work Environment. In 2008, we recorded zero accident to the work conducted by surveyor or inspector of BKI.

Proses Pengadaan Barang / Jasa dan Hubungan dengan Rekanan
Perusahaan telah menerapkan proses pengadaan sesuai prinsip GCG, antara lain menjunjung prinsip keterbukaan, kompetitif, fair dan dapat dipertanggung jawabkan. Perusahaan telah memiliki peraturan yang jelas dan tertulis untuk menjamin bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip tersebut diatas. Proses pengadaan juga telah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan Perusahaan dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua rekanan untuk berkompetisi dalam proses pengadaan sesuai dengan kemampuan dan pengalaman mereka.

Dalam pemilihan rekanan tidak diperbolehkan menunjuk rekanan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Komisaris, Direksi, pejabat ataupun personil di BKI. Selain itu dalam pemilihan barang atau rekanan, telah diupayakan semaksimal mungkin untuk mempergunakan produk Dalam Negeri dengan tetap mempertimbangan aspek kualitas, aspek finansial ekonomis serta selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kemitraan dengan Masyarakat Sekitar
Perusahaan telah berkomitmen bahwa dimanapun Perusahaan beroperasi hubungan baik dengan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaaan. Perusahaan telah melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar dan membantu masyarakat dengan cara yang wajar dengan memperhati-kan kemampuan Perusahaan serta ketentuan yang berlaku. Perusahaan menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkat-kan nilai sosial Perusahaan. Kegiatan ini antara lain adalah Bantuan Kemitraan, Bhakti Sosial, Bantuan Korban Bencana Alam serta pemberian Bea Siswa.

Penerapan Teknologi
Sebagai badan klasifikasi yang independen dan dalam rangka meningkatkan reputasinya, Perusahaan memiliki misi melakukan penelitian dan pengembangan peraturan dan standar teknik, khususnya dibidang teknik perkapalan dan kelautan. Dalam mengemban misi tersebut, Perusahaan telah melakukan upaya dalam mengembangkan dan mengadopsi teknologi atau standar yang diakui untuk dipergunakan dalam Rules & Regulation BKI serta mempublikasikannya untuk dipergunakan oleh pihak yang berkepentingan (galangan kapal, Pemerintah, pemilik kapal, asuransi, konsultan teknik dsb) disamping sebagai acuan bagi BKI dalam melakukan pelayanan jasa survey dan sertifikasi. Penerapan Teknologi Informasi juga telah dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan jasa dan percepatan proses produksi dan pelaporan, meliputi operasional, keuangan dan personalia.

Manajemen Risiko
Perusahaan telah menyadari sepenuhnya bahwa operasi Perusahaan tidak terbebas dari berbagai risiko, baik risiko yang yang berada di bawah kendali maupun risiko yang berada diluar kendali. Perusahaan telah melakukan kendali dan meminimalkan risiko yang bersifat internal dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip manajemen risiko. Sedangkan risiko yang bersifat eksternal, Perusahaan berusaha mengidentifikasi secara seksama dan mengevaluasi peluang terjadinya dan dampaknya terhadap Perusahaan. Atas dasar identifikasi itu, Perusahaan telah melakukan upaya yang diperlukan untuk meminimalkan terjadinya risiko tersebut, dengan merancang kontrak sedemikian rupa sehingga secara legal Perusahaan terlindungi dari risiko yang tidak perlu atau dengan melakukan teknik analisis keuangan tertentu sedemikian rupa sehingga resiko yang mungkin timbul tidak mengurangi nilai Perusahaan secara drastis. Namun demikian, Perusahaan juga menyadari adanya risiko yang berada di luar kendali yang tidak dapat diminimalkan dampaknya oleh upaya internal.

Process of Goods/Services Procurement and Relation with Partners
The Company has applied procurement process in accordance with the principles of GCG, among others, upholding the principles of openness, competitiveness, fairness and accountability. The Company has maintained clear and written regulation to guarantee that goods and services procurement is conducted in compliance with the applicable laws and regulations and the principles aforesaid. Procurement process has also given benefit to the best interest of the Company and given equal opportunity to all partners to compete in procurement process according to their ability and experience.

It is not allowed to appoint partners that may cause conflict of interest with Board of Commissioners, Board of Directors, officials or personnel at BKI. In addition, in selecting goods or partners, effort has been made to the most maximum possible to use domestic products by still considering the aspects of quality and financial economic and not in contrary to the laws and regulations.

Partnership with the Surrounding Community
The Company has had a commitment that wherever the Company operates, good relation with the surrounding community is the main basis for the Company long-term success. The Company has conducted interaction with the surrounding community and assisted the community in a reasonable manner by considering the Company's ability and the applicable provisions. The Company appreciates every partnership activity that gives contribution to the community and increases social value of the Company. These activities are, among others, Partnership Aids, Social Devotion, Aids for Victims of Natural Disaster and grant of Scholarship.

Application of Technology
As an independent classification agency and in the framework of improving its reputation, the Company has mission to conduct research and development on technical regulation and standard, especially in the field of shipping and marine. To perform this mission, the Company has made effort to develop and adopt acknowledged technology or standard to be used in Rules & Regulation of BKI and publish the same for use by the stakeholders (shipyard, the Government, ship owners, insurance, engineering consultant, etc.) in addition to as reference for BKI in conducting survey and certification services.
The application of Information Technology has also been developed in the framework of improving the services and acceleration of production process and reporting, which covers operation, finance and personnel.

Risk Management
The Company is fully aware that the Company's operation is not free of various risks, either that under its control or that beyond its control. The Company has controlled and minimized internal risks by applying carefulness principles and Risk Management principles. While for external risks, the Company has endeavored to carefully identify the same and evaluate the chance for their occurrence and impacts on the Company. Based on the identification, the Company has made effort necessary to minimize the occurrence of such risks by designing a contract in such a way that, in terms of legal aspect, the Company is protected against unnecessary risks or by conducting certain method of financial analysis in such a way that the risks that may arise will not drastically reduce the Company's value. However, the Company also realizes the existence of risks beyond its control, the impacts of which cannot be minimized by internal efforts.

Data Perusahaan dan Kerahasiaan Informasi
Kebijakan Perusahaan telah menetapkan untuk mengendalikan data dan catatan secara akurat, mudah dilacak dan teridentifikasi terhadap semua aktivitas usaha dan operasional Perusahaan serta senantiasa dipelihara setiap waktu. Setiap pembayaran uang, pengalihan kepemilikan, penyelesaian pemberian layanan dan transaksi lainnya telah merefleksikan secara penuh dan detail pada sistem akuntansi dan catatan bisnis Perusahaan. Semua data dana catatan telah diungkapkan secara penuh kepada auditor internal dan eksternal dalam proses audit kepatuhan atau penyidikan lainnya.

Kebijakan Perusahaan juga melarang Komisaris, Direksi dan karyawan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia mengenai Perusahaan atau pelanggan kepada pihak ketiga. Mengingat bahwa pengungkapan informasi rahasia tersebut dapat merugikan Perusahaan atau pelanggan dan memberikan keuntungan kepada pihak lain, maka pemberian informasi rahasia menurut keperluannya harus melalui persetujuan Direksi.

Keterbukaan Informasi
Perusahaan telah mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham dan instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif. Perusahaan menyampaikan informasi kepada khalayak umum, antara lain, melalui Website (www.klasifikasiindonesia.com), Customer Meeting, Pertemuan Komite Konsultansi Klasifikasi Indonesia (K3I), Presentasi, BUMN online, Brosur,Company Profile, Annual Report, Pameran dan Promosi di sejumlah media massa.

Pernyataan Palsu, Klaim Palsu, dan Konspirasi
Seluruh jajaran BKI yang berkaitan dengan tugas pemasaran, drawing approval, pelaksanaan survey dan inspeksi, proses sertifikasi, pembuatan kontrak / perjanjian dan administrasi keuangan termasuk akuntansi, telah menyadari pentingnya membuat pernyataan yang akurat dan klaim yang benar kepada Pimpinan, Pemerintah maupun kepada pihak lain. Hal ini mencakup setiap pernyataan lisan dan tertulis yang disampaikan kepada pihak lain atau yang digunakan oleh Perusahaan. Kesengajaan menyampaikan pernyataan atau klaim yang tidak benar atau yang menyesatkan atau yang melibatkan adanya konspirasi dengan orang lain untuk merugikan pihak lain dapat mengakibatkan dikenakannya hukuman administratif, pidana, perdata bagi personil yang bersangkutan dan pihak lain yang terlibat, termasuk mitra kerja Perusahaan dan karyawannya.

Karyawan dan Hubungan Industrial
Perusahaan mempunyai jaringan kantor cabang yang beroperasi di berbagai daerah dengan latar belakang agama, budaya, tradisi, adat istiadat serta peraturan setempat yang berbeda-beda. Meskipun peka terhadap perbedaan tersebut, Perusahaan tetap menerapkan prinsip-prinsip yang didasarkan pada ketentuan GCG.

Direksi telah memperlakukan karyawan secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan agama, suku, asal-usul, kelompok, jenis kelamin dan hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja dan indikator lain yang bersifat objektif.

Perusahaan telah menetapkan beberapa kebijakan mengenai karyawan dan hubungan industrial, antara lain :

The Company's Data and Confidentiality of Information
The Company's policy has stipulated to control data and records accurately, easily traced and identified for all business activities and operations of the Company an always maintained from time to time. Every payment of money, transfer of ownership, settlement of service provision and other transaction has been fully and in detail reflected in the accounting system and business records of the Company. All data and records have been disclosed in full to internal and external auditors in compliance audit process or other investigation.

The Company's policy also prohibits Board of Commissioners, Board of Directors and employees from disclosing confidential information on the Company or customers to any third party. Considering that disclosing such confidential information may be detrimental to the Company or customers and favorable to the other party, then providing confidential information according to the necessity must be by approval of Board of Directors.

Information Openness
The Company has disclosed important information in Annual Report to Shareholders and the relevant Government agency in accordance with the applicable laws and regulations promptly, accurately, clearly and objectively. The Company discloses information to the public, among other things, through Website (www.klasifikasiindonesia.com), Customer Meeting, Meeting of Indonesian Classification Consultancy Committee (K3I), Presentation, BUMN online, Brochures, Company Profile, Annual Report, Expo, and Promotion in a number of mass media.

Fake Statement, Fake Claim, and Conspiracy
All BKI's personnel relating to the duty of marketing, drawing approval, survey and inspection implementation, certification process, making of contract/agreement and financial administration including accounting, have been aware of the importance of making accurate statement and true claim to the Management, the Government as well as any other party. This covers every written and oral statements made to any other party or used by the Company. Deliberately making statement or claim that is untrue or misleading or involving a conspiracy with any other person to harm the other party may result in the imposition of administrative penalty, criminal penalty, or civil penalty to the relevant person and the other party involved, including work partner of the Company and its employees.

Employees and Industrial Relation
The Company maintains Branch Offices network that operates in a number of areas with different religious, cultural, tradition, custom and local regulation backgrounds. Even though it is sensitive to such difference, the Company still applies the principles that are based on the provisions of GCG.

Board of Directors has treated the employees fairly and free from bias due to difference in religion, ethnic, origin, group, gender and matters not related with performance and other indicators that are objective in nature.

The Company has stipulated several policies on employees and industrial relation, among others :

- Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi karyawan.
- Melindungi karyawan dari segala bentuk kemungkinan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.
- Memberikan hak kepada karyawan untuk berkumpul dan berserikat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri sejalan dengan kompetensi yang bersangkutan serta sesuai dengan kebutuhan Perusahaan baik saat ini maupun masa yang akan datang.
- Mengusahakan skema remunerasi yang diterima karyawan, secara umum mengikuti peraturan/ketentuan yang berlaku dan sesuai kemampuan Perusahaan.
- Memberikan bonus dan insentif prestasi kepada karyawan sesuai kinerjanya.
- Senantiasa bermitra dengan Serikat Pekerja yang diakui dalam lingkungan Perusahaan.

Direksi memiliki kewenangan penuh untuk bertindak tegas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan menjunjung prinsip GCG terhadap karyawan yang terbukti menimbulkan keresahan, melanggar norma disiplin karyawan, dan merusak suasana kerja.

Karyawan juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Perusahaan, antara lain :

- Setiap karyawan wajib mentaati Peraturan Pokok Kepegawaian (Perpok), Nilai-nilai Perusahaan dan semua peraturan yang dikeluarkan Perusahaan.
- Setiap karyawan wajib mendahulukan kepentingan Perusahaan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tanggung jawabnya.
- Setiap karyawan wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diserahkan kepadanya.
- Setiap karyawan wajib menjaga harta milik dan nama baik Perusahaan.
- Setiap karyawan yang menjadi atasan wajib membina dan memberikan teladan pada karyawan di lingkungan kerjanya.

Benturan Kepentingan
Perusahaan telah mendefinisikan benturan kepentingan sebagai situasi terjadinya pertentangan kepentingan pribadi Komisaris, Direksi, atau karyawan dengan kepentingan Perusahaan. Benturan ini dapat melibatkan kepentingan pemakai jasa, instansi lain yang berkepentingan dengan jasa BKI, rekanan, karyawan atau bahkan anggota masyarakat di tempat Perusahaan beroperasi. Prinsip utama yang telah diikuti untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan adalah tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dan atau untuk kepentingan orang dan atau pihak lain yang terkait. Juga menghindari setiap aktivitas di luar dinas yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Aktivitaa tersebut tentunya merupakan aktivitas yang dapat bertentangan dengan kinerja jabatan atau yang dapat merugikan citra dan reputasi Perusahaan.

- *Providing good and safe work condition to employees.*
- *Protecting employees from all forms of possibilities that endanger the safety and health at work place.*
- *Giving right to employees to assemble and unite in accordance with the applicable laws and regulations.*
- *Giving opportunity to employees to take education, training, and self development in line with competency of the relevant persons and in accordance with the need of the Company presently or in the future.*
- *Arranging remuneration scheme acceptable to employees, in general complying with the applicable regulations/ provisions and in accordance with the Company's ability.*
- *Giving achievement bonus and incentive to employees in accordance with their performance.*
- *Always making partnership with Workers Union that is acknowledged within the Company.*

Board of Directors has full authority to act explicitly based on the applicable provisions and regulations by upholding the principles of GCG against any employees that are proved to have caused unrest, violated the norms of employee discipline, and damaged work atmosphere.

Employees also have various obligations that must be fulfilled to the Company, among others as follows:

- *Every employee is obliged to comply with Employees Main Regulation (Perpok), the Company's values and all regulations issued by the Company.*
- *Every employee is obliged to put first the Company's interest directly or indirectly relating to their responsibility.*
- *Every employee is obliged to make all efforts and endeavors in performing work assignment submitted to them.*
- *Every employee is obliged to maintain the assets and good reputation of the Company.*
- *Every employee serving as superintendent is obliged to develop and provide good model to employees within their work environment.*

Conflict of interest
The Company has defined conflict of interest as a situation of personal conflict of interest between members of Board of Commissioners, Board of Directors, or employees with the interest of the Company. This conflict may involve the interest of service users, other agencies having interest in the servicesof BKI, partners, employees or even community members at the place where the Company operates. The main principle that has been followed to prevent the occurrence of conflict of interest is not using any position for personal interest and or for the interest any other related person and or party. Also avoiding every activity beyond the office that may have negative impact on the independence and objectivity of consideration in decision making. Such activity is certainly that which may be in conflict with position performance or which may harm the Company's image and reputation.

Benturan Kepentingan dalam Keputusan Hasil Survey / Inspeksi

BKI sebagai Perusahaan yang memprioritaskan aspek keselamatan telah menyadari bahwa hasil survey, laporan dan sertifikat yang diterbitkan mempunyai implikasi terhadap aspek keselamatan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain pemilik kapal, pemilik cargo, asuransi, galangan, penumpang, awak kapal, Pemerintah, dan masyarakat umum secara luas.

Untuk itu seluruh jajaran Direksi, para Kepala Divisi, Kepala Satuan, Kepala Cabang dan Wakilnya, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Surveyor, Inspektor dan staf teknik Kantor Pusat telah menjaga independensinya dalam pengambilan keputusan, memberikan rekomendasi, keputusan hasil survey / inspeksi, dan pembuatan laporan. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka pertimbangan aspek keselamatan adalah mutlak menjadi prioritas utama dengan mengacu peraturan dan regulasi yang berlaku.

Benturan Kepentingan dalam Proses Pengadaan Barang / Jasa

Komisaris, Direksi dan Karyawan dilarang berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan suatu Perusahaan dimana yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan mempunyai andil atau kepemilikan saham yang signifikan atau mempunyai kepentingan finansial tertentu.

Komisaris, Direksi dan Karyawan juga dilarang meminta atau menerima uang, pemberian/hadiah atau hal lain yang bernilai, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pemasok yang berkompetisi. Demikian juga dilarang memperoleh atau mengungkapkan informasi yang terkait dengan proses pengadaan dan sebaliknya.

Pemasok barang atau jasa yang diundang untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan harus memenuhi persyaratan menghindari benturan kepentingan yang sama sebagaimana yang diberlakukan pada Komisaris, Direksi dan karyawan.

Benturan Kepentingan dengan Aktivitas Sampingan

Komisaris, Direksi dan karyawan dapat diizinkan melakukan aktivitas lain diluar jam kerja yang telah ditetapkan dengan syarat bahwa aktivitas tersebut tidak menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perusahaan dan atau aktivitas tersebut tidak menurunkan kemampuan untuk memenuhi tugas yang telah diamanatkan. Keterlibatan dalam aktivitas lain diluar Perusahaan tidak boleh mengurangi independensi dan objektivitas dalam mengambil keputusan atau mempengaruhi efektivitas dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan karyawan yang bersangkutan.

Conflict of Interest in Decision of Survey/Inspection Outcome

BKI as a Company that gives priority to the aspect of safety has been aware that the result of survey, report and certificate issued has implication to the aspect of safety needed by the stakeholders, among others, ship owners, cargo owners, insurance, shipyard, passengers, ship crews, the Government, and the wide public.

Therefore, all members of Board of Directors, Heads of Divisions, Heads of Units, Heads of Branches and their Deputies, Heads of Sections, Heads of Fields, Surveyors, Inspectors and engineering staff of Head Office have maintain their independence in decision making, giving recommendation, decision of result of survey/inspection, and report preparation. In case of conflict of interest, the consideration for safety aspect absolutely becomes the main priority by referring to the applicable laws and regulations.

Conflict of interest in the Process of Goods/Service Procurement

Board of Commissioners, Board of Directors and Employees are prohibited from participating in every procurement activity that involves a Company where the relevant person or his/her family holds significant shares or shares ownership or has certain financial interest.

Board of Commissioners, Board of Directors and Employees are also prohibited from asking for or receiving money, gift/ present or other things of value, either directly or indirectly, from any competing suppliers. They are also prohibited from obtaining or disclosing information relating to procurement process and otherwise.

Goods or service suppliers invited to participate in procurement process must meet the requirement to avoid the same conflict of interest as imposed on Board of Commissioners, Board of Directors and employees.

Conflict of Interest with Side Activity

Board of Commissioners, Board of Directors and employees may be permitted to conduct other activities beyond working hours stipulated provided that such activities do not give rise to conflict of interest with the Company's interest and or such activities do not reduce the capacity to fulfill the duties mandated. Involvement in other activities outside the Company may not reduce independence and objectivity in making decision or affect the effectiveness and punctuality of work completion of the relevant employees.

Kinerja Keuangan
Financial Performance

Laporan keuangan konsolidasi BKI yang telah diaudit dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan standar Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Laba Rugi

   a. Pendapatan

   Pendapatan Usaha perusahaan pada tahun 2008 mengalami pertumbuhan sebesar 19,63% dibandingkan dengan tahun 2007. Kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan usaha berasal dari pertumbuhan pendapatan segmen Klasifikasi & Statutoria sebesar 17,28% dan pendapatan segmen Konsultansi & Supervisi sebesar 23,56%.

   Pendapatan netto tahun 2008 sebesar Rp 194,98 milyar atau 105,28% dihadapkan dengan anggarannya Rp 185,20 milyar. Terlampauinya realisasi pendapatan tahun 2008 dihadapkan dengan anggarannya disebabkan antara lain :

   - Beberapa perusahaan / pemilik kapal sudah mulai mengindahkan keputusan Menteri Perhubungan no. KM.20/2006 dengan mengklaskan kapalnya kepada BKI.
   - BKI semakin dipercaya sebagai badan klasifikasi nasional dan pelayanan BKI dirasakan semakin membaik.
   - Tarif jasa BKI dirasakan oleh pemilik kapal / Perusahaan yang relatif kompetitif, meski pada tahun 2008 ini ada penyesuaian tarif naik sebesar 15%.
   - Meningkatnya survey kapal di luar negeri.

   b. Beban Usaha

   Realisasi beban usaha tahun 2008 sebesar Rp 170,33 milyar atau 105,28% dihadapkan dengan anggaran sebesar Rp 161,78 milyar dan mengalami pertumbuhan sebesar 22,66% dibandingkan tahun 2007. Peningkatan beban usaha tersebut karena berkaitan dengan relatif banyaknya pelaksanaan pekerjaan yang memerlukan personil produksi, perjalanan dinas survey / inspeksi di luar negeri serta pembebanan biaya langsung proyek-proyek Konsultansi & Supervisi.

BKI consolidated financial statement already audited in this Annual Report shall be prepared based on the generally applicable accountancy standards in Indonesia.

1. Profit-Loss

   a. Revenue

   The company's Operating Revenue in 2008 increases by 19,63% compared to that in 2007. The increase in operating revenue results from the growth in income earned from segment of Classification & Statutory by 17,28% and from segment of Consultation & Supervision by 23,56%.

   The net revenue in 2008 is Rp 194,98 billion or 105,28% compared to the targeted budget of Rp 185,20 billion. The targeted realization of revenue in 2008 is exceeded, if it is compared to the budget, because:

   - *Several ship companies/owners have followed Decree of Minister of Transportation no. KM.20/2006 by allowing BKI to classify their ship.*
   - *There is increasing confidence in BKI as national classification agency and the service provided by BKI is progressively better.*
   - *The tariff for service provided by BKI is relatively competitive according to the ship owners/companies, though in 2008 there is an increase in price by 15%.*
   - *There is increasing number of ship surveys in foreign countries.*

   b. Operating Expenses

   Realization of operating expenses in 2008 is Rp 170,33 billion or 105,28% compared to the budget of Rp 161,78 billion and increases by 22,66% compared to that of 2007. The increase in operating expenses occurs because there are many operations requiring production personnel, official trips abroad for survey/inspection and direct charges of Consultation & Supervision projects.

c. Laba Usaha

Realisasi laba usaha mencapai Rp 24,65 milyar (105,26%) dihadapkan dengan anggarannya sebesar Rp 23,42 milyar. Pertumbuhan Laba Usaha perusahaan pada tahun 2008 mencapai 2,23%, dibandingkan laba usaha pada tahun 2007. Sehingga Laba Bersih setelah pajak mencapai Rp 17.039 juta atau tumbuh 12,84% dari laba bersih tahun 2007.

d. Operating Ratio

Operating Ratio sebesar 87,36% atau 0,01% di atas anggaran sebesar 87,35% dengan pencapaian hasil usaha seperti disebutkan di atas ini mencerminkan pengelolaan operasi perusahaan belum efisien sebagaimana ditargetkan dalam anggaran.

c. Operating Income

Realization of operating income is Rp 24,65 billion (105,26%) compared to the budget of Rp 23,42 billion. The increase in company's operating income in 2008 reaches 2,23%, comapred to the same in 2007. Therefore, the operating income after tax reaches Rp 17.039 million or grows by 12,84% compared to that in 2007.

d. Operating Ratio

Operating Ratio is 87,36% or 0,01% above the budget of 87,35% and by such achievement in operating income as abovementioned it is considered that the company's management operation has not been efficient as targeted in the budget.

NET REVENUE & NET PROFIT (2003-2008)

in million rupiah

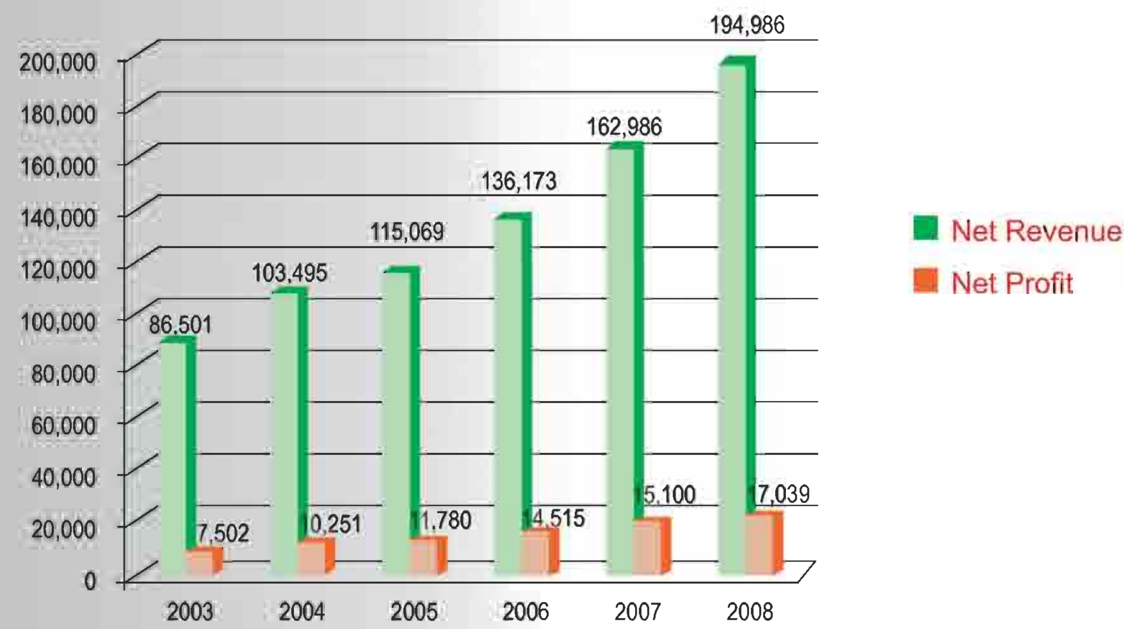

2. Rasio Keuangan

a. Rasio Likuiditas

- Rasio lancar tahun 2008 sebesar 219,50% lebih tinggi dari rasio lancar tahun 2007 sebesar 204,50%.
- Rasio kas tahun 2008 sebesar 43,00% dan tahun 2007 sebesar 25,87%. Ini menunjukkan ada peningkatan dalam penyediaan kas untuk pembiayaan operasional dan atau pembayaran kewajiban jangka pendeknya.

b. Solvabilitas

Total Debt to Equity Ratio tahun 2008 sebesar 38,89% dan tahun 2007 sebesar 45,28%. Mengingat hutang yang ada tidak menimbulkan beban bunga (hanya hutang transaksi operasi / dagang), maka adanya hutang tersebut sangat mendukung dalam penyediaan modal kerja serta berpeluang meningkatkan laba perusahaan.

c. Return on Investment Ratio (ROI)

Return on Investment Ratio tahun 2008 sebesar 29,74% dan tahun 2007 30,14%. Menurunnya rasio ini sebesar Rp 0,4% dihadapkan dengan ROI tahun 2007 adalah karena meningkatnya nilai asset perusahaan pada tahun 2008 menjadi Rp 105,73 milyar dari sebesar Rp 91,33 milyar pada tahun 2007.

2. Financial Ratio

a. Liquidity RatioRasio Likuiditas

- *The current ratio of 219,50% in 2008 is higher than the current ratio of 204,50% in 2007.*
- *Cash ratio is 43,00% in 2008 and 25,87% in 2007. This shows that there is increase in available cash for operational financing and or payment of short term liabilities.*

b. Solvability Ratio

Total Debt to Equity Ratio in 2008 is 38,89% and in 2007 is 45,28%. Considering that the existing loans do not accrue interest expense (only operating/commercial transaction loans), they will really support in making working capital available and providing opportunity to increase company's income.

c. Return on Investment Ratio (ROI)

Return on Investment Ratio in 2008 is 29,74% and in 2007 30,14%. The decrease in this ratio by Rp 0,4% compared to ROI in 2007 results from the increase in assets value of the company which increases to Rp 105,73 billion in 2008 from Rp 91,33 billion in 2007.

d. Aktivitas

- Total Asset Turn Over
  Perputaran asset pada tahun 2008 untuk meraih pendapatan adalah sebesar 1,88 kali atau naik 0,08 kali dari TATO tahun 2007 sebesar 1,80 kali. Peningkatan perputaran tersebut sebagai gambaran efektivitas pemanfaatan asset Perusahaan dalam meraih pendapatan.
- Collecting Period
  Rata-rata hari pencairan piutang tahun 2008 selama 75 hari atau 4 hari lebih lambat dari pencairan tahun 2007 sebesar 71 hari. Ini pertanda adanya kelambanan dalam penagihan piutang yang perlu segera diperbaiki di waktu mendatang.

Dari rasio-rasio di atas terlihat bahwa likuiditas Perusahaan tahun 2008 meningkat dibandingkan dengan tahun 2007. Hal ini disebabkan upaya melakukan efisiensi dalam menggunakan dana untuk membiayai operasional dan investasi. Ditinjau dari solvabilitas menunjukkan kondisi financial Perusahaan cukup aman dengan hutang-hutangnya dijamin modal sendiri serta Perusahaan mampu meningkatkan laba.

d. Activities

- *Total Asset Turn Over*
  Assets turn over in 2008 to earn income is 1,88 times or increases by 0,08 times compared to TATO in 2007 namely 1,80 times. The increase in such turnover reflects the effectiveness in using company's assets to earn income.
- *Collecting Period*
  Average days of receivables realization in 2008 are 75 days or 4 days slower than receivables realization in 2007 namely 71 days. This shows that there is tardiness in collecting the receivables, which needs to be immediately improved in the near future.

From the above ratios, it seems that company's liquidity in 2008 increases compared to that in 2007. This results from the efforts to utilize the fund in more efficient way to finance the operation and make investment. If it is viewed from the aspect of solvability, it is considered that the financial condition of the company is sufficiently safe because the company's loans are equity-secured and the company can increase its income.

ROA & ROE (2003-2008)

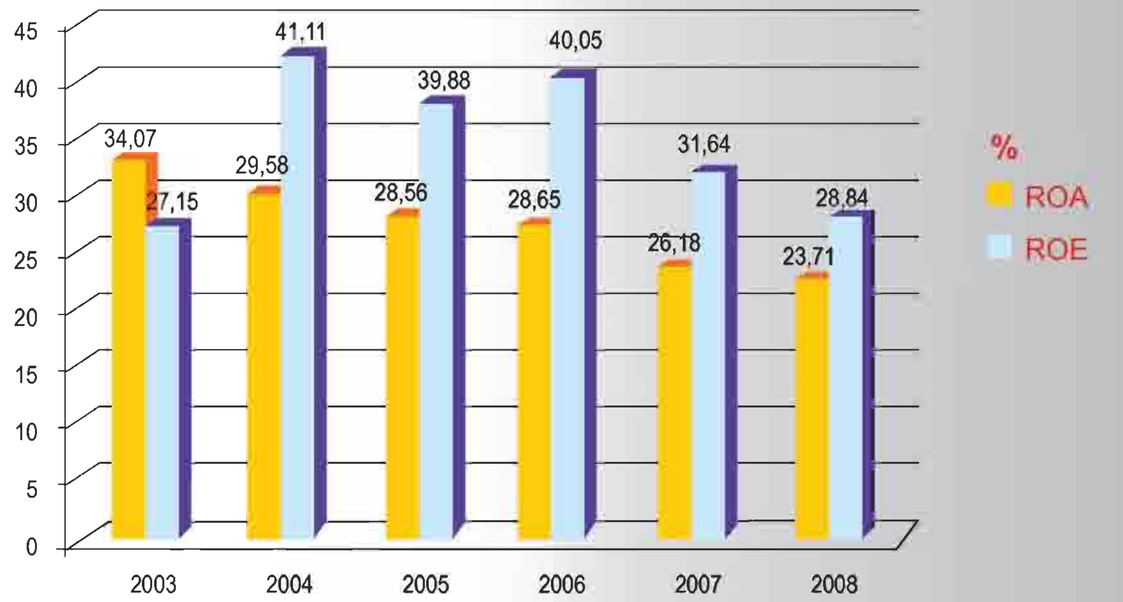

Total Debt to Total Asset & Debt to Equity Ratio (2003-2008)

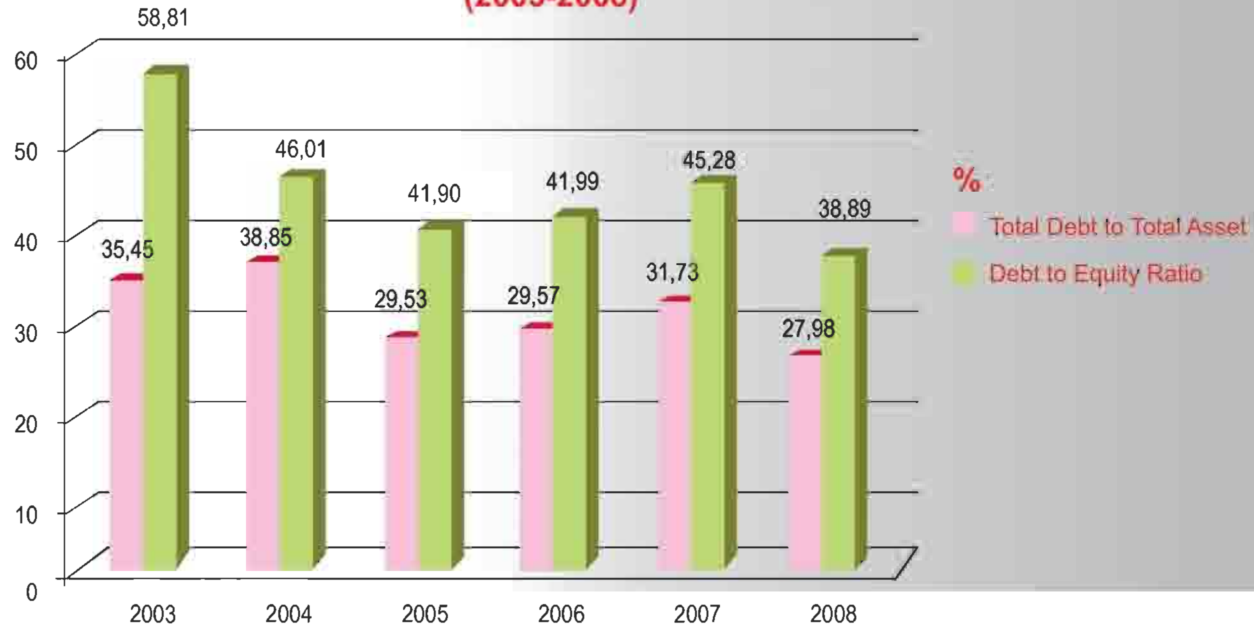

Summary of Balance Sheet

in million rupiah

No	Description	2003	2004	2005	2006	2007	2008
I	***ASSETS***						
1	*Current Assets*						
	- Cash & Bank	4.639	7.565	9.268	9.924	6.798	11.379
	- Accounts Receivable	19.689	19.363	22.884	26.137	37.673	43.630
	- Other Current Assets	744	1.823	2.581	4.396	9.294	3.085
2	*Fixed Assets*	16.948	18.740	22.055	29.738	35.923	45.812
3	*Other Assets*	2.721	1.893	1.841	1.864	1.640	1.821
	TOTAL ASSETS	**44.741**	**49.384**	**58.629**	**72.059**	**91.330**	**105.727**
II	***LIABILITIES***						
1	*Short Term Liability*	16.371	14.686	15.618	19.527	26.743	26.466
2	*Long Term Liability*	532	1.356	1.694	1.783	2.232	3.139
3	*Equity*	28.838	33.342	41.317	50.749	62.354	76.122
	TOTAL LIABILITIES	**44.741**	**49.384**	**58.629**	**72.059**	**91.330**	**105.727**

Summary of Income

in million rupiah

No	Description	2003	2004	2005	2006	2007	2008
I	***Net Income***						
A	*Classification*	59.422	69.364	72.197	84.251	101.801	119.389
B	*Consultancy & Supervision*	27.079	34.131	42.872	51.922	61.185	75.597
	Total (I)	86.501	103.495	115.069	136.173	162.986	194.986
II	***Operation Expenses***						
A	*Service Expense*	45.741	59.913	68.826	80.998	99.131	122.951
B	*Marketing Expense*	1.572	2.223	2.501	2.826	2.896	3.408
C	*Administration & Overhead*	28.266	16.873	27.299	31.399	36.840	43.972
	Total (II)	75.579	89.009	98.626	115.203	138.867	170.331
III	***Net Operation Income (I-II)***	10.922	14.486	16.443	20.970	24.118	24.655
IV	***Other Incomes (Expenses)***	(71)	(1.083)	303	(325)	(1.766)	414
V	***Profit Before Tax***	10.851	13.403	16.746	20.645	22.352	25.069
VI	***Tax***	(3.349)	(3.152)	(4.966)	(6.130)	(7.252)	(8.031)
VII	***Profit After Tax***	**7.502**	**10.251**	**11.780**	**14.515**	**15.100**	**17.039**

Financial Ratio

No	Description	2003	2004	2005	2006	2007	2008
I	***PROFITABILITY***						
	ROA	34.07	29.58	28.56	28.65	26.18	23.71
	ROE	27.15	41.11	39.88	40.05	31.64	28.84
	Operating Ratio (%)	90.44	86.00	85.71	84.60	85.23	87.36
	Net Profit Margin (%)	8.67	9.64	10.24	10.65	10.23	8.80
II	***ACTIVITY***						
	Collecting Period (days)	80	68	72	65	71	75
	Fixed Assets Turnover (x)	5.29	5.52	5.22	5.07	5.11	4.26
III	***LIQUIDITY***						
	Current Ratio	153.15	195.77	222.39	207.18	204.50	219.50
	Cash Ratio	28.34	51.51	59.34	50.82	25.87	43.00
IV	***CAPITALIZATION***						
	Total debt/Total Asset (%)	35.45	38.85	29.53	29.57	31.73	27.98
	Debt/Equity (%)	58.81	46.01	41.90	41.99	45.28	38.89

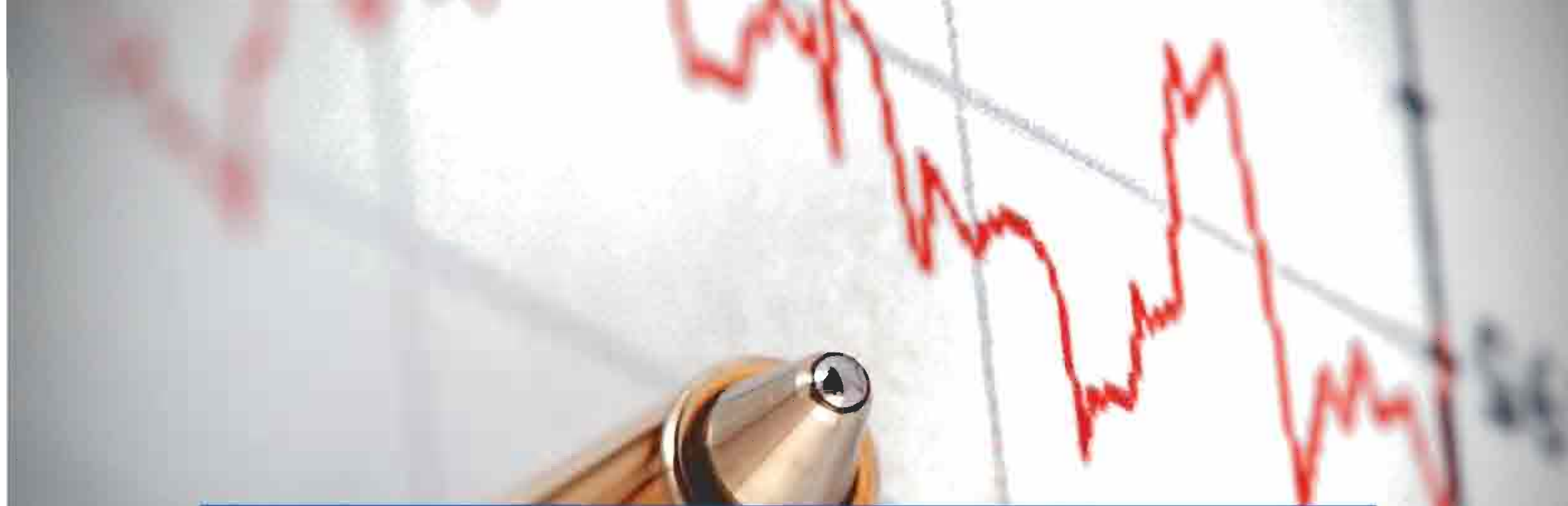

" Kondisi kesehatan perusahaan dikategorikan "AAA" (sehat sekali) sejak tahun 2003 hingga tahun 2008 dan kinerja KPI (Key Performance Indicator) mencapai nilai 110,58 pada tahun 2008."

" Health Condition of the company considered "AAA" (very healthy) since 2003 until 2008 in succession and performance KPI (Key Performance Indicator) value reached 110,58 in the year 2008."

Key Performance Indicator (KPI) year 2008

No	Indicator	Weight	Target	Real	Score
A.	KPI Operation				
1.	Man Power Productivity (million Rp)	20,00	358	402	22,46
2.	Ship Register Growth (%)	15,00	5,48	9,85	18,00
3.	Operation Activities (%)	15,00	218,89	263,24	18,00
	Sub Total KPI Operation	**50**			**58,46**
B.	KPI Financial				
1.	EBT (billion Rp)	11,25	23,46	25,07	12,02
2.	Current Ratio (%)	7,50	211,91	219,50	7,77
3.	Total Asset Turn Over (%)	6,25	1,75	1,88	6,71
	Sub Total KPI Financial	**25**			**26,50**
C.	KPI Dynamics				
1.	Human Development (%)				
	• Total Training Program	5,00	26	20	4,00
	• Total Trainee	5,00	217	290	6,00
2.	Research & Development	10,00	5	5	10,00
3.	GCG Assessment Score	5,00	65	73	5,62
	Sub Total KPI Dynamics	**100**			**25,62**
	Total				**110,58**

Dewan Komisaris, Direksi dan Staf
Board of Commissioner, Director & Staff

Board of Commissioner		
Chairman	:	Albert Lapian
Commissioner	:	Boediarso Teguh Widodo
	:	Achmad Chotibudin
Board of Director		
President Director	:	Muchtar Ali
Technical Director	:	Haryanto
Commerce Director	:	Wibisono
Finance & Personnel Director	:	Donny S. Purba
Staff		
Head of Planning Unit	:	Saifuddin Wijaya
Head of Internal Control Unit	:	Zilzal HM
Head of Quality Assurance Unit	:	Priyo Santosa
Head of R&D Unit	:	Hadi Sutrisno
Technical Staff		
Head of Survey Division	:	M. Nasrun Djafar
Head of Statutory Division	:	Onot Subagyo
Head of Machinery & Electrical Div.	:	Agus Wijaya
Head of Hull & Material Division	:	Joeliantoro
Head of Consultation & Supervison Div.	:	Jeffrey B. Massie
Head of Class Admission Dept.	:	Heintje Angganois
Head of Class Maintenance Dept.	:	Totok Achmad
Head of Monitoring & Register Dept.	:	M. Rico Faridz
Head of Solas & Marpol Dept.	:	Heru Widodo
Head of Load Line & Cargo Gear Dept.	:	Wasito Abdul Mukit
Head of Machinery Dept.	:	Sugeng Yulianto
Head of Electrical Dept.	:	Agus Salim
Head of Industrial Service	:	Agus Siswoko
Head of Hull Dept.	:	Soedjarwoko
Head of Welding & Material Dept.	:	Romy Lesmana
Head of Non Class Marketing Dept.	:	Djamaluddin Gani
Head of Control of Non Class Prod. Dept	:	Agung Prihanto
Administration Staff		
Head of Finance Division	:	Su'ad Syuhada
Head of Personnel & GA Division	:	Asep Sutrisna S.
Head of Accounting Dept.	:	Herman Yuska
Head of Financial Adm. Dept.	:	R. Sudaryo
Head of Personnel & Training Dept.	:	Nasaruddin
Head of General Affair Dept.	:	Koko Kusnadi
Head of Legal & Public Relations Dept.	:	Yuniati
Head of Information System Dept.	:	Diding Suwandi
Head of Program & Budgeting Dept.	:	Taufik Hidayat
Branch Manager		
Head of Consultation & Supervision Unit	:	Ajatiman
Head of Ambon Branch Office	:	Nanok Lukiantono
Head of Balikpapan Branch Office	:	Yansen Miri
Head of Banjarmasin Branch Office	:	Alfonsus Susilarso
Head of Belawan Branch Office	:	Yunasri Zainal
Head of Batam Branch Office	:	Setudju Dangkeng
Head of Bitung Branch Office	:	Pieter Petrus Paulus
Head of Cigading Branch Office	:	Edy Sutrisno
Head of Cirebon Branch Office	:	Faried Rahman Rahim
Head of Dumai Branch Office	:	Suwandi
Head of Jambi Branch Office	:	Salvinus Patangke
Head of Kendari Branch Office	:	Sigit Prastowo
Head of Makassar Branch Office	:	Arief Budi Permana
Head of Padang Branch Office	:	Arief Nurtjahyo
Head of Palembang Branch Office	:	Nurdin Gading
Head of Pontianak Branch Office	:	Syamsul Bahri
Head of Pekanbaru Branch Office	:	Jhoni Rizkal Amza
Head of Semarang Branch Office	:	Bambang Noeljanto
Head of Singapore Branch Office	:	Mohamad Cholil
Head of Sorong Branch Office	:	Syaharuddin Nur
Head of Surabaya Branch Office	:	Darwis Ali
Head of Tanjung Priok Branch Office	:	Muardy Kobandaha

Komite Konsultansi Klasifikasi Indonesia (K3I)
The Consultative Committee Of Indonesian Classification

CHAIRMAN :

H. Harijogi

DEPUTY:

Iskendar, MS

SECRETARY:

Hadi Sutrisno

Technical Committee

HEAD:

Eko Panunggal

MEMBERS :

Tjuk Sukardiman
Iskendar, MS
Teguh Sastrodiwongso

Imam K. Reksowardojo
Wing Wirjawan
Soegiono

Santoso
Samudro
Andy A. Malian

Ferry Andrianz
Amir Gunawan
Amrullah Pase
Firmansyah

Petrus Paranoan
Naufal Bahreisy
Johnson W. Sutjipto

Dharma Manullang
Rochim Irawadhy
Muhammad Affandi
M. Moenir

Operational Committee

HEAD:

H. Harijogi

MEMBER :

Joeswanto Karijodimejo

Tjahyo Widono
ING Putu Suryawirawan
Yamin Jinca

Sayogyo Kartoleksono
Bambang Ediyanto
Syahroel Ong

Heriyanto
Charles Menaro

Djoko Tahono
Djoko Mulyanto
Oentoro Surya

Classification

Classification Bureau	Type of Cooperation
American Bureau of Shipping (ABS-USA)	Dual Class
Bureau Veritas (BV-France)	Dual Class
China Classification Society (CCS-China)	Mutual Representative
Det Norske Veritas Classification AS (DnV-Norway)	Dual Class
Germanischer Lloyd (GL-Germany)	Mutual Representative
Helenic Register of Shipping (HRS-Greece)	Mutual Representative
Indian Register of Shipping (IRS-Indian)	Mutual Representative
International Register of Shipping (IRS)	Mutual Representative
Korean Register of Shipping (KRS)	Mutual Representative
Korean Classification Society DPR of Korea (KCS-DPR of Korea)	Mutual Representative
Lloyd's Register of Shipping (LR-UK)	Dual Class
Nippon Kaiji Kyokai (NK-Japan)	Mutual Representative
Rinave Portuguesa (Portugal)	Mutual Representative
Ships Classification Malaysia (SCM-Malaysia)	Mutual Representative
China Corporation Register of Shipping (CR-Taiwan)	Mutual Representative
Vietnam Register (VR-Vietnam)	Mutual Representative
Italian Register of Shipping (RINA)	Dual Class

Consultancy & Supervision

Organization	Type of Cooperation
Det Norske Veritas (DnV-Norway)	Offshore Services
Korean Register of Shipping (KRS-ROK)	Industrial Inspection
TUV Rheinland (Germany)	Industrial Inspection
TUV Nord (Germany)	Industrial Inspection
Germanischer Lloyd (GL Germany)	Industrial Inspection
PT.ASDP	-Ship Maintenance Supervision -Employee Education & Training
Metal Performance Assessment Group (MPAG)	Engineering Consulting
PT. Dirgantara Indonesia	HRD and Testing Laboratory
Insurance Consortium	Assets Protection Insurance Program
PT. Enggong Sayap Perkasa (ESP)	Inspection & NDT In Oil and Gas Sector

Research & Development

Institution
Technological Development & Application Agency (BPPT)
Centre of Oil and Natural Gas Energy Development (PPT MIGAS)
Office of Technical Materials and Objects Research and Development (B4T)
National Atomic Energy Body (BATAN)
Research Laboratory of ITB (LAPI ITB)
Institute of Technology Sepuluh Nopember Surabaya (ITS)
University of Hasanuddin (UNHAS)
University of Indonesia (UI)
Indonesian Corrosion Association

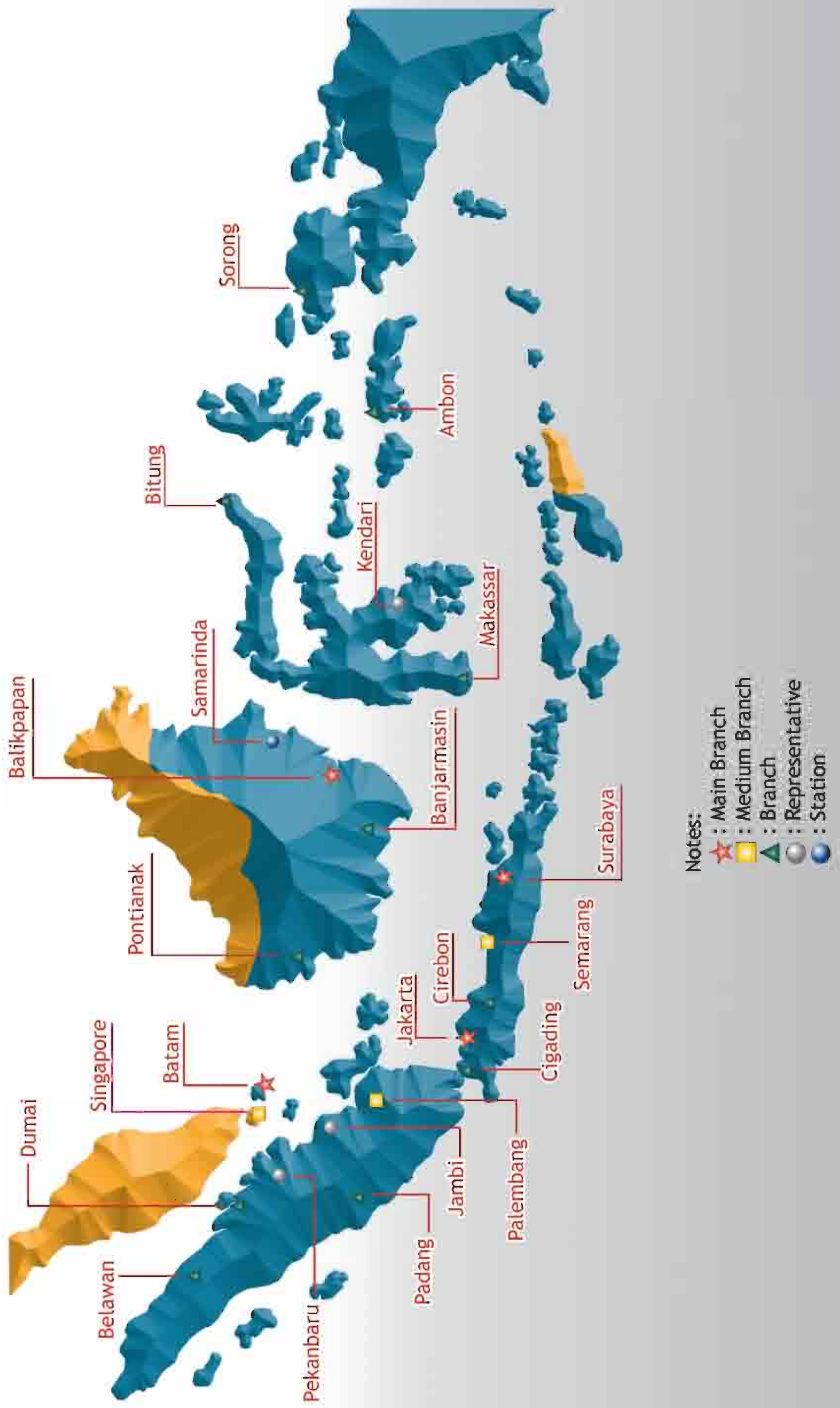

Daftar Kontak
List of Contact

Ambon
Address : Jl. Raya Pelabuhan, Komplek Pelabuhan, Ambon 97216 Indonesia
Telephone : 62-911-349607, 352745
Facsimile : 62-911-361105, 352745
E-mail : bkiab@klasifikasiindonesia.com

Balikpapan
Address : Jl. MT. Haryono No. 8 Ring Road Balikpapan 67111 Indonesia
Telephone : 62-542-876637, 876641, 876642, 876643
Facsimile : 62-542-876639, 876645
E-mail : bkibp@klasifikasiindonesia.com

Banjarmasin
Address : Jl. Skip Lama No. 19 Banjarmasin 70117 Indonesia
Telephone : 62-511-50175, 58311, 509883
Facsimile : 62-511-50175
E-mail : bkibj@klasifikasiindonesia.com

Batam
Address : Jl. Gajah Mada komplek Tiban Indah Mc. Dermott Blok A No. 1, Batam 29421
Telephone : 62-778-322178, 322083
Facsimile : 62-778-322118
E-mail : bkibm@klasifikasiindonesia.com

Belawan
Address : Jl. Veteran No. 218, Belawan 20411 Indonesia
Telephone : 62-61-6941025, 6941276
Facsimile : 62-61-6941276
E-mail : bkibn@klasifikasiindonesia.com

Bitung
Address : Jl. Babe Palar No. 53, Madidir Unet, Bitung 95516 Indonesia
Telephone : 62-438-38720, 38721, 38722
Facsimile : 62-438-434346
E-mail : bkibt@klasifikasiindonesia.com

Cigading
Address : Jl. Gerem Raya No. 1 KM 5, Pulau Merak, Cilegon 42438 Indonesia
Telephone : 62-254-573955, 571007
Facsimile : 62-254-571007
E-mail : bkicg@klasifikasiindonesia.com

Cirebon Jl. Tuparev KM 3, Cirebon 45153 Indonesia
Address : 62-231-205266
Telephone : 62-231-205266
Facsimile : bkicn@klasifikasiindonesia.com
E-mail :

Dumai
Address : Jl. Sungai Rokan No. 96, Dumai 28814 Indonesia
Telephone : 62-765-32574, 35100
Facsimile : 62-765-31364
E-mail : bkidm@klasifikasiindonesia.com

Jambi
Address : Jl. Brigjen Katamso No. 62, Kasang, Jambi 36138 Indonesia
Telephone : 62-741-7555291
Facsimile : 62-741-7555291
E-mail : bkijb@klasifikasiindonesia.com

Kendari
Address : Jl. Malik III Mandonga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telephone : 62-401-326446
Facsimile : 62-401-322847
E-mail : bkikd@klasifikasiindonesia.com

Makassar
Address : Jl. Sungai Cerekang No. 28 Makassar 90115 Indonesia
Telephone : 62-411-311993, 315460
Facsimile : 62-411-315460
E-mail : bkims@klasifikasiindonesia.com

Padang
Address : Jl. St. Syahrir No. 208, Padang 25216 Indonesia
Telephone : 62-751-61553, 765436
Facsimile : 62-751-61553
E-mail : bkipd@klasifikasiindonesia.com

Palembang
Address : Jl. Perintis Kemerdekaan, 5 Ilir, Palembang 30115 Indonesia
Telephone : 62-711-713171, 713712, 713680
Facsimile : 62-711-713173
E-mail : bkipb@klasifikasiindonesia.com

Pekanbaru
Address : Komp. Perkantoran Sudirman Raya Blok D-4, Pekanbaru 28282 Indonesia
Telephone : 62-761-854042
Facsimile : 62-761-854042
E-mail : bkipn@klasifikasiindonesia.com

Pontianak
Address : Jl. Gusti Hamzah No. 211, Pontianak 78116 Indonesia
Telephone : 62-561-739579, 743107
Facsimile : 62-561-739579, 743107
E-mail : bkipk@klasifikasiindonesia.com

Samarinda
Address : Jl. Manggis No. 4, Samarinda Indonesia
Telephone : 62-541-734475
Facsimile : 62-541-734475
E-mail : bkibp@klasifikasiindonesia.com

Semarang
Address : Jl. Pamularsih No. 12 Semarang 50229 Indonesia
Telephone : 62-24-7610422
Facsimile : 62-24-7610422
E-mail : bkism@klasifikasiindonesia.com

Singapore
Address : 150 Changi Road #02-01 Aguthrie building – Singapore 419973
Telephone : 65-68830651, 68830643, 68830634
Facsimile : 65-63393631
E-mail : bki_sp@pacific.net.sg

Surabaya
Address : Jl. Kalianget No. 14, Surabaya 60165 Indonesia
Telephone : 62-31-3295448, 3295449, 3295465, 3295450, 3295451
Facsimile : 62-31-3294520, 3205451
E-mail : bkisb@klasifikasiindonesia.com

Sorong
Address : Jl. Jenderal Sudirman No. 140, Sorong 98414 Indonesia
Telephone : 62-951-322600
Facsimile : 62-951-323870
E-mail : bkisr@klasifikasiindonesia.com

Tanjung Priok
Address : Jl. Yos Sudarso 38-39-40, Tanjung Priok, Jakarta 14320 Indonesia
Telephone : 62-21-43930990, 4300993, 4301017, 4301701
Facsimile : 62-21-4301702, 43937020
E-mail : bkitp@klasifikasiindonesia.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Independent Auditor's Report

Laporan Keuangan 31 Desember 2008 dan 2007

Financial Statements Report December 31, 2008 and 2007

Laporan Evaluasi Kinerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008

Performance Evaluation Report for year ended December 31, 2008